



OPTIMALISASI PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA DIGITAL GUNA MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Ade Yaya Suryana, S.I.K., M.H.
Kombes Pol NRP. 71070352

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2024

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN INFORMASI
DI ERA DIGITAL GUNA MENYUKSESKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh:

Ade Yaya Suryana, S.I.K., M.H.
Kombes Pol NRP. 71070352

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Optimalisasi Pengelolaan Informasi di Era Digital Guna Menyukseskan Pembangunan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengangkatan Tutor Taskap Peserta PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksud, S.E. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, namun besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

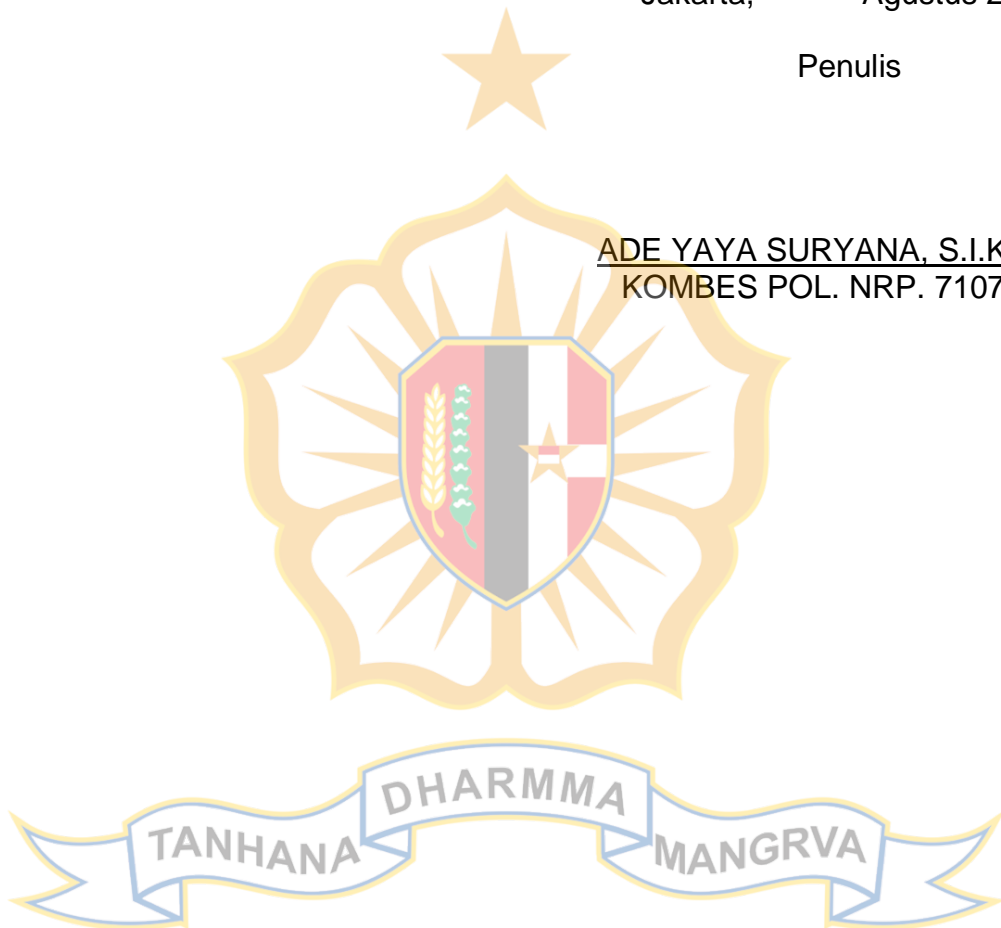
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2024

Penulis

ADE YAYA SURYANA, S.I.K., M.H.
KOMBES POL. NRP. 71070352



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Yaya Suryana, S.I.K., M.H.

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Keamanan Negara
Baintelkam Polri

Instansi : Polri

Alamat : Jl. Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2024
Penulis,



(Materai Rp 10.000,-)

ADE YAYA SURYANA, S.I.K., M.H.
KOMBES POL. NRP. 71070352

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Maksud dan Tujuan	8
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	8
5. Metode dan Pendekatan	11
6. Pengertian	12
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	16
7. Umum	16
8. Peraturan dan Perundang-Undangan	17
9. Data / Fakta	23
10. Kerangka Teoretis	32
11. Lingkungan Strategis	35

BAB III PEMBAHASAN	45
12. Umum	45
13. Pengelolaan Informasi di Era Digital Dalam Membangun Kepercayaan Publik Beserta Tantangan yang Dihadapi	46
14. Urgensi Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Optimalisasi Pengelolaan Informasi Guna Menyukkseskan Pembangunan Nasional	68
15. Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi di Era Digital Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Guna Mendukung Suksesnya Pembangunan Nasional	77
BAB IV PENUTUP	98
16. Simpulan	98
17. Rekomendasi	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. ALUR PIKIR	
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. STATISTIK PENGGUNA INTERNET DAN DIGITAL INDONESIA (JANUARI 2024)
- GAMBAR 2. GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA
- GAMBAR 3. ALASAN UTAMA PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA
- GAMBAR 4. 10 NEGARA DENGAN POPULASI TERBESAR YANG TIDAK TERKONEKSI INTERNET (JANUARI 2024)
- GAMBAR 5. TINGKAT PENETRASI INTERNET BERDASARKAN KELOMPOK GENERASI
- GAMBAR 6. INDEKS LITERASI DIGITAL INDONESIA (2021-2023)
- GAMBAR 7. POTRET SUARA WARGANET DALAM KASUS FS
- GAMBAR 8. TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI (2022)
- GAMBAR 9. TINGKAT KEPERCAYAAN LEMBAGA NEGARA
- GAMBAR 10. PERBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH POLRI
- GAMBAR 11. DIAGRAM TULANG IKAN (*FISHBONE DIAGRAM*)
- GAMBAR 12. 10 NEGARA DENGAN KASUS KEBOCORAN DATA TERBANYAK
- GAMBAR 13. JAJAK PENDAPAT BANJIR INFORMASI
- GAMBAR 14. *GRAND STRATEGY MATRIX*

DAFTAR TABEL

TABEL 1. IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGIS

TABEL 2. PERHITUNGAN IFAS

TABEL 3. PERHITUNGAN EFAS

TABEL 4. POSISI UPAYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN INFORMASI DI
ERA DIGITAL



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Di era digital ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia terhubung dengan teknologi, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga layanan publik. Internet, sebagai salah satu pilar utama dalam revolusi digital, telah memungkinkan sebuah berita tersebar dengan cepat dan luas, menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan geografis. Di zaman di mana sebuah berita dapat diakses dengan mudah dan cepat, kemampuan untuk mengelola, menyaring, serta menganalisis dengan efektif menjadi kunci utama untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif. Kemudahan ini tidak hanya berdampak pada aksesibilitas berita, tetapi juga pada kecepatan penyebarannya. Hal ini didukung oleh platform media sosial dan aplikasi berbagi data sehingga mempercepat proses distribusi berita, menjadikan masyarakat selalu *update* dengan perkembangan terkini, baik di lingkup nasional maupun global.

Informasi mengandung makna penerangan; pemberitahuan; kabar ataupun berita mengenai sesuatu.¹ Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa “informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional”.² Informasi dapat merujuk pada data atau fakta yang memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang suatu subjek atau kejadian. Informasi dapat bersifat umum atau spesifik, tergantung pada konteksnya. Informasi membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang suatu topik atau isu. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai media, termasuk tulisan, suara, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Akses mudah dan distribusi informasi yang luas dapat mendukung penyebaran pengetahuan dan memungkinkan partisipasi lebih banyak orang. Di era digital yang semakin maju,

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informasi>, diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

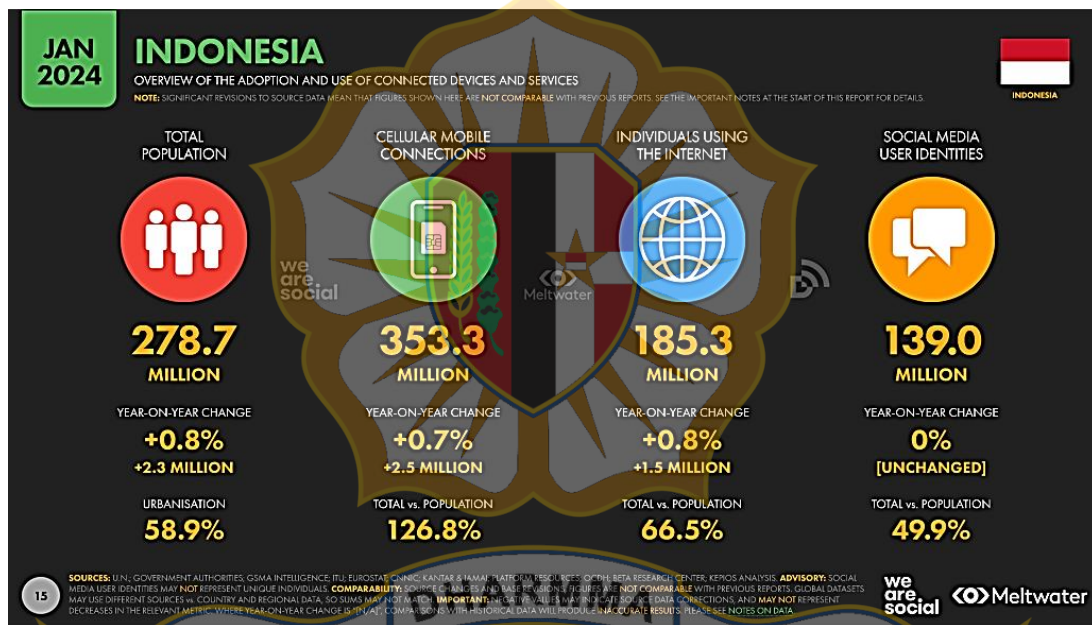
peran informasi menjadi krusial dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap berbagai isu dan kebijakan. Sesuai dengan perkembangan TIK, pengelolaan informasi menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepercayaan publik, sebuah elemen kunci dalam menjalankan pembangunan nasional. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola dan menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengelolaan informasi di era digital telah menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, jumlah data yang dihasilkan setiap hari meningkat secara eksponensial. Menurut laporan *International Data Corporation (IDC)*, diperkirakan bahwa pada tahun 2025, dunia akan menghasilkan sekitar 175 zettabyte data per tahun, meningkat tajam dari 33 zettabyte pada tahun 2018.³ Peningkatan volume data ini menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi yang relevan. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan informasi adalah fragmentasi data. Data sering kali disimpan di berbagai lokasi terpisah, baik secara fisik maupun digital, sehingga sulit untuk diintegrasikan dan dikelola secara efektif. Fragmentasi ini menyebabkan informasi yang seharusnya mudah diakses menjadi sulit ditemukan, memengaruhi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, keamanan dan privasi data menjadi perhatian yang semakin penting. Di era digital, ancaman terhadap data pribadi dan informasi sensitif meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah serangan siber dan kebocoran data. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk melindungi informasi tersebut sambil tetap memfasilitasi akses yang mudah bagi pihak yang berwenang. Masalah lain yang dihadapi adalah ketidakmampuan sistem informasi lama untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber, memperlambat proses digitalisasi, dan menghambat upaya untuk meningkatkan efisiensi serta daya saing.

³ Molitor, Dominik, *et. al.* (2024). "Exploring the Characteristics of Data Breaches: A Descriptive Analytic Study". *Journal of Information Security*, 2024, 15, 168-195.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi yang besar berimplikasi terhadap jumlah pengguna internet. Data yang dirilis oleh *We Are Social* memperlihatkan populasi penduduk Indonesia pada Januari 2024 sebanyak 278,7 juta jiwa dengan 185,3 juta jiwa terdata sebagai pengguna internet pada awal tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139 juta jiwa merupakan pengguna aktif media sosial di bulan Januari 2024, yang setara dengan 49,9% dari keseluruhan populasi. Sementara itu, terdapat 353,3 juta koneksi seluler aktif di Indonesia di awal tahun 2024, yang setara dengan 126,8% dari total populasi.⁴ Itu artinya, 1 orang penduduk Indonesia memiliki lebih dari 1 telepon seluler yang terkoneksi ke internet. Data ini lebih jelas dapat dilihat melalui infografis sebagai berikut:

Gambar 1. Statistik Pengguna Internet dan Digital Indonesia (Januari 2024)

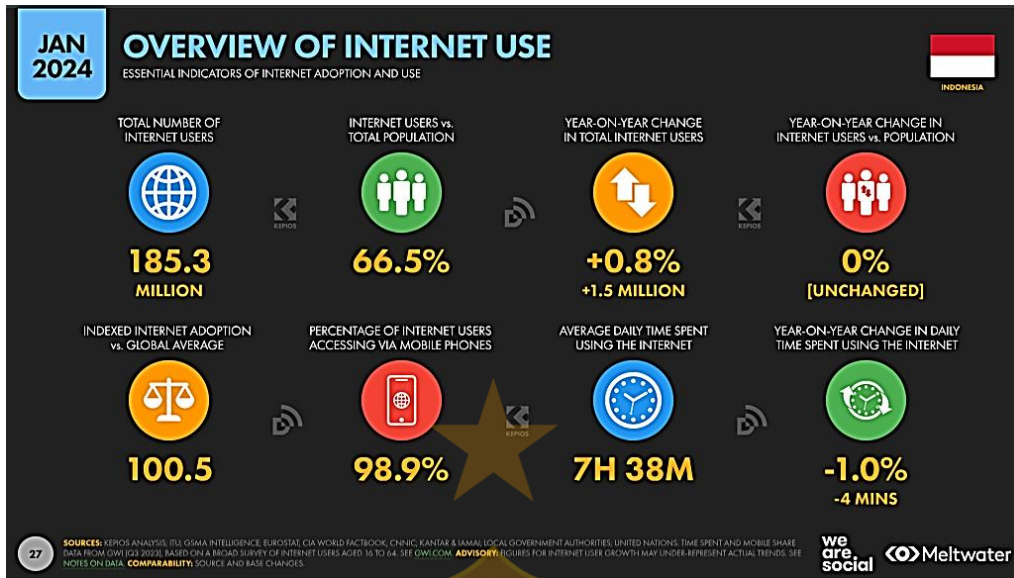


Rata-rata waktu harian yang dihabiskan untuk menggunakan internet oleh setiap pengguna (*user*) internet di Indonesia adalah selama 7 jam 38 menit, dengan 98,9% pengguna mengakses internet melalui telepon seluler mereka.⁵ Gambaran ini dapat dilihat melalui infografis di bawah ini:

⁴ Kemp, Simon. *Digital 2024: Indonesia*. URL. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 20.15 WIB.

⁵ *Ibid*

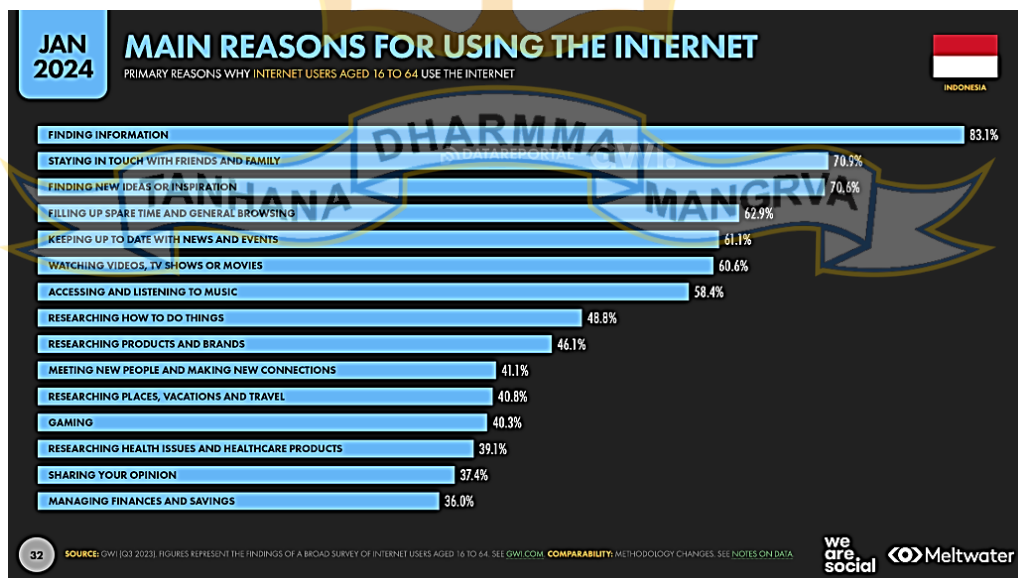
Gambar 2. Gambaran Umum Penggunaan Internet di Indonesia



Sumber: We Are Social

Adapun 3 (tiga) alasan utama pengguna internet Indonesia memanfaatkan internet adalah untuk mencari sebuah informasi sebesar 83,1%, diikuti untuk menjaga silaturahmi dengan teman dan keluarga sebesar 70,9%, dan mencari ide atau inspirasi baru sebesar 70,6%.⁶ Data ini dapat dilihat melalui infografis berikut:

Gambar 3. Alasan Utama Penggunaan Internet di Indonesia



Sumber: We Are Social

⁶ Ibid

Untuk itu dalam menghadapi dinamika informasi di era digital, pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu mengoptimalkan pengelolaan informasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipercaya dan membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik yang tinggi akan memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan nasional, sehingga menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Ketika informasi dielaborasi, diformat, dan disajikan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan yang diterapkan serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, transparansi menjadi prinsip kunci dalam optimalisasi pengelolaan informasi di era digital. Pemerintah perlu memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang relevan, serta menjelaskan secara terbuka mengenai proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Tantangan yang dihadapi dalam mengelola informasi di era digital tidak hanya terkait dengan jumlah data yang besar dan kompleks, tetapi juga dengan maraknya berita atau informasi bohong (hoaks) yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun politik di mana bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu 2024 yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024 yang lalu.⁷ Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sebanyak 203 isu hoaks yang telah diidentifikasi dengan penyebaran melalui berbagai platform sebanyak 2.882 konten, di antaranya Facebook sebanyak 1.325 konten, Twitter/X 947 konten, Instagram 198 konten, TikTok 342 konten, Snack Video 36 konten dan YouTube sebanyak 34 konten.⁸ Oleh karena itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi hal yang mendesak. Pemerintah perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang cara memilah, memahami, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber digital. Di sinilah dibutuhkan kehadiran lembaga hubungan

⁷ Komisi Pemilihan Umum. *Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024*. URL. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 22.05 WIB.

⁸ Biro Humas Kementerian Kominfo. *Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024*. URL. https://m.kominfo.go.id/content/detail/53920/siaran-pers-no-03hm_kominfo012024-tentang-jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024/0/siaran_pers, diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.14 WIB.

masyarakat (humas) sebagai garda terdepan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pada era digital ini, peran lembaga humas tidak hanya terbatas pada peran di belakang layar. Namun lembaga humas bertanggung jawab untuk membina hubungan kerja yang positif dengan masyarakat dan insan media. Tugas lembaga humas melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan responsif, serta kemampuan untuk menjawab pertanyaan dan keluhan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. Transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tidak dapat terelakkan, terlebih lagi semenjak mewabahnya virus Covid-19 yang “memaksa” kita untuk melakukan segala aktivitas secara digital. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam cara informasi disampaikan, diakses, dan dikelola. Bidang kehumasan, khususnya lembaga atau aktivitas Humas Polri dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, dengan sasaran ke dalam yaitu melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dari yang awalnya konvensional menjadi serba digital. Serta sasaran ke luar untuk membangun kesan (*image*) positif di kalangan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian, dengan kata lain menumbuhkan kembali citra positif kepolisian di mata masyarakat.

Kepercayaan publik kepada institusi Polri sempat mengalami penurunan drastis pada saat kemunculan tiga kasus besar yang melibatkan Polri. Dimulai dengan munculnya kasus FS, lalu tragedi Kanjuruhan, hingga kasus TM yang memberikan dampak negatif kepada citra Polri di mata masyarakat. Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo pun menyampaikan bahwa kepercayaan publik kepada Polri jatuh ke angka terendah ketika muncul kasus FS.⁹ Angka kepercayaan publik kepada Polri turun drastis ke angka 54% di bulan Agustus 2022, namun kurang dari satu tahun Polri berhasil menaikkan kembali kepercayaan publik ke angka 76%.¹⁰ Dalam rangka memulihkan citra yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat, Polri sedang melakukan upaya pembenahan. Salah satu langkah

⁹ CNN Indonesia. *Ramai Kritik Kasus Polri: Sambo, Kanjuruhan hingga Teddy Terseret Sabu*. URL. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221015141915-12-860971/ramai-kritik-kasus-polri-sambo-kanjuruhan-hingga-teddy-terseret-sabu>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 22.41 WIB.

¹⁰ Fajarlie, Nadia Intan. *Anjlok karena Kasus Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik ke Polri Melonjak pada Juni 2023*. URL. <https://www.kompas.tv/nasional/421882/anjlok-karena-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-ke-polri-melonjak-pada-juni-2023?page=all>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 23.11 WIB.

yang diambil adalah mendekati diri kepada masyarakat melalui Layanan Pengaduan Masyarakat yang dapat diakses secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja.¹¹ Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan permasalahan masyarakat, memberikan rasa aman, dan mengurangi risiko tindak kejahatan.

Dengan mengelola informasi secara efektif dan membangun kepercayaan publik, Polri dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk suksesnya pembangunan nasional. Kepercayaan masyarakat yang kuat akan menghasilkan kolaborasi yang lebih baik di antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.¹² Oleh karena itu, pengelolaan informasi di era digital perlu dioptimalkan sehingga menjadi kunci penting dalam menyukseskan upaya pembangunan nasional menuju masyarakat yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang serta fakta kondisi yang terjadi, maka rumusan masalah yang diusulkan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini yaitu: **“bagaimana mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital guna menyukseskan pembangunan nasional?”**. Dengan mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja tantangan yang muncul dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital untuk membangun kepercayaan publik?

¹¹ HumasRes Pagaralam. *Antisipasi Tindak Kejahatan, Polri Memberikan Bantuan Polisi Kepada Masyarakat*. URL. <https://humas.polri.go.id/2023/11/07/antisipasi-tindak-kejahatan-polri-memberikan-bantuan-polisi-kepada-masyarakat/>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 23.22 WIB.

¹² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Mengapa kepercayaan publik perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan informasi guna menyukseskan pembangunan nasional?
- c. Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital untuk membangun kepercayaan publik dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan melakukan analisis serta memecahkan permasalahan terkait optimalisasi pengelolaan informasi di era digital guna menyukseskan pembangunan nasional. Selain itu, penulisan Taskap ini juga dimaksudkan untuk mencermati sejauh apa dampak lingkungan strategis dalam rangka merencanakan sebuah kebijakan dan program yang mampu mendukung optimalisasi pengelolaan informasi di era digital guna menyukseskan pembangunan nasional.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Taskap ini ialah untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada para pemangku kepentingan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait optimalisasi pengelolaan informasi di era digital guna menyukseskan pembangunan nasional. Hal ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan serta pertimbangan di dalam suatu proses pengambilan keputusan.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Dalam penulisan Taskap ini, agar masalah yang dibahas tidak meluas sehingga analisis dan pembahasannya akan lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada fungsi pengelolaan informasi/kehumasan di Polri.

b. Sistematika

Sistematika atau tata urutan penulisan Taskap ini meliputi 4 (empat) bab, di mana setiap bab berisi uraian mengenai aspek-aspek yang relevan dengan judul Taskap. Sistematika dan urutan penulisan menguraikan isi dari setiap bab serta hubungannya antara satu bab dengan yang lainnya.

1) Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pintu gerbang untuk memperkenalkan konteks, urgensi, dan tujuan dari penulisan Taskap. Pada bab ini, pembaca akan diajak untuk memahami mengapa pengelolaan informasi di era digital sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Pendahuluan ini juga akan menggarisbawahi tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi, serta memperkenalkan gagasan tentang bagaimana optimalisasi pengelolaan informasi dapat menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan nasional. Bab ini terdiri dari pasal Latar Belakang yang menarasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan judul, yang diawali narasi yang menjelaskan keadaan yang bersifat umum menuju kepada khusus, atau sebaliknya; pasal Rumusan Masalah yang merupakan sebuah pernyataan tentang permasalahan dan diikuti dengan pertanyaan tentang formulasi suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya (harapan/keadaan ideal) dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang; pasal Maksud dan Tujuan yang menjelaskan maksud dan tujuan dari penulisan Taskap; pasal Ruang Lingkup yang digunakan untuk membatasi agar masalah yang dibahas tidak meluas sehingga analisis dan pembahasannya akan lebih fokus dan mendalam, serta Sistematika yang menguraikan penulisan dengan lengkap disertai penjelasan dalam bentuk narasi; pasal Metode dan Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Taskap; serta pasal Pengertian yang memperjelas kata/istilah yang dianggap penting dan belum lazim berkaitan dengan tulisan untuk menghindari timbulnya salah pengertian. Dengan demikian, bab pendahuluan akan berperan sebagai fondasi yang kuat untuk menarik

perhatian pembaca dan membawa mereka memahami urgensi serta relevansi dari topik yang akan dibahas.

2) **Bab II Landasan Pemikiran**

Landasan Pemikiran merupakan dasar pemikiran terhadap permasalahan yang diangkat dan dicarikan solusinya, sehingga bab ini berisi pasal-pasal yang mencerminkan tinjauan tentang masalah. Pasal-pasal di dalam bab ini meliputi pasal Umum yang menguraikan secara umum dan ringkas tentang hal-hal yang akan dibahas dalam pasal-pasal Landasan Pemikiran selanjutnya; pasal Peraturan dan Perundang-Undangan yang berisi tentang perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang telah ada dan dijadikan sebagai alat untuk meninjau permasalahan yang diangkat; pasal Data/Fakta yang mencantumkan data/fakta aktual dan objektif yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik berupa data sekunder dan/atau primer yang relevan dengan pertanyaan kajian; pasal Kerangka Teoretis yang menjelaskan berbagai teori yang digunakan sebagai landasan analisis yang dibangun untuk dapat dijadikan alat bantu dalam menguraikan dan memecahkan masalah dalam pembahasan pada Bab III; serta pasal Lingkungan Strategis yang menjelaskan tentang kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh erat terhadap permasalahan yang dikaji dalam Taskap ini. Landasan Pemikiran juga berfungsi untuk menunjukkan akuntabilitas perolehan sumber informasi referensi secara adopsi, adaptasi, dan mengikutsertakan sumber rujukannya. Pada dasarnya, permasalahan yang dibahas harus selalu didasarkan pada referensi dan data/fakta yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

3) **Bab III Pembahasan**

Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis pokok-pokok pembahasan yang meliputi: Tantangan yang Muncul Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi di Era Digital Untuk Membangun Kepercayaan Publik; Perlunya Optimalisasi Pengelolaan Informasi di Era Digital Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pembangunan Nasional; serta Strategi Polri Untuk Mengoptimalkan

Pengelolaan Informasi di Era Digital Guna Membangun Kepercayaan Publik Dalam Rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, melalui analisis ketiga pokok pembahasan tersebut akan diperoleh langkah-langkah strategis dalam mengubah keadaan menuju keadaan yang lebih baik dengan berdasar kepada teori yang digunakan untuk memecahkan masalah strategis yang ditemukan.

4) **Bab IV Penutup**

Dalam bab terakhir sebagai bab penutup tentunya penulis akan memberikan Simpulan yang menguraikan secara ringkas tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian, serta Rekomendasi yang berisi uraian tindakan berupa saran strategis dalam memperbaiki keadaan dan bersifat operasional, yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital guna menyukseskan pembangunan nasional.

5. **Metode dan Pendekatan**

a. **Metode**

Penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif yang memfokuskan pada pengumpulan serta analisis penyajian data dan fakta melalui studi literatur (studi kepustakaan) dari sumber data sekunder dan/atau data primer. Metode ini akan dijelaskan sebagai sebuah kajian strategis dengan menggunakan metodologi diagram tulang ikan (*fishbone diagram*).

b. **Pendekatan**

Dalam Taskap ini, digunakan pendekatan yang mengutamakan kepentingan nasional, dengan menerapkan analisis multidisiplin sesuai dengan kerangka teoretis yang akan digunakan.

6. Pengertian

Beberapa pengertian yang digunakan untuk menghindari pemahaman yang berbeda dan menciptakan keseragaman pandangan pada pembahasan selanjutnya, di antaranya:

a. Optimalisasi

Optimalisasi secara umum yaitu pelaksanaan sebuah rencana yang telah ditentukan.¹³ Perera dkk mengatakan jika definisi optimalisasi adalah melakukan suatu pekerjaan secara baik dan benar berdasarkan dengan rencana waktu maupun jadwal yang sudah direncanakan.¹⁴ Suatu pekerjaan dapat dianggap optimal ketika usaha atau pekerjaan berhasil mencapai tujuannya. Jika tujuan itu adalah tujuan sebuah lembaga, dengan demikian proses pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan pelaksanaan program atau pekerjaan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi lembaga tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi merupakan segala upaya untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi.

b. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan”.¹⁵ Sementara pandangan Soewarno Handyaningrat, pengelolaan juga dapat dimaknai sebagai pelaksanaan suatu kegiatan. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang merupakan sebuah proses yang meliputi perencanaan, organisasi, arahan, dan pengawasan atas upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi, serta pemanfaatan sumber daya lainnya demi mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi.¹⁶

¹³ Ahyar, Juni dan Safrida. (2020). *Optimalisasi Pelayanan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Asia-Pacific Journal of Public Policy - Vol. 06 No. 02 (2020) 69-89.

¹⁴ Perera, C. J., Zainuddin, Z., Piaw, C. Y., Cheah, K. S., & Asirvatham, D. (2020). The Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. *Education and Urban Society*, 52(9), 1305-1329.

¹⁵ KBBI. -. “Kelola”. URL. <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 9 April 2024 pukul 18.42 WIB.

¹⁶ Handyaningrat, Soewarno. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.

c. Data

Data adalah fakta tentang suatu objek, yang dapat berupa angka, karakter, maupun simbol.¹⁷ Menurut Suharsimi Arikunto (2013), “Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka”.¹⁸ Data dapat berupa representasi dari berbagai aspek dunia nyata, termasuk hasil pengukuran, observasi, atau input dari berbagai sumber. Data umumnya dianggap sebagai bahan mentah yang belum diolah atau dianalisis, tetapi memiliki potensi untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang berharga ketika diproses dengan alat analisis atau dikelompokkan menjadi informasi yang lebih bermakna.

d. Informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang diubah menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi penerimanya. Sumber dari sebuah informasi yaitu data. Sebuah informasi dianggap memiliki nilai jika manfaatnya melebihi biaya untuk memperolehnya. Fungsi utama informasi yaitu untuk mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan mengenai suatu situasi.¹⁹ Informasi adalah data yang telah diproses agar dapat digunakan, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan terkait siapa (*who*), apa (*what*), kapan (*when*), dan di mana (*where*).²⁰ Informasi merupakan data yang telah diolah atau diinterpretasikan menjadi bentuk yang lebih bermakna atau bermanfaat untuk penggunaannya. Informasi memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu subjek atau kejadian tertentu, dan dapat digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Informasi dapat berupa fakta, angka, teks, gambar, suara, atau kombinasi dari berbagai bentuk tersebut.

¹⁷ Hariyanto, B. (2004). *Sistem Manajemen Basis Data*. Bandung: Informatika.

¹⁸ Suharsimi, Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁹ Hermanto, Bambang dkk. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada PT. Hulu Balang Mandiri Menggunakan Framework Laravel*. Jurnal Komputasi, Vol 7 No.1.

²⁰ Rizky, Farid Al dan Sudhana, Pranakusuma. (2022). *Implementasi Konsep DIKW Pada Penggunaan Microsoft Dynamics 365 CRM Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi kasus pada LKP LCS di Surabaya)*. JIS (Jurnal Ilmu Siber) Vol. 1, No. 4, November 2022.

e. **Era Digital**

Era digital merupakan masa di mana mayoritas masyarakat memanfaatkan sistem digital dalam aktivitas mereka sehari-hari. Ini adalah zaman di mana arus informasi antar media komunikasi cenderung lebih transparan, tepat, dan cepat.²¹ Era digital merujuk pada periode di mana teknologi digital, seperti komputer dan internet, memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi, bisnis, pendidikan, dan budaya. Menurut Brynjolfsson dan McAfee (2014), era digital adalah masa di mana teknologi komputer dan internet mengubah secara fundamental cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi.²²

f. **Pembangunan Nasional**

Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 menyatakan “Pembangunan nasional adalah usaha seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara”.²³ Pembangunan nasional yaitu rangkaian kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menjawab tantangan pencapaian tujuan nasional. Pembangunan nasional memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta rakyat Indonesia dengan berkelanjutan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperhatikan tantangan perkembangan dunia. Pembangunan nasional Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila menjadi landasan, tujuan, serta panduan dalam pembangunan. Pembangunan nasional mencerminkan tekad yang teguh untuk mencapai rakyat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata serta kehidupan rakyat yang meningkat dan majunya pemerintahan demokratis yang berlandaskan Pancasila.²⁴

²¹ Rahayu, Puji. (2019). *Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak*. Jurnal Al-Fathin Vol. 2 Edisi Januari-Juni 2019.

²² Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton & Company.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1.

²⁴ Kartasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides.

g. ***Fishbone Diagram***

Fishbone diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa di tahun 1943, oleh karena itu diagram ini kerap kali dikenal dengan diagram Ishikawa. Fungsi dasar *fishbone diagram* yaitu untuk mengenali serta mengorganisasi kemungkinan berbagai penyebab yang muncul dari sebuah permasalahan serta untuk kemudian dipisahkan akar penyebabnya.²⁵ *Fishbone diagram* menunjukkan garis dan lambang yang mewakili hubungan antara sebab dan akibat dari suatu masalah. *Fishbone diagram* sering disebut diagram sebab akibat, yaitu diagram yang mirip dengan tulang ikan yang bisa memperlihatkan sebab dan akibat dari sebuah masalah. Faktor-faktor yang paling memengaruhi kualitas *fishbone diagram* adalah 5M + 1E, yakni mesin (*Machine*), manusia (*Man*), metode (*Method*), bahan baku (*Material*), pengukuran (*Measurement*), serta lingkungan (*Environment*). Keenam faktor itu bermanfaat untuk membagi dalam beberapa kelompok macam akar masalah ke dalam suatu golongan. Setiap faktor dalam tulang mempunyai akar masalah sendiri, *fishbone diagram* memudahkan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah.²⁶



²⁵ "Fishbone Diagram". URL. <https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>, diakses pada 9 April 2024 pukul 19.00 WIB.

²⁶ "Modul Diagram Fishbone & 5-Why Analysis". URL. <https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/tmi/2014/jiunkpe-is-s1-2014-25410009-30972-kecacatan-appendices.pdf>, diakses pada 9 April 2024 pukul 19.24 WIB.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Dalam era digital yang sedang berkembang pesat, pengelolaan informasi menjadi kunci utama dalam merancang dan menjalankan keberhasilan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, landasan pemikiran yang mencakup peraturan dan perundang-undangan, data atau fakta, kerangka teoretis, serta perkembangan lingkungan strategis menjadi esensial untuk membentuk strategi yang efektif. Landasan pertama yang menjadi fokus adalah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tata kelola informasi di era digital. Undang-undang perlindungan data, keamanan informasi, dan akses terhadap informasi merupakan instrumen hukum yang menjadi pijakan untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan kepastian hukum ini, diharapkan masyarakat dan pelaku bisnis dapat memanfaatkan informasi dengan lebih aman dan produktif.

Data dan fakta memberikan dasar empiris yang diperlukan dalam melihat dan membahas permasalahan secara utuh dan menyeluruh untuk mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan informasi. Fakta-fakta tentang penetrasi internet, tren penggunaan teknologi informasi, dan kebutuhan informasi masyarakat menjadi landasan yang penting dalam merancang kebijakan yang relevan dan efektif. Pertumbuhan eksponensial data digital membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mengelola, menganalisis, dan mengambil manfaat dari informasi tersebut. Kerangka teoretis menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas pengelolaan informasi di era digital. Teori-teori tentang manajemen informasi, ekonomi digital, dan kebijakan publik memberikan pandangan yang diperlukan dalam merancang strategi yang adaptif dan inovatif. Konsep-konsep seperti *big data analytics*, *machine learning*, dan keamanan siber menjadi instrumen yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi.

Perkembangan lingkungan strategis, baik dari segi teknologi maupun faktor-faktor eksternal seperti sosial, ekonomi, dan politik, turut memengaruhi strategi pengelolaan informasi. Perubahan teknologi informasi, transformasi digital di berbagai sektor, dan dinamika perilaku konsumen terhadap informasi menjadi faktor-faktor yang harus diperhitungkan dengan cermat. Dengan memahami dan merespons perubahan lingkungan strategis ini, pengelolaan informasi dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional dengan lebih efektif dan relevan. Dengan memperhatikan landasan pemikiran yang mencakup peraturan dan perundang-undangan, data atau fakta, kerangka teoretis, serta perkembangan lingkungan strategis, diharapkan strategi pengelolaan informasi di era digital dapat menjadi alat yang kuat dalam menyelesaikan pembangunan nasional.

8. Peraturan dan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum dasar di dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁷ Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tercantum tujuan nasional yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.²⁸ Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital dalam rangka menyelesaikan pembangunan nasional. Pasal 28E Ayat (3) menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Pasal ini menginterpretasikan kebebasan menyampaikan pendapat mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Pengelolaan informasi yang optimal harus memperhatikan hak setiap individu untuk berpendapat dan berkomunikasi secara bebas, asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3 Ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea IV.

Kemudian pada Pasal 28F dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal ini menginterpretasikan hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang ada. Pasal 28G Ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.” Perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan informasi di era digital. Pembangunan nasional yang sukses membutuhkan keamanan informasi yang memadai untuk melindungi hak-hak individu dan entitas yang terlibat. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dapat mengembangkan undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang mendukung optimalisasi pengelolaan informasi di era digital guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

b. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri)**

UU Polri tidak secara langsung membahas optimalisasi pengelolaan informasi di era digital, namun terdapat beberapa pasal yang relevan dengan pengelolaan informasi di era digital dan berkaitan dengan pembangunan nasional. Pasal 5 Ayat (1) UU Polri menegaskan bahwa Polri bertugas melaksanakan fungsi kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan, Polri perlu memastikan keamanan informasi dan data, terutama dalam era digital yang rentan terhadap ancaman keamanan siber. Ini melibatkan upaya-upaya untuk mencegah akses ilegal terhadap data sensitif, melindungi infrastruktur penting dari serangan siber, dan menyelidiki kejahatan siber yang terjadi. Keterlibatan Polri dalam menegakkan hukum juga mencakup ranah digital. Polri perlu memiliki

kemampuan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi melalui media digital, seperti penipuan *online*, peretasan, atau penyebaran konten ilegal. Dalam menjalankan fungsi pengayoman, Polri juga dapat terlibat dalam memastikan perlindungan data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan, terutama di era digital di mana privasi sering kali terancam oleh praktik pengumpulan data yang tidak sah. Pembangunan nasional di era digital juga mencakup transformasi layanan publik menjadi bentuk yang lebih efisien dan terjangkau melalui platform digital. Polri dapat berperan dalam memastikan keamanan dan keandalan layanan-layanan ini, serta memberikan dukungan teknis dalam hal pengelolaan informasi. Dengan demikian, Pasal 5 Ayat (1) UU Polri memberikan landasan bagi Polri untuk terlibat dalam pengelolaan informasi di era digital guna mendukung pembangunan nasional, dengan fokus pada aspek keamanan, penegakan hukum, perlindungan data, dan pelayanan publik.

Pasal 13 memberikan dasar hukum bagi Polri untuk melakukan pengelolaan informasi sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi Polri untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan digital. Di era digital, kejahatan siber dapat mengganggu stabilitas dan kemajuan pembangunan nasional. Dengan memiliki kewenangan dalam pengelolaan informasi, Polri dapat secara proaktif mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi ancaman kejahatan digital ini. Pengelolaan informasi yang baik juga mencakup perlindungan terhadap data dan privasi individu. Di era digital, di mana pertukaran informasi secara *online* sangatlah luas, penting bagi negara untuk mengamankan data rahasia dan pribadi warganya. Polri, melalui Pasal 13 UU Polri, dapat mengembangkan kebijakan dan strategi untuk melindungi data sensitif dan privasi masyarakat dari ancaman siber. Polri dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi, Polri dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi digital yang aman. Ini termasuk memberikan informasi tentang cara mengenali ancaman *online*, praktik keamanan digital, dan pentingnya menjaga integritas data

pribadi. Dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, Polri dapat membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan nasional di era digital.

c. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**

UU KIP memiliki peran penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh lembaga publik. Prinsip-prinsip utama UU KIP adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks optimalisasi pengelolaan informasi di era digital untuk mendukung pembangunan nasional, UU KIP memiliki beberapa pasal yang relevan. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap informasi publik memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas. Pasal 4 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dalam era digital, hal ini menegaskan pentingnya penyediaan informasi secara daring atau *online* agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam pasal ini juga memberikan hak kepada setiap individu untuk mengajukan permintaan informasi kepada lembaga publik. Dalam konteks digital, pasal ini mengakui pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui platform daring atau aplikasi yang disediakan oleh lembaga publik.

Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, selain informasi yang dikecualikan. Dalam era digital, pasal ini menekankan perlunya badan publik memiliki sistem pengelolaan informasi yang efisien dan terintegrasi untuk menyediakan informasi secara rutin dan transparan kepada masyarakat. Pasal 17 menjelaskan terkait informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diberikan kepada masyarakat, salah satunya yaitu informasi data pribadi. Di era digital yang rentan terhadap pelanggaran data, pasal ini penting untuk memastikan bahwa informasi data pribadi yang dikelola oleh badan publik dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, UU KIP memberikan landasan hukum yang kuat untuk optimalisasi pengelolaan informasi di era digital guna mendukung

pembangunan nasional melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang lebih baik.

d. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

UU ITE adalah langkah legislatif yang signifikan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam era digital. UU ITE menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan pengertian informasi elektronik sebagai data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, simbol yang telah diolah yang memiliki makna. Pasal 4 menegaskan tujuan dari UU ini, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia melalui optimalisasi pengelolaan informasi.

UU ITE mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan informasi elektronik, antara lain keamanan, keabsahan, kepastian hukum, kerahasiaan, dan lain-lain, yang harus diterapkan dalam setiap transaksi elektronik; kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi informasi elektronik yang dikelolanya; tanggung jawab pengguna layanan atas informasi yang dihasilkan, disimpan, diteruskan, atau diaksesnya melalui sistem elektronik. UU ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap informasi pribadi pengguna layanan, termasuk pengaturan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi. Di samping itu, Pasal 45 mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan UU ini, yang dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, UU ITE menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk mengelola informasi di era digital dengan cara yang mendukung pembangunan nasional, sekaligus memberikan perlindungan yang cukup terhadap semua pihak yang terlibat dalam informasi dan transaksi elektronik.

e. **Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Perkapolri No. 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di Lingkungan Polri mencakup berbagai aspek yang relevan dengan optimalisasi pengelolaan informasi di era digital guna menyukseskan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pengelolaan sistem telekomunikasi oleh Polri menjadi kunci untuk mengoptimalkan aliran informasi yang cepat, akurat, dan aman demi mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pembangunan nasional secara keseluruhan. Perkapolri ini memberikan pedoman tentang penggunaan TIK secara optimal dalam operasi kepolisian. Ini mencakup penggunaan perangkat keras dan lunak terbaru untuk mengelola dan menyebarkan informasi dengan lebih efisien di era digital.

Salah satu aspek penting dari pengelolaan informasi di era digital adalah perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan informasi. Perkapolri ini mengatur tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh Polri aman dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Perkapolri ini juga menetapkan kebijakan tentang bagaimana sistem telekomunikasi Polri dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan nasional. Ini termasuk penggunaan sistem tersebut untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keamanan nasional, penegakan hukum, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Dalam era digital, integrasi berbagai sistem informasi menjadi penting. Perkapolri ini memuat ketentuan tentang bagaimana sistem telekomunikasi Polri harus terintegrasi dengan sistem lainnya baik di internal Polri maupun dengan lembaga lain terkait, untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan efektif.

f. **Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Perkapolri No. 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri bertujuan untuk memperkuat komunikasi publik di lingkungan

Polri. Dalam konteks optimalisasi pengelolaan informasi di era digital, komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan akurat. Era digital menuntut pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dalam pengelolaan informasi. Pasal 8 peraturan ini mencakup strategi dan pedoman untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan kehumasan Polri, seperti penggunaan media sosial, situs web resmi, atau aplikasi *mobile* untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat, melakukan manajemen media serta agenda setting media.

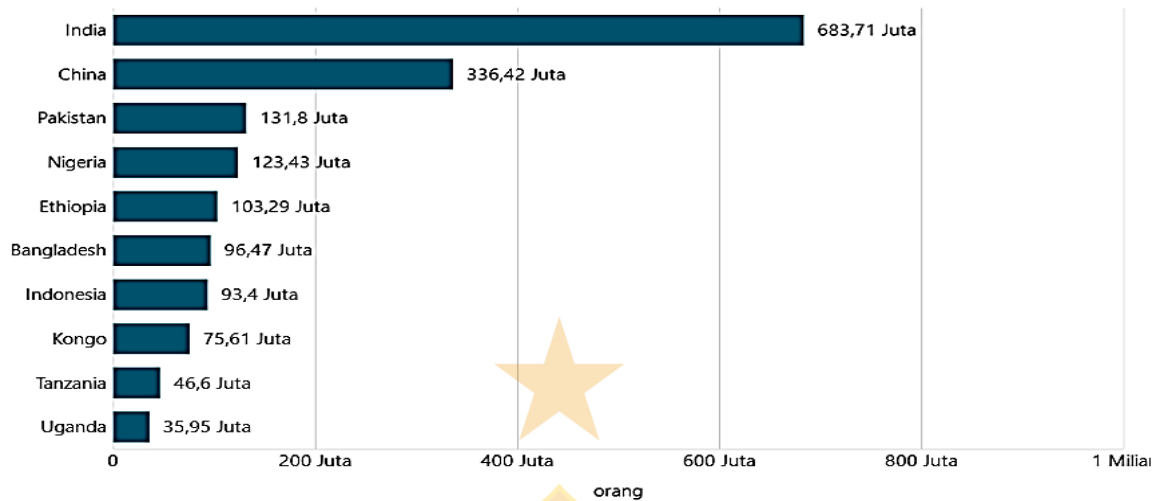
Optimalisasi pengelolaan informasi di era digital juga berarti Polri perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Perkapolri ini mencakup ketentuan tentang keterbukaan informasi dan kewajiban untuk memberikan tanggapan yang jelas terhadap pertanyaan atau masukan dari masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting. Peraturan ini juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan informasi, baik sebagai penerima informasi maupun sebagai kontributor informasi yang relevan bagi kegiatan Polri.

9. Data/Fakta

Sesuai data yang telah diuraikan pada Bab I, pada awal tahun 2024 terdapat 185,3 juta pengguna internet di Indonesia. Namun, masih ada sekitar 93,4 juta orang Indonesia yang belum terkoneksi dengan internet, setara dengan 33,5% dari total populasi. Jumlah tersebut membuat Indonesia menempati urutan ke-7 negara dengan populasi terbesar yang tidak terkoneksi ke internet.²⁹

²⁹ Annur, Cindy Mutia. *Ada 93,4 Juta Orang Indonesia Belum Terkoneksi Internet, Peringkat Berapa di Dunia?*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/ada-934-juta-orang-indonesia-belum-terkoneksi-internet-peringkat-berapa-di-dunia>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 20.30 WIB.

Gambar 4. 10 Negara dengan Populasi Terbesar yang Tidak Terkoneksi Internet (Januari 2024)

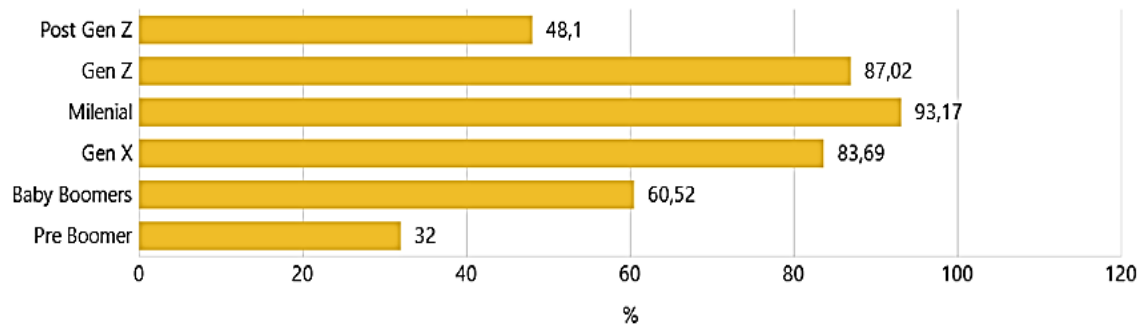


Sumber: Databoks

Sementara itu menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 79,5%. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin terhubung dengan dunia digital, memberikan peluang besar untuk optimalisasi pengelolaan informasi. Walaupun tingkat penetrasi internet Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi sebarannya belum merata. Pulau Jawa menjadi pulau dengan tingkat penetrasi paling tinggi sebesar 83,64%, sementara Sulawesi menjadi pulau dengan tingkat penetrasi terendah sebesar 68,35%.³⁰ Dari segi kelompok generasi, penetrasi internet di Indonesia didominasi oleh generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 93,13%, diikuti oleh Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 87,02%, kemudian Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 83,69%, *Baby Boomers* (kelahiran 1946-1964) sebanyak 60,52%, *Post Gen Z* (kelahiran di atas 2013) sebanyak 48,1%, dan terakhir generasi *Pre Boomer* (kelahiran di bawah 1945) sebanyak 32%.³¹

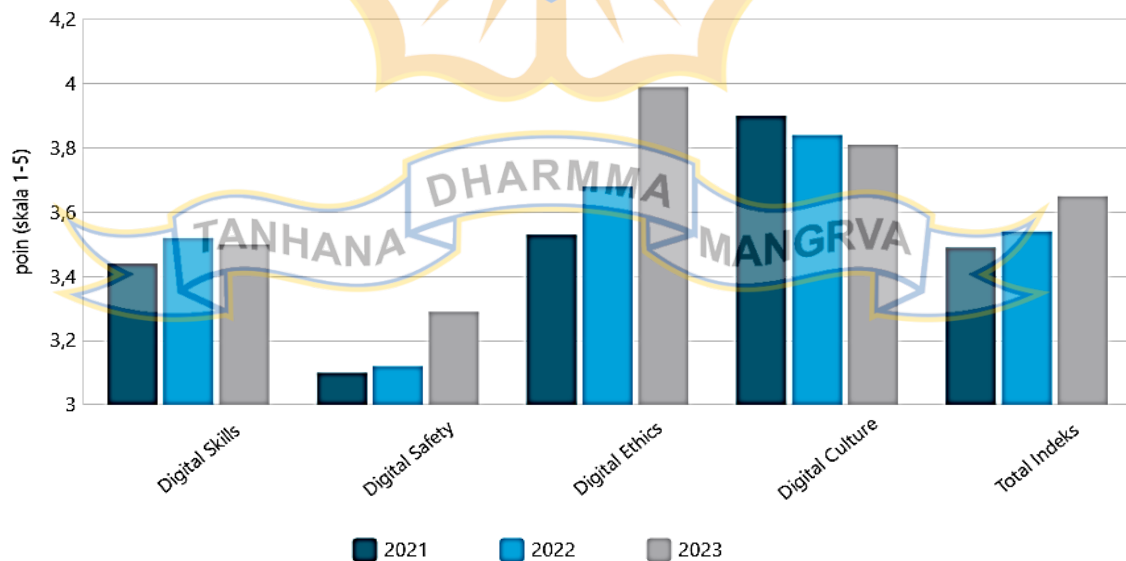
³⁰ Santika, Erlina F. *Peta Penetrasi dan Kontribusi Internet Indonesia 2024, Jawa Tertinggi*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/12/peta-penetrasi-dan-kontribusi-internet-indonesia-2024-jawa-tertinggi>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 20.45 WIB.

³¹ Annur, Cindy Mutia. *Penetrasi Internet Generasi Milenial Tertinggi Dibanding Kelompok Usia Lainnya di Indonesia*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/penetrasi-internet-generasi-milenial-tertinggi-dibanding-kelompok-usia-lainnya-di-indonesia>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 21.10 WIB.

Gambar 5. Tingkat Penetrasi Internet Berdasarkan Kelompok Generasi

Sumber: Databoks

Keterampilan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara umum telah meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terungkap dari laporan Status Literasi Digital di Indonesia tahun 2023, yang menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia pada tahun tersebut mencapai 3,65 dari skala 1 hingga 5, menempatkannya dalam kategori tinggi. Evaluasi ini mengukur empat aspek literasi digital, yakni keterampilan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital.³²

Gambar 6. Indeks Literasi Digital Indonesia (2021-2023)

Sumber: Databoks

³² Muhamad, Nabilah. *Indeks Literasi Digital Indonesia Terus Meningkat sampai 2023*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/preview/2023/12/14/indeks-literasi-digital-indonesia-terus-meningkat-sampai-2023>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 21.30 WIB.

Pemerintah telah berupaya untuk lebih meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai strategi, salah satunya melalui Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital” yang merupakan inisiasi penguatan keterampilan digital dasar (literasi digital) masyarakat Indonesia. Program ini memiliki kelas daring dan pelatihan gratis untuk seluruh masyarakat yang dapat diakses oleh publik melalui **event.literasidigital.id**. Program ini bertujuan untuk dapat menjangkau total sebanyak 50 juta masyarakat Indonesia di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, dengan target 12.448.750 orang per tahun yang terdiri dari 10.000.000 peserta kegiatan/*webinar* dan 2.448.750 peserta kelas daring, lokakarya, pelatihan dan diskusi terkait 4 (empat) pilar literasi digital.³³

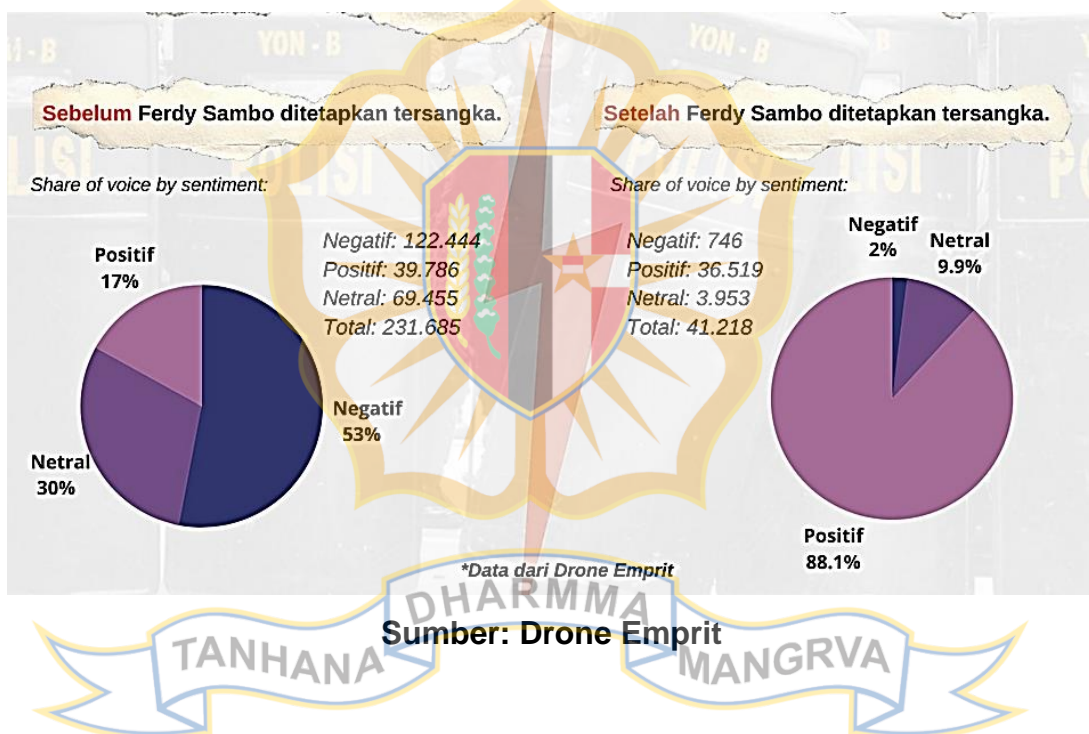
Tahun 2024, yang merupakan tahun politik meningkatkan jumlah berita hoaks yang tersebar melalui berbagai platform digital yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024, terdapat 3.235 berita hoaks terkait Pemilu, tetapi Kominfo hanya *men-take down* atau menurunkan 1.971 berita hoaks.³⁴ Karena itu, meningkatkan kemampuan literasi digital di masyarakat menjadi suatu kebutuhan mendesak. Pemerintah harus secara aktif memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara menyaring, memahami, dan menilai informasi yang diperoleh dari berbagai platform digital. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga hubungan masyarakat (humas) menjadi kunci untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kehumasan dalam hal ini Humas Polri harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mengubah cara mereka menjalankan tugas dan fungsi, dari yang awalnya konvensional menjadi sepenuhnya berbasis digital. Di samping itu, mereka juga bertujuan untuk menjaga citra positif Polri di mata masyarakat dengan upaya membangun kesan yang baik tentang kinerja aparat kepolisian. Dengan kata lain, mereka berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap polisi melalui strategi komunikasi yang modern dan efektif.

³³ Adhiama, I Nyoman. (2024). “Kepemimpinan Digital dan Percepatan Transformasi Digital di Indonesia”. Materi Ceramah BS. Kepemimpinan PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI.

³⁴ Achmad, Nirmala Maulana dan Setuningsih, Novianti. *Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024*. URL. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/15355831/kemenkominfo-take-down-1971-berita-hoaks-terkait-pemilu-2024>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 10.30 WIB.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu Polri diuji dengan berbagai kasus yang melibatkan oknum petinggi Polri. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus FS, sehingga mencoreng nama baik instansi Polri dan memberikan dampak buruk kepada citra Polri di mata masyarakat. Isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya terkait dengan kasus FS, tetapi lebih pada kinerja dan hubungan antara anggota kepolisian dengan masyarakat. Masyarakat menganggap masalah di dalam Polri tidak hanya disebabkan oleh perilaku individual, melainkan juga oleh sistem yang belum mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja, integritas, kemandirian, dan budaya anggota kepolisian.

Gambar 7. Potret Suara Warganet dalam Kasus FS



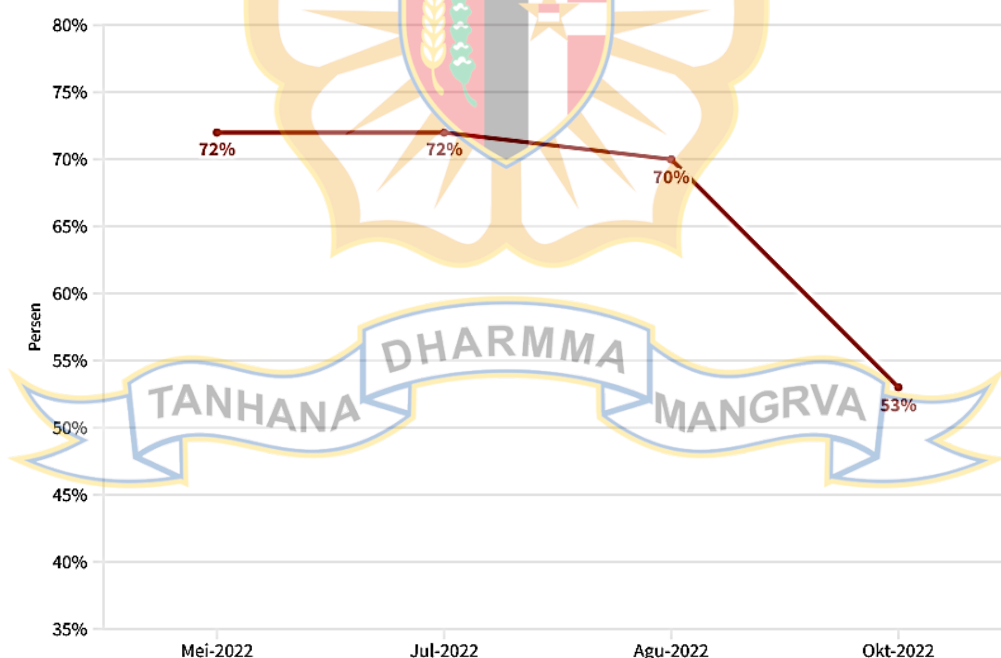
Dari infografis di atas dapat dilihat bahwa sebelum FS ditetapkan sebagai tersangka, 53% sentimen negatif masyarakat muncul di media sosial dengan jumlah 122.444 unggahan.³⁵ Hal ini menjadikan kepercayaan masyarakat kepada instansi Polri merosot yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi Polri kepada masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan fungsi kepolisian yang tertuang dalam UU Polri yaitu “fungsi pemerintahan negara di

³⁵ Kompas.com. *Citra Polri Setelah Rekayasa Sambo Terbongkar*. URL. <https://jeo.kompas.com/citra-polri-setelah-rekayasa-ferdy-sambo-terbongkar>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 10.50 WIB.

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.³⁶

Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepercayaan masyarakat terhadap Polri telah mengalami penurunan drastis sebesar 17%, menjadi 53% di bulan Oktober 2022. Penurunan ini terutama terjadi setelah kasus pembunuhan berencana oleh FS dan juga tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya, survei yang sama mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mengalami penurunan sebesar 2% dari 72% menjadi 70% pada bulan Agustus 2022. Namun, angka tersebut terus merosot hingga mencapai 53% pada bulan Oktober 2022. Itu artinya, hanya dalam kurun waktu 2 bulan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri turun sebesar 17%. Akibatnya, pada saat itu Polri menjadi lembaga penegak hukum yang paling rendah tingkat kepercayaannya di mata publik. Posisinya bahkan ada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 54%.³⁷

Gambar 8. Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri (2022)



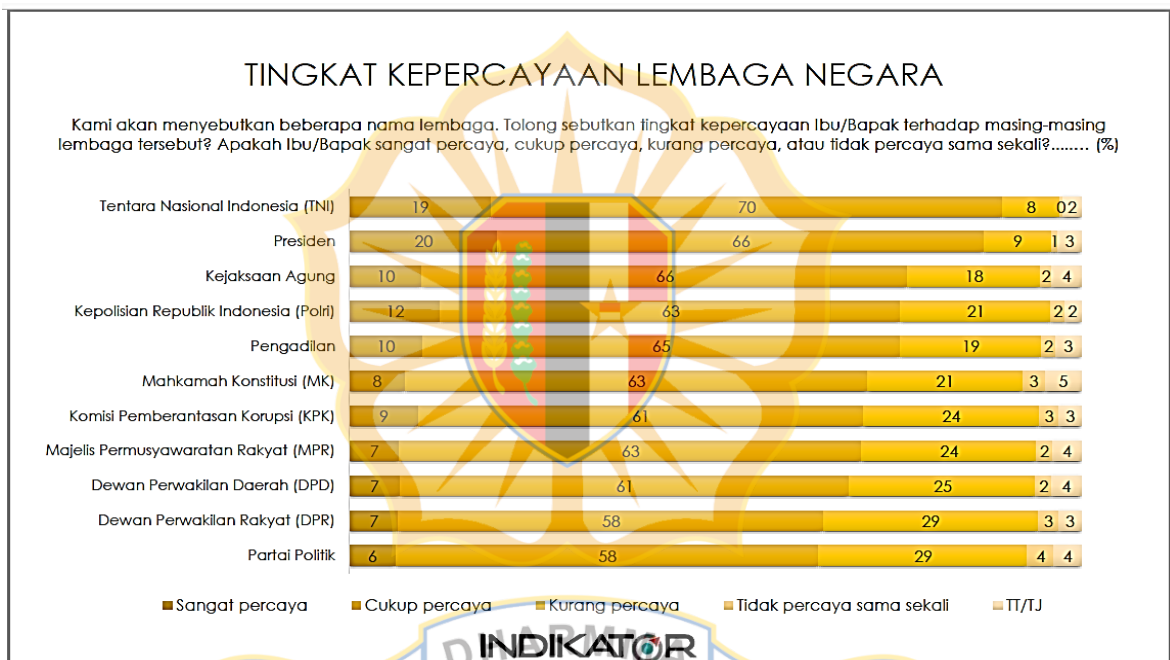
Sumber: Lembaga Survei Indonesia (LSI)

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

³⁷ Rizaty, Monavia Ayu. *Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%*. URL. <https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>, diakses pada 29 April 2024 pada pukul 22.50 WIB.

Namun, setelah FS ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum, sentimen positif masyarakat kepada Polri naik drastis ke angka 88,1%.³⁸ Hal inipun diikuti dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Berdasarkan lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan politik periode 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024, Polri berada di posisi keempat dalam tingkat kepercayaan masyarakat dengan nilai sangat percaya dari masyarakat sebesar 12%, cukup percaya sebesar 63%, kurang percaya sebesar 21% dan tidak percaya sama sekali sebesar 2%.³⁹

Gambar 9. Tingkat Kepercayaan Lembaga Negara



Sumber: Survei Indikator Politik Indonesia

Sementara itu, sebesar 20,1% masyarakat menilai jika kejujuran, kebijaksanaan, keadilan merupakan aspek yang perlu diperbaiki oleh Polri ke depan, diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu sebesar 13,9%, dan bebas KKN, suap, pungutan liar (pungli) sebesar 13,7%.⁴⁰ Polri perlu mengutamakan

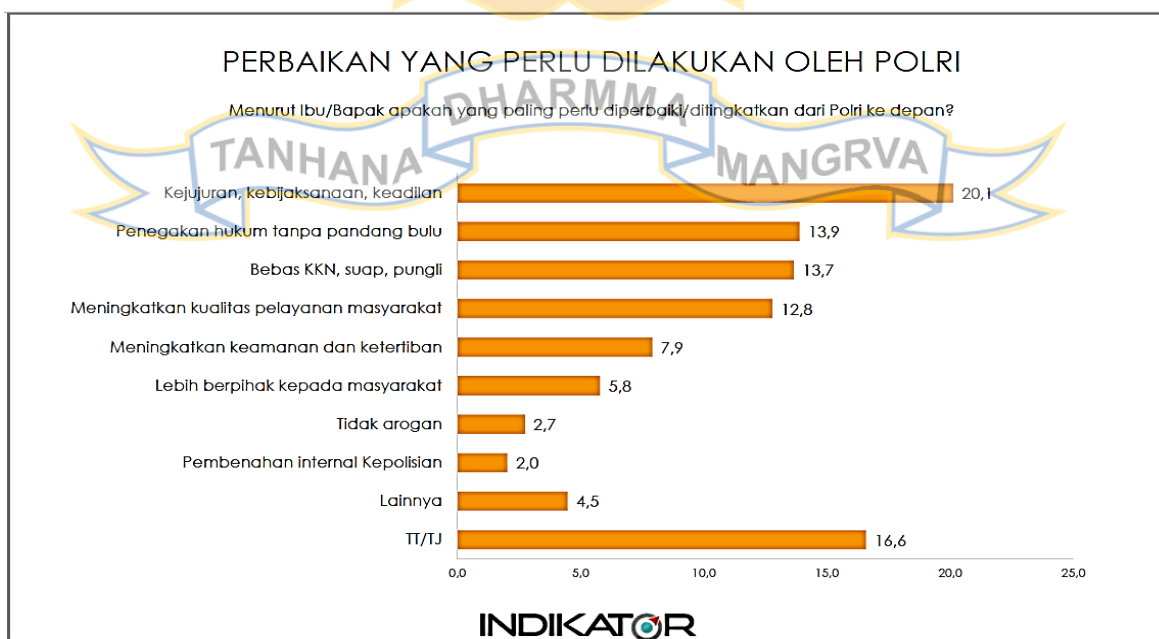
³⁸ Kompas.com. *Citra Polri Setelah Rekayasa Sambo Terbongkar*. URL. <https://jeo.kompas.com/citra-polri-setelah-rekayasa-ferdy-sambo-terbongkar>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 10.50 WIB.

³⁹ Indikator. "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik". Temuan Survei Nasional: 30 Desember 2023 – 6 Januari 2024. h. 29.

⁴⁰ *Ibid.* Survei Nasional: 23 November – 1 Desember 2023. h. 46.

pembangunan budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan integritas. Ini dapat dicapai melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan yang memperkuat kesadaran etika dan tanggung jawab anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Polri harus memperkuat transparansi dalam semua aspek operasionalnya. Hal ini mencakup penyediaan informasi publik yang jelas tentang proses penegakan hukum dan tata kelola internal Polri. Selain itu, mekanisme pengawasan independen juga perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik. Polri perlu terus meningkatkan kualitas penyelidikan dan penegakan hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu, dengan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan merata bagi semua warga negara. Polri harus mengambil langkah-langkah tegas dalam memerangi korupsi, suap, dan pungli di dalam organisasinya. Melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap anggota Polri yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa depan. Di samping itu, Polri harus terus berinvestasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi anggotanya. Melalui perbaikan beberapa hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri dan mengembalikan citra positif masyarakat terhadap Polri.

Gambar 10. Perbaikan yang Perlu Dilakukan oleh Polri



Sumber: Survei Indikator Politik Indonesia

Dalam hal pengembangan SDM, Polri telah bekerja sama dengan *Korea International Cooperation Agency (KOICA)*, *Nasional Forensic Service Republic Of South Korea (NFS)*, *Indonesia Nasional Police (INP)*, dan *Engineering an Informatic ITB (STEI-ITB)* untuk melaksanakan program pengembangan kapasitas bagi personel Polri di bidang siber yang bertempat di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Semarang. Pelatihan ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang digital forensik siber. Ini adalah langkah konkret Polri dalam memperkuat kemampuan dan menghadapi tantangan di era digital serta memberikan kesempatan kepada SDM Polri untuk lebih maju dan berkembang guna mewujudkan optimalisasi informasi di era digital.⁴¹ Selain itu, upaya lainnya dengan mengawal terlaksananya konsep Polri Presisi, Polri meluncurkan Program *Beyond Trust Presisi 2024* yang bertujuan untuk mentransformasikan tingkat kepercayaan publik yang telah dibangun menjadi rasa percaya dan loyalitas dengan berupaya melampaui harapan masyarakat terhadap Polri.⁴²

Dalam konteks pengelolaan informasi di era digital, terdapat penambahan struktur organisasi di dalam tubuh Polri, yaitu Biro Multimedia pada Direktorat Hubungan Masyarakat (Dithumas), Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, dan Direktorat Keamanan Khusus (Ditkamsus) pada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.⁴³ Dengan perubahan tersebut, maka anggaran Humas jadi lebih meningkat karena di tingkat Mabes terdapat Biro Multimedia, dan di tingkat Polda, Bidang Humas menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri yang memiliki anggaran sendiri di mana sebelumnya tergabung dengan anggaran Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri. Selain itu, Humas pada tingkat Polres juga berdiri sendiri sebagai Kepala Seksi Humas, yang sebelumnya berada di bawah kendali Kepala Bagian Operasi Polres (Sub Bagian Operasi). Perubahan struktur organisasi ini dapat menunjang kinerja Polri

⁴¹ Humas Polda Lampung. *Meningkatkan Kemampuan SDM Polri, Kadivhubinter Buka Pelatihan Digital Forensik Siber*. URL. <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/meningkatkan-kemampuan-sdm-polri-kadivhubinter-buka-pelatihan-digital-forensik-siber>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 11.20 WIB.

⁴² Humas Polri. *Polri Luncurkan Program Beyond Trust Presisi 2024*. URL. <https://humas.polri.go.id/2024/01/24/polri-luncurkan-program-beyond-trust-presisi-2024/>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 11.30 WIB.

⁴³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 23.

khususnya Bidang Humas Polri, sehingga dalam melakukan pengelolaan informasi di era digital dapat lebih akurat, relevan dan terpercaya, serta lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, informasi yang beredar di masyarakat tidak mengganggu jalannya proses pembangunan nasional.

10. Kerangka Teoretis

a. Diagram Tulang Ikan

Diagram tulang ikan (*fishbone diagram*), atau yang juga disebut sebagai diagram sebab-akibat, adalah visualisasi grafis yang mirip dengan struktur tulang ikan. Diagram ini dipergunakan untuk mengilustrasikan keterkaitan sebab-akibat dari suatu masalah atau situasi (John Bank, 1992).⁴⁴ Fungsi dasar *fishbone diagram* yaitu untuk mengenali serta mengorganisasi kemungkinan penyebab-penyebab yang muncul dari sebuah permasalahan dan kemudian memisahkan akar penyebabnya.⁴⁵ *Fishbone diagram* digunakan saat suatu perusahaan atau tim mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi dari suatu masalah dan menyelidiki atau mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mengarah pada perbaikan atau peningkatan.⁴⁶ Diagram tulang ikan adalah pendekatan terstruktur yang memungkinkan analisis lebih rinci untuk mengidentifikasi akar penyebab, ketidakkonsistenan, dan kesenjangan dalam suatu masalah.⁴⁷ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fishbone diagram* merupakan suatu sistem atau alat untuk mendapatkan suatu indikator problem sebab dan akibat pada perseorangan atau organisasi agar dapat ditangani atau ditindaklanjuti secara tepat dan akurat.

⁴⁴ <https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/tmi/2017/jiunkpe-is-s1-2017-25413060-40988-efektivitas-chapter2.pdf>, diakses pada 3 Februari 2024 pada pukul 13.25 WIB.

⁴⁵ Binus University. *Fishbone Diagram*. URL. <https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>, diakses pada 3 Februari 2024 pada pukul 14.40 WIB.

⁴⁶ Sallis, Edwar. (2015). *Total Quality Management In Edication*. Yogyakarta: IRCiSoD.

⁴⁷ Hamdiy, F. (2016). "Pendekatan Analisis Fishbone Untuk Mengukur Kinerja Proses Bisnis Informasi E-Koprasi". *Jurnal Teknoinfo*, 10(1). h. 1-13.

b. Teori Manajemen

Richard L. Daft (2003) merumuskan 5 (lima) faktor utama yang menjadi susunan utama suatu organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi secara maksimal yang sering disebut 5M, yaitu: a) *Man* (manusia), merupakan salah satu faktor produksi utama dan paling mendasar dalam suatu perusahaan atau organisasi; b) *Machines* (mesin), adalah fasilitas atau alat pendukung kegiatan perusahaan/organisasi baik operasional ataupun non-operasional; c) *Money* (uang), mengacu pada dana atau anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan/organisasi; d) *Method* (metode), merupakan suatu prosedur sebagai panduan utama dalam melaksanakan kegiatan; dan e) *Material* (bahan baku), yaitu bahan baku utama yang diolah hingga menjadi sebuah produk akhir dalam sebuah proses produksi.⁴⁸ Dalam era digital, kelima faktor tersebut dapat dihubungkan dengan berbagai isu dan diterapkan di berbagai instansi, termasuk dalam mengelola informasi di berbagai media meliputi isu hoaks, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga konten-konten negatif. Menurut Handoko (2020), manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha oleh anggota dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan.⁴⁹ Ilmu manajemen ada karena terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga dengan keterbatasan tersebut segala sesuatu harus dapat diatur dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai manajemen yang efektif dan efisien.

c. Teori Hubungan Masyarakat

Cutlip, Center, dan Broom berpendapat jika humas merupakan fungsi pengelolaan yang menciptakan dan memelihara hubungan yang baik serta mempunyai manfaat antara organisasi dan masyarakat, sehingga memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan organisasi itu.⁵⁰ Sementara itu, Rhenald Kasali mengatakan bahwa humas adalah pendekatan yang amat

⁴⁸ Daft, Richard L. (2003). *Management*. Singapura: South Western of Thomson Learning.

⁴⁹ Firmansyah, Anang dan Mahardika, Budi. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Budi Utama. h. 2-3.

⁵⁰ Cutlip, S., A. H. Center, et.al. (2009). *Effective Public Relation*. Ed. Ke-9. Jakarta: Kencana.

strategis dengan memanfaatkan konsep-konsep komunikasi. Sedangkan *International Public Relations Associations* (IPRA) memberikan definisi humas sebagai fungsi yang terus-menerus mengelola fungsi-fungsi lembaga dan organisasi swasta maupun publik (umum) guna mendapatkan pengertian, simpati, serta dukungan dari mereka yang terhubung atau berkepentingan untuk membentuk opini publik.⁵¹

d. Teori *Hierarchy of Information*

Teori *Hierarchy of Information* adalah konsep yang menyatakan bahwa informasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan tingkatannya dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Hierarki ini membantu dalam memahami bagaimana informasi berkembang dari data mentah menjadi pengetahuan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Tingkatan tersebut yaitu *Data*, *Information*, *Knowledge*, dan *Wisdom* (DIKW). Konsep DIKW adalah sebuah model atau hierarki yang digunakan untuk memahami bagaimana informasi diproses dan diintegrasikan dalam konteks pengambilan keputusan. Konsep ini menjelaskan evolusi dari data mentah menjadi kebijaksanaan yang dihasilkan oleh manusia.⁵²

Dalam konsep DIKW, fakta yang diperoleh diubah menjadi sebuah *data* (data). Representasi fakta ini ditangkap dan disimpan ke dalam berbagai format data antara lain teks, angka, suara, gambar, video, dan simbol. Hasil penangkapan data ini diinterpretasikan ke dalam konteks yang berbeda dan selanjutnya diubah menjadi sebuah *information* (informasi). Ketika informasi bersentuhan dengan pengalaman dan opini pengguna, informasi tersebut menjadi *knowledge* (pengetahuan) yang akan memengaruhi sebuah keputusan.⁵³ Tercapainya suatu *knowledge* dan *wisdom* (kebijaksanaan) tergantung pada data dan informasi. Pengetahuan merupakan sekumpulan data/informasi, sementara kebijaksanaan membantu orang dalam mengambil

⁵¹ Sendari, Anugerah Ayu. *Public Relation Adalah Humas, Kenali Fungsi Dan Kegiatannya*. URL. <https://www.liputan6.com/hot/read/4732342/public-relations-adalah-humas-kenali-fungsi-dan-kegiatannya>, diakses pada 3 Februari 2024 pukul 15.50 WIB.

⁵² Grataridarga, Niko. (2019). "Konsep Data, Information, Knowledge, Wisdom (DIKW) Hierarchy pada Manajemen Kearsipan". *JIPi* (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 4 No. 1.

⁵³ Zins, Chaim. (2007). "Conceptual Approaches for Defining Data, Information, and Knowledge". *Journal of the American Society for Information Science and Technology*.

keputusan yang baik.⁵⁴ Hierarki DIKW menyoroiti peran transformasi data menjadi kebijaksanaan yang dihasilkan oleh manusia melalui proses pengolahan, interpretasi, serta penerapan informasi dan pengetahuan.

Dalam Teori *Hierarchy of Information*, setiap tingkatan membangun pada yang sebelumnya, dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kebijaksanaan dalam penggunaan informasi untuk tujuan tertentu, seperti pengambilan keputusan atau tindakan yang efektif. Hierarki ini membantu dalam memahami peran dan nilai dari setiap tingkatan informasi dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Cina di bidang teknologi telah memicu persaingan geopolitik yang intens, dengan dampak signifikan terhadap keamanan global, termasuk bagi Indonesia. AS dan Cina bersaing untuk menguasai teknologi-teknologi kunci seperti semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi 5G, yang semuanya memiliki implikasi besar terhadap kekuatan ekonomi dan militer di masa depan.⁵⁵ AS berusaha mempertahankan dominasinya dengan membatasi akses Cina ke teknologi canggih melalui berbagai kebijakan, termasuk sanksi dan pembatasan ekspor. Sementara itu, Cina berusaha mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing dengan mempercepat program inovasi dalam negeri, termasuk melalui inisiatif seperti *Made in China 2025*.⁵⁶ Persaingan ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga memaksa negara-negara lain, termasuk di

⁵⁴ Baskarada, Sasa dan Koronios, Andy. (2013). "Data, Information, Knowledge, Wisdom (DIKW): A Semiotic Theoretical and Empirical Exploration of the Hierarchy and its Quality Dimension". *Australasian Journal of Information Systems*. Volume 18 Nomor 1.

⁵⁵ Melo, Enrique Duarte. *Membongkar Perang Dagang Teknologi AS-Tiongkok*. URL. https://www-bcg-com.translate.goog/publications/2019/us-china-tech-trade-war? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=tc, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 21.30 WIB.

⁵⁶ Institute for Security & Development Policy. *Buatan Tiongkok Tahun 2025*. URL. https://www-isdp-eu.translate.goog/publication/made-china-2025/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=tc, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 21.48 WIB.

kawasan Asia-Pasifik, untuk menavigasi hubungan mereka dengan kedua kekuatan besar ini.

Di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, persaingan AS-Cina ini berdampak pada dinamika keamanan dan ekonomi. Indonesia berada dalam posisi yang sulit karena memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Cina, terutama dalam hal investasi dan perdagangan, namun juga menjalin kemitraan strategis dengan AS, terutama dalam konteks keamanan dan teknologi. Dalam konteks mineral kritis yang sangat penting untuk teknologi hijau seperti baterai kendaraan listrik, Indonesia memiliki posisi strategis. Persaingan antara AS dan Cina mendorong Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasokan global, khususnya dalam hal pengolahan nikel. Namun, kebijakan AS seperti *Inflation Reduction Act* (IRA) membuat Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menjalin kesepakatan perdagangan terbatas dengan AS, guna memastikan akses ke pasar yang lebih luas.⁵⁷

Selain itu, ketegangan yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel, memiliki dampak signifikan pada ketahanan nasional dan persatuan bangsa, tidak hanya di kawasan tersebut tetapi juga di negara-negara lain termasuk Indonesia. Ketegangan antara Israel dan negara-negara seperti Iran dan Hezbollah telah memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik yang dapat berujung pada perang skala besar. Ketidakstabilan ini menimbulkan ancaman bagi persatuan nasional di negara-negara yang memiliki komunitas dengan pandangan berbeda mengenai konflik tersebut, termasuk Indonesia. Di beberapa negara, ketegangan ini memicu meningkatnya sentimen anti-semitisme dan Islamofobia, yang dapat memecah-belah masyarakat berdasarkan etnis dan agama.⁵⁸ Selain itu, konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina juga telah memengaruhi geopolitik global, memperdalam polarisasi antara blok-blok kekuatan dunia seperti AS, Rusia, dan Cina. Ini menciptakan

⁵⁷ CNBC Indonesia. AS Rilis Kebijakan 'Industri Hijau', Apa Dampaknya ke RI?. URL. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230907163934-4-470458/as-rilis-kebijakan-industri-hijau-apa-dampaknya-ke-ri>, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 21.54 WIB.

⁵⁸ VOA News. *Tensions Heighten in Middle East*. URL. <https://www.voanews.com/a/tensions-heighten-in-middle-east-7729425.html>, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 22.14 WIB.

dinamika baru yang bisa memengaruhi stabilitas global, termasuk hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara besar tersebut.⁵⁹ Dalam konteks ketahanan nasional, dampak dari konflik ini dapat berupa peningkatan radikalisme dan ekstremisme di dalam negeri, yang berpotensi menggoyahkan persatuan bangsa.

Pada April 2024, *We Are Social* dan *Hootsuite* melaporkan pengguna internet telah meningkat menjadi 5,44 miliar, dengan 178 juta pengguna baru selama setahun terakhir sehingga tingkat penetrasi internet global menjadi 67,1%.⁶⁰ India menyumbang lebih dari sepertiga peningkatan pengguna internet global selama 12 bulan terakhir, sementara Tiongkok menambah 27 juta pengguna internet baru selama setahun terakhir, Pakistan 24 juta, dan Indonesia 16 juta lainnya.⁶¹ Hal ini menunjukkan betapa banyaknya masyarakat dunia sangat membutuhkan informasi melalui media internet, berkembangnya informasi digital memunculkan evolusi di kalangan anak muda atau Gen Z yaitu sosial media seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X, Telegram, dan lainnya yang dimanfaatkan untuk mencari sebuah informasi. Namun, tidak lepas dari betapa besarnya manfaat dari sosial media sebagai media pencari informasi atau berita, sisi lain media sosial juga memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Sebab, jika masyarakat tidak dapat mengontrol dalam menikmati media sosial dengan banyaknya informasi yang beredar yang belum jelas kebenarannya, menjadikan masyarakat akan mudah terhasut oleh berita yang memprovokasi, yang akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada akhirnya akan mengganggu pembangunan nasional.

b. Regional

Seiring perjalanan waktu, perkembangan teknologi informasi di era digital dari waktu ke waktu juga berdampak positif terhadap perkembangan

⁵⁹ Cordesman, Anthony H. *Stability in the Middle East: The Range of Short and Long-Term Causes*. URL. <https://www.csis.org/analysis/stability-middle-east-range-short-and-long-term-causes>, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 22.26 WIB.

⁶⁰ Kemp, Simon. *Digital 2024 April Global Statshot Report*. URL. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-april-global-statshot>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 13.00 WIB.

⁶¹ Kemp, Simon. *Laporan Statistik Global Digital April 2024*. URL. <https://datareportal.com.translate.goog/reports/digital-2024-april-global-statshot? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 13.20 WIB.

sektor lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi di era digital memungkinkan kerja sama dan integrasi sektor lain yang lebih mudah dan lebih cepat di dalam dan antarnegara. Bagi ASEAN, sejak didirikan pada tahun 1967, teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam mendorong integrasi di dalam dan antarnegara anggotanya. Selain itu, mayoritas kerja sama dan integrasi dalam ASEAN saat ini didasarkan pada teknologi informasi digital, yang menghasilkan kesepakatan yang dapat dicapai dengan mudah dan cepat. Namun demikian, hambatan integrasi ASEAN dan kesenjangan dalam pengembangan teknologi informasi digital di dalam dan di antara negara anggota ASEAN tetap ada.

ASEAN sendiri secara umum telah membentuk kerangka hukum di bidang pengembangan teknologi digital untuk negara-negara anggotanya dalam rangka mendorong integrasi kebijakan nasional semua negara anggotanya untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah di bidang teknologi informasi. Pengembangan teknologi informasi memiliki tujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi dan komunikasi secara internal serta meningkatkan daya saing global ASEAN secara eksternal. Tetapi pencapaian realisasi tersebut belum optimal, terbukti dengan masih lebarnya kesenjangan teknologi informasi antarnegara anggota ASEAN. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan teknologi digital di seluruh negara anggota ASEAN untuk menjaga integrasi ASEAN sekaligus membangun kekuatan regional (kawasan) dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah nasional dan regional ASEAN telah melakukan yang terbaik untuk mengutamakan ide ini melalui program sosialisasi dan promosi. Namun, aktor non-negara sangat berperan dalam membangun infrastruktur pengembangan teknologi informasi di era digital dan mendukung kebijakan pemerintah. Tindakan ini menjadi lebih mudah saat media, baik media massa maupun media sosial memainkan peran kunci dalam mengubah cara berpikir dan berperilaku masyarakat, terutama melalui informasi terkait pengembangan teknologi digital.⁶²

⁶² Hidayatulloh, Muhammad Ammar. *Mempersempit Kesenjangan Pengembangan TIK Untuk Mendorong Integrasi ASEAN*. URL. <https://pssat.uqm.ac.id/id/mempersempit-kesenjangan-pengembangan-tik-untuk-mendorong-integrasi-asean/>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 13.40 WIB.

c. Nasional

1) Geografi

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dari Sabang hingga Merauke, menimbulkan polemik dalam penyebaran informasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terbelah belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti pada daerah pedalaman. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan terdapat sekitar 23% penduduk Indonesia yang masih belum memiliki akses internet. Survei APJII memperlihatkan kontribusi pengguna internet paling tinggi berasal dari Pulau Jawa sebesar 43,92%, sedangkan kontribusi paling kecil berada di Maluku yang hanya sebesar 0,83%.⁶³ Kendala di daerah pedalaman menjadi satu hal yang perlu diperhatikan, sebab akses jalan, material dan SDM yang sangat minim dan terbatas menjadikan penyebaran informasi kebijakan pemerintah yang disampaikan tidak terjangkau dan sulit diakses. Letak geografis wilayah Indonesia menyebabkan fasilitas teknologi dan informasi tidak merata, lebih parahnya di daerah pedalaman masih ada yang belum tersentuh listrik sehingga informasi terkait kebijakan atau aturan pemerintah tidak tersampaikan kepada masyarakat.

2) Demografi

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah pengguna internet sebesar 185,3 juta pengguna internet. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang memiliki akses internet telah memberikan peluang besar dalam menyebarkan informasi secara efektif dan efisien. Dengan lebih dari setengah populasi yang aktif secara *online*, pengelolaan informasi dapat dimaksimalkan melalui platform digital untuk mencapai lebih banyak orang. Demografi pengguna internet di Indonesia menunjukkan keberagaman, termasuk di antaranya adalah pemuda, mahasiswa, profesional, dan pelaku usaha. Memahami

⁶³ Madrim, Sasmito. *APJII: 23% Warga Indonesia Belum Punya Akses ke Internet*. URL. <https://www.voaindonesia.com/a/apjii-23-warga-indonesia-belum-punya-akses-ke-internet/6610370.html>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 14.10 WIB.

karakteristik demografi ini penting dalam merancang strategi pengelolaan informasi yang tepat sasaran dan relevan bagi setiap kelompok. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat penetrasi media sosial yang tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi pembangunan nasional secara luas dan cepat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengedukasi mereka tentang program pembangunan, dan mengumpulkan umpan balik.

Meskipun penetrasi internet telah meningkat, masih ada tantangan dalam hal literasi digital di beberapa segmen masyarakat. Pendidikan dan pelatihan mengenai literasi digital menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi dengan baik. Dengan peningkatan literasi digital, masyarakat akan lebih mampu mengelola dan memanfaatkan informasi secara produktif, sekaligus terbangunnya kekuatan menghadapi bonus demografi. Dengan memperhatikan perkembangan demografi Indonesia dan mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital, pembangunan nasional dapat diakselerasi secara signifikan. Dengan demikian, pemerintah, organisasi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memanfaatkan potensi teknologi informasi secara maksimal demi kesejahteraan bersama.

3) Ideologi

Dengan berdasarkan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini menjadi negara yang kuat serta dipandang oleh negara-negara lain. Pandangan masyarakat terhadap berbagai macam informasi yang diterima dan disampaikan menjadikan keberagaman opini serta keberagaman berita atau informasi menimbulkan pertanyaan seberapa benar dan akuratnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlunya peran pemerintah khususnya Humas Polri dalam menindak, mengantisipasi dan mengklarifikasi atas berita atau informasi yang tersebar di masyarakat. Persepsi atau pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang hangat di

tengah masyarakat menjadikan perselisihan opini hingga mengakibatkan bentrok atau perkelahian karena egois dengan pendapatnya masing-masing. Dengan dasar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, membuat masyarakat harus lebih mengerti untuk tidak egois terhadap pendapatnya masing-masing, sebab keberagaman pandangan itulah yang menjadikan NKRI berkembang dan maju seperti saat ini.

4) Politik

Pasca diadakannya Pemilu 2024, banyak informasi atau berita yang mencuat ke berbagai media massa serta media sosial yang menjadikan perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan laporan pemetaan hoaks yang diterbitkan Mafindo, ada 2.330 hoaks sepanjang tahun 2023 dengan hoaks politik sebanyak 1.292. Dari angka tersebut, 645 di antaranya merupakan hoaks terkait Pemilu 2024. Jumlah hoaks politik tersebut dua kali lipat lebih banyak dibanding dengan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 sebanyak 644.⁶⁴ Dalam hal ini, masyarakat harus pintar dalam memilah berita yang diterima sehingga tidak terhasut dan menjadi korban dari oknum yang memanfaatkan kondisi pasca Pemilu 2024. Sikap kritis terhadap informasi atau berita yang diterima menjadi modal dasar untuk membentengi diri kita agar terhindar dari berita hoaks.

5) Ekonomi

Pasca pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang berdampak kepada seluruh aspek masyarakat dan pemerintah, setiap negara kini berupaya membenahi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 agar sistem berangsur pulih. Kini perekonomian nasional sudah mulai membaik khususnya di sektor pariwisata. Hal ini didukung oleh Deputy Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah, yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara

⁶⁴ Salam, Hidayat. *Hoaks Pemilu Diprediksi Meningkat Sesuai Pencoblosan*. URL. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/13/hoaks-pemilu-diprediksi-meningkat-usai-pencoblosan>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 15.30 WIB.

(wisman) di Januari 2024 merupakan yang tertinggi selama 4 tahun terakhir mencapai 927,75 ribu kunjungan.⁶⁵

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, permintaan akan layanan digital seperti aplikasi perjalanan, pemesanan hotel *online*, aplikasi navigasi, dan platform pemesanan transportasi juga akan meningkat. Di samping itu, wisatawan sering menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman perjalanan mereka. Meningkatnya jumlah wisatawan dapat menghasilkan konten yang positif tentang destinasi wisata Indonesia di berbagai platform media sosial yang akan meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata di mata dunia. Untuk menarik lebih banyak wisatawan, pemerintah dan pelaku industri pariwisata dapat memanfaatkan teknologi informasi dan digital dalam promosi pariwisata. Melalui penggunaan internet dan media sosial, wisatawan dapat memperoleh informasi tentang budaya, tradisi, dan kuliner lokal di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia dan mendorong wisatawan untuk berpartisipasi dalam pengalaman wisata yang lebih menarik.

6) Sosial Budaya

Perkembangan sosial dan budaya Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan optimalisasi pengelolaan informasi di era digital. Era digital membawa perubahan fundamental dalam cara masyarakat Indonesia berinteraksi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Era digital telah membuka akses yang lebih luas terhadap informasi bagi masyarakat Indonesia. Melalui internet, media sosial, dan platform digital lainnya, individu dapat dengan mudah mengakses beragam jenis informasi dari mana saja dan kapan saja. Hal ini telah meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial, budaya, dan pembangunan nasional. Dengan adanya platform digital, masyarakat Indonesia memiliki

⁶⁵ Prayudhia, Maria Cicilia Galuh. *BPS: Kunjungan Wisman Januari 2024 Tertinggi Dalam 4 Tahun*. <https://www.antaraneews.com/berita/3990258/bps-kunjungan-wisman-januari-2024-tertinggi-dalam-4-tahun>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 20.30 WIB.

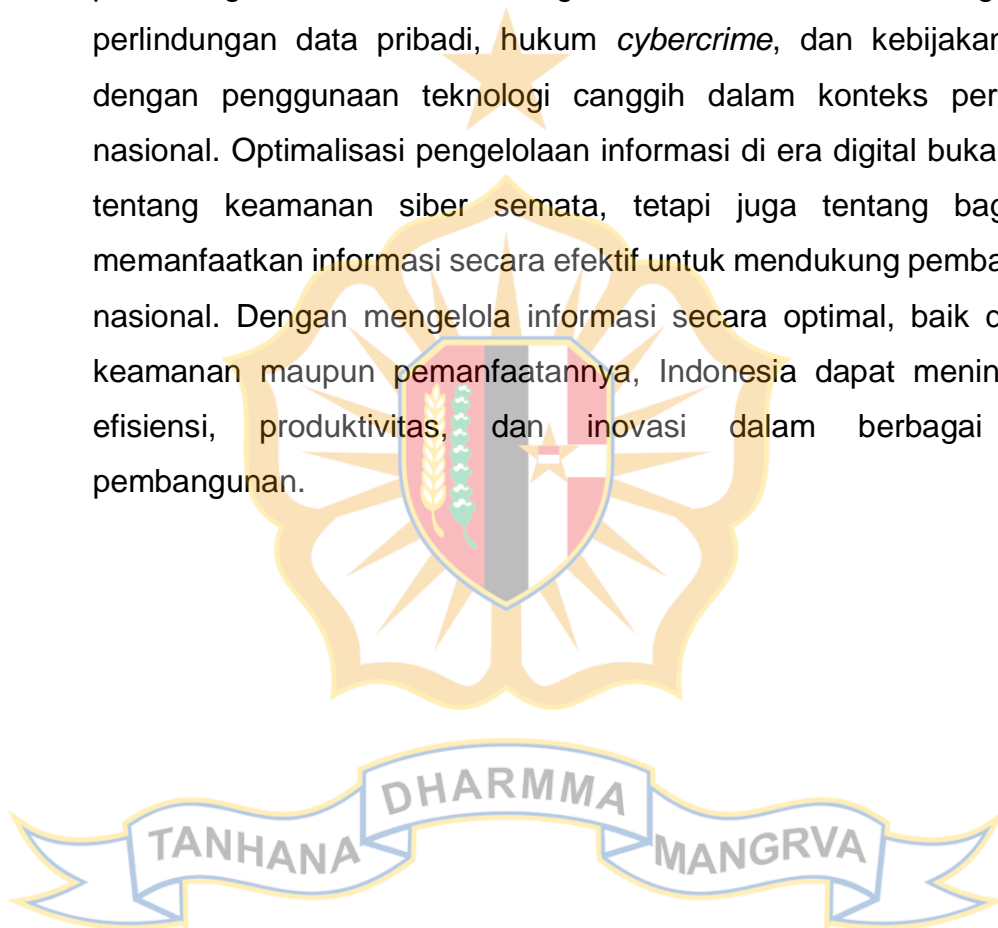
kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Mereka dapat berbagi ide, menyuarakan pendapat, dan berkolaborasi dalam berbagai inisiatif pembangunan. Contohnya, melalui media sosial, masyarakat dapat mengorganisir kampanye sosial, menggalang dana untuk proyek kemanusiaan, atau memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan pembangunan.

Optimalisasi pengelolaan informasi di era digital juga telah memungkinkan terjadinya diversifikasi budaya dan identitas di Indonesia. Melalui internet dan media digital, berbagai budaya lokal dan tradisi daerah dapat dipromosikan secara lebih luas. Hal ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai dan memahami keanekaragaman budaya yang ada di negeri ini, sehingga memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan. Dengan demikian, perkembangan sosial dan budaya Indonesia dalam menghadapi optimalisasi pengelolaan informasi di era digital memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Melalui pemanfaatan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab, masyarakat Indonesia dapat mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

7) Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan keamanan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital ini. Pentingnya optimalisasi pengelolaan informasi dalam konteks ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan nasional, tetapi juga membuka pintu bagi ancaman siber. Untuk menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia telah meningkatkan fokusnya pada keamanan siber melalui pembentukan lembaga dan kebijakan khusus, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemerintah perlu terus mengembangkan infrastruktur dan kapasitas siber melalui investasi dalam teknologi dan SDM yang berkaitan dengan keamanan siber. Peningkatan infrastruktur ini penting untuk melindungi sistem informasi pemerintah, lembaga pertahanan, dan infrastruktur kritis lainnya dari serangan siber.

Selain upaya pemerintah, kesadaran masyarakat tentang keamanan siber juga menjadi kunci dalam menghadapi ancaman ini. Program-program edukasi dan kampanye kesadaran siber telah diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko keamanan digital dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Pemerintah juga harus terus mengembangkan regulasi dan kebijakan yang relevan untuk mengatur penggunaan dan perlindungan informasi di era digital. Hal ini termasuk undang-undang perlindungan data pribadi, hukum *cybercrime*, dan kebijakan terkait dengan penggunaan teknologi canggih dalam konteks pertahanan nasional. Optimalisasi pengelolaan informasi di era digital bukan hanya tentang keamanan siber semata, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan informasi secara efektif untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan mengelola informasi secara optimal, baik dari segi keamanan maupun pemanfaatannya, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai sektor pembangunan.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, pengelolaan informasi telah menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya menyukseskan pembangunan nasional. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara informasi dikumpulkan, disimpan, diproses, dan didistribusikan. Transformasi ini membawa peluang besar bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai aspek pembangunan. Pengelolaan informasi yang optimal di era digital melibatkan pemanfaatan teknologi canggih seperti *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT). Dengan mengintegrasikan teknologi-teknologi ini, informasi diolah menjadi wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Hal ini sangat krusial dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi.

Selain itu, pengelolaan informasi yang efektif juga memerlukan kerangka kerja kebijakan yang kuat serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan yang mendukung keamanan data, privasi, serta aksesibilitas informasi bagi semua lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan inklusif. Hal ini senada dengan pernyataan Presiden Jokowi pada acara peluncuran *Govtech - INA Digital*, yang meminta agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru dengan alasan telah ada 27 ribu aplikasi yang tidak saling terintegrasi dan bekerja masing-masing.⁶⁶ Transformasi yang efektif, efisien, dan memiliki interkoneksi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai sektor. Interkoneksi aplikasi merupakan integrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lain dalam hal ini menggunakan sistem yang bernama *API Gateway*, di

⁶⁶ Mawardi, Isal. *Perintah Jokowi Stop Bikin Aplikasi Baru di Pemerintahan*. URL. <https://news.detik.com/berita/d-7360553/perintah-jokowi-stop-bikin-aplikasi-baru-di-pemerintahan/1>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 21.10 WIB.

mana setiap aplikasi yang merupakan sumber data akan mengirimkan API-nya kepada API Gateway, dan selanjutnya aplikasi yang membutuhkan data-data tersebut akan terkoneksi melalui API Gateway untuk dilakukan pertukaran data melalui jalur yang aman seperti jaringan intranet atau VPN. Untuk mencapai transformasi yang efektif, efisien, dan berbasis interkoneksi, organisasi perlu memiliki visi yang jelas, perencanaan yang matang, serta penggunaan teknologi dan sumber daya yang optimal. Selain itu, komunikasi yang transparan dan kolaborasi yang baik antar berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen bekerja bersama secara sinergis dalam mencapai tujuan transformasi, sehingga organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih terintegrasi. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, optimalisasi pengelolaan informasi di era digital memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Transformasi digital yang terencana dan terintegrasi akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, masyarakat yang lebih terinformasi, dan ekonomi yang lebih kompetitif di kancah global. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata dalam hal materi dan spiritual yang berlandaskan pada Pancasila. Dalam konteks pengelolaan informasi, pengertian adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila adalah masyarakat yang mengerti dan memahami arti informasi untuk pengembangan diri, serta masyarakat yang selalu mengedepankan informasi yang positif yang menumbuhkan sikap/ rasa saling percaya.

13. Pengelolaan Informasi di Era Digital Dalam Membangun Kepercayaan Publik Beserta Tantangan yang Dihadapi

Dalam era digital yang semakin maju, pengelolaan informasi telah menjadi aspek krusial dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik. Revolusi digital telah mengubah cara kita mengakses, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi secara drastis. Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemungkinan baru, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam mengelola informasi dengan tepat dan akurat. Salah satu dampak utama dari

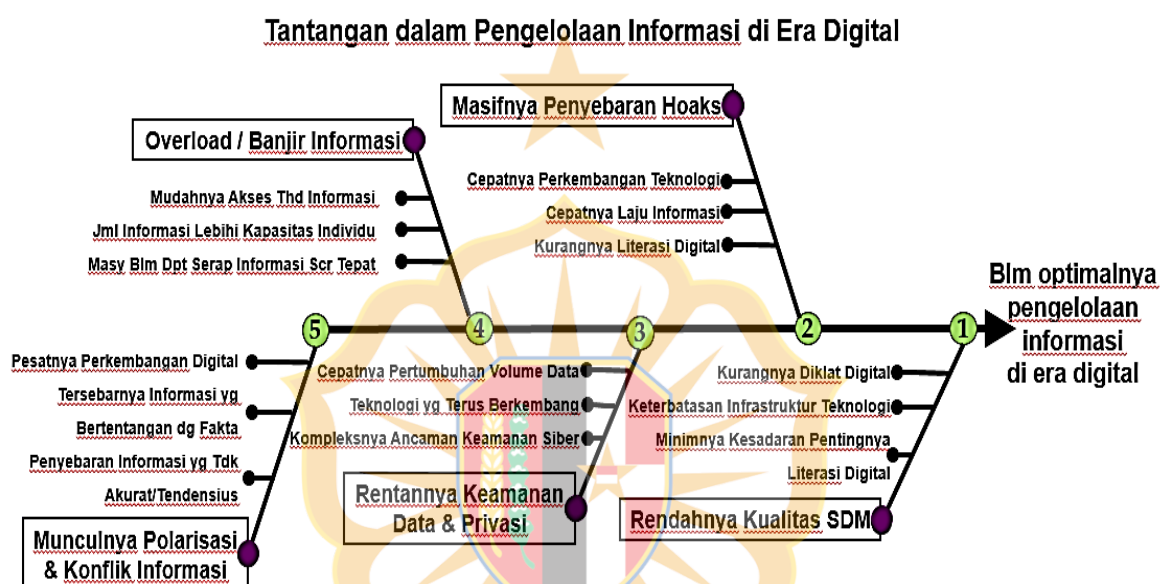
transformasi digital ini adalah percepatan dalam penyebaran informasi. Melalui platform-platform media sosial (medsos) dan situs web berita, informasi disebarakan dengan cepat dan luas, bahkan tanpa verifikasi yang memadai. Hal ini menciptakan lingkungan di mana hoaks, berita palsu, dan informasi yang tidak terverifikasi dengan mudah menyebar, mengancam integritas informasi yang sebenarnya. Pentingnya pengelolaan informasi yang baik di era digital ini terletak pada kemampuan untuk memastikan kebenaran, akurasi, dan kredibilitasnya. Kepercayaan publik terhadap institusi, organisasi, dan individu sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menyediakan informasi yang terpercaya dan transparan. Ketika informasi dipertanyakan atau diragukan, kepercayaan publik mulai terkikis, mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Dalam konteks ini, pengelolaan informasi yang efektif melibatkan berbagai tindakan, termasuk verifikasi sumber, pemantauan dan evaluasi konten, peningkatan literasi digital, dan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga media, dan masyarakat sipil. Diperlukan kerja sama lintas sektor untuk mengembangkan kerangka kerja yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas informasi. Dengan demikian, pengelolaan informasi di era digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau entitas tertentu, tetapi merupakan tantangan kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa informasi yang disebarakan dan dikonsumsi adalah yang benar, akurat, dan terpercaya. Ini adalah prasyarat fundamental untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik yang kuat di masyarakat yang semakin terhubung dan tergantung pada informasi digital.

Di era digital, pengelolaan informasi menjadi semakin kompleks karena tantangan-tantangan tertentu muncul yang dapat memengaruhi kepercayaan publik. Dengan menggunakan diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) yang berfungsi untuk mengenali serta mengorganisasi kemungkinan penyebab-penyebab yang muncul dari sebuah permasalahan dan memisahkan akar penyebabnya, penulis mencoba untuk menganalisis beberapa tantangan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital, serta memberi solusi untuk memperbaiki permasalahan yang ada sehingga pengelolaan informasi di era digital lebih optimal yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan publik.

Fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan konsekuensi dari suatu masalah dan menyelidiki atau mengeksplorasi faktor-faktor yang mengarah pada perbaikan sebuah masalah. Beberapa tantangan yang muncul dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital untuk membangun kepercayaan publik dapat digambarkan melalui diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) di bawah.

Gambar 11. Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*)



Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Rendahnya SDM yang berkualitas dalam mengelola informasi di era digital menjadi permasalahan yang semakin relevan seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi dan internet. Banyak orang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi digital, termasuk cara menggunakan alat-alat digital dengan efektif, mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya, dan memahami risiko keamanan yang terkait dengan berbagi informasi *online*. Dalam era di mana informasi dengan mudah disebarkan melalui berbagai platform *online*, keterampilan untuk memverifikasi kebenaran informasi sangat penting. Namun, banyak orang belum dilatih secara memadai untuk memeriksa keaslian informasi sebelum menyebarkannya.

Internet telah menciptakan lingkungan di mana informasi diproduksi dan beredar dengan cepat. Ini menjadi sulit untuk dikelola oleh individu yang tidak memiliki keterampilan dalam menavigasi dan menyaring informasi yang relevan dari jumlah besar konten yang tersedia. Banyak orang yang tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara *online* atau memahami pentingnya mematuhi prinsip-prinsip etika digital seperti menghormati privasi orang lain atau tidak menyebarkan informasi palsu. Di beberapa wilayah, akses terhadap internet juga mungkin terbatas atau tidak stabil. Kurangnya infrastruktur digital yang memadai menghambat kemampuan seseorang untuk mengakses informasi atau berpartisipasi dalam ekosistem digital dengan efektif. Dampak dari rendahnya SDM yang berkualitas dalam mengelola informasi di era digital sangat bervariasi, mulai dari penyebaran informasi palsu dan disinformasi hingga risiko keamanan data dan kerentanan terhadap serangan siber. Selain itu, rendahnya kualitas SDM juga menghambat kemajuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, di mana penggunaan teknologi digital telah menjadi semakin penting.

Kondisi rendahnya kualitas SDM dalam mengelola informasi di era digital salah satunya dapat dilihat dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2023, nilai rata-rata SPBE nasional adalah 2,79 dari skala 5, naik 0,45 poin dari nilai rata-rata tahun 2022 di angka 2,34. Namun terdapat gap yang besar, bukan hanya pada Pemerintahan Daerah, tetapi juga pada Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat yang seharusnya memiliki infrastruktur digital dan literasi digital lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari indeks SPBE pada Pemerintahan Daerah, di mana indeks tertinggi pada Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 4,17 dan indeks terendah pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 1,53. Sementara itu, di tingkat pusat yang memperoleh nilai tertinggi adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Kemenparekraf) dengan skor 4,67 dan instansi yang memperoleh nilai terendah adalah DPD RI dengan skor 2,24. Sedangkan untuk Mabes Polri berada di posisi tengah dengan nilai SPBE adalah 3,00. Hal ini terjadi karena masih banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah yang belum melakukan integrasi internal. Di samping itu, selain ketersediaan infrastruktur digital, literasi digital dan dukungan pemimpin, regulasi dan anggaran adalah sangat penting dalam transformasi digital.⁶⁷

Rendahnya kualitas SDM dalam mengelola informasi di era digital merupakan tantangan besar bagi pembangunan nasional Indonesia. Kualitas SDM yang tidak memadai dalam bidang digital menghambat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan daya saing negara di tingkat global. Dalam konteks ini, Polri telah mengakui betapa pentingnya menekankan peran SDM Polri sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kinerja institusi. Pada tahun 2023, jumlah anggota Polri mencapai 427.378 orang, terdiri dari 423.585 laki-laki dan 37.193 perempuan. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka, yaitu 5.277 orang atau sekitar 1,2% yang memiliki keterampilan dalam teknologi informasi, dengan 4.382 laki-laki dan 895 perempuan.⁶⁸ Sesuai data tersebut, terlihat jelas bahwa kualitas SDM Polri dalam hal penguasaan teknologi digital masih rendah. Oleh karena itu, untuk menghadapi era digital, Polri harus mempercepat peningkatan keterampilan SDM dalam bidang teknologi informasi. Proses rekrutmen anggota Polri juga memerlukan penambahan seleksi yang lebih ketat dan kompetitif, sehingga SDM Polri lebih efektif dalam menanggapi tantangan yang muncul seiring perkembangan TIK di masa depan.

Dalam usahanya untuk terus meningkatkan standar dan profesionalisme para personelnnya, Polri telah menerapkan serangkaian program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di bidang SDM, yang memiliki beberapa fokus utama, termasuk:⁶⁹ 1) **Proses Rekrutmen dan Seleksi**. Melalui penelitian

⁶⁷ Wathan, Ferry Preska. "Perkembangan Transformasi Digital di Bidang Sistem Pengelolaan Pemerintahan Dalam Rangka Mendukung Clean and Good Governance". Materi Paparan Ceramah BS. Iptek PPRA LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.

⁶⁸ Bag Infopers Robinkar SSDM Polri dalam Riyanto, Trisno. (2023). *Optimalisasi Transformasi Digital pada Sumber Daya Manusia di Lingkungan Polri Guna Mendukung Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.

⁶⁹ Dutametro.com. *Membangun Keunggulan dengan Litbang dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Polri*. URL. <https://dutametro.com/30/04/2024/membangun-keunggulan-dengan->

yang berkelanjutan, Polri terus menyempurnakan proses rekrutmen dan seleksi calon anggota guna memastikan terpilihnya individu-individu berkualitas yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin yang handal di masa depan; serta 2) **Pendidikan dan Pelatihan**. Litbang SDM Polri rutin mengadakan studi untuk menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajaran di lembaga pendidikan kepolisian. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa personel Polri siap menghadapi tantangan baru di lapangan.

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya kualitas SDM termasuk kurangnya pendidikan dan pelatihan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan minimnya kesadaran akan pentingnya literasi digital.⁷⁰

1) **Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Digital**

Kurangnya pendidikan dan pelatihan digital memang menjadi hambatan serius dalam mengelola informasi di era digital. Di zaman di mana teknologi semakin dominan, kemampuan dalam memahami, menganalisis, dan mengelola informasi dengan efektif sangat penting untuk kesuksesan pembangunan nasional. Tanpa pendidikan yang memadai tentang teknologi digital, SDM mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami perangkat lunak, platform, dan alat-alat digital yang membantu mereka mengelola informasi dengan lebih efektif. Di era di mana data menjadi semakin berlimpah, keterampilan dalam menganalisis dan mengekstrak informasi dari data sangat penting. Kurangnya pelatihan dalam hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan untuk memahami dan menggunakan data secara efektif. Di samping itu, kehadiran ancaman keamanan digital semakin meningkat. Tanpa pendidikan yang memadai tentang keamanan digital, SDM menjadi rentan terhadap serangan siber, pencurian identitas, dan penipuan *online*.

litbang-dalam-pengelolaan-sumber-daya-manusia-di-polri/tni-polri/, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 19.15 WIB.

⁷⁰ Limanseto, Haryo. *Kualitas SDM Kelas Menengah dan Transformasi Digital Menjadi Kunci Indonesia Maju 2045*. URL. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3123/kualitas-sdm-kelas-menengah-dan-transformasi-digital-menjadi-kunci-indonesia-maju-2045>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 19.30 WIB.

Medsos memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi. Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana menggunakan medsos dengan bijak, SDM mungkin rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau tidak akurat. Pendidikan dan pelatihan digital mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan informasi. Tanpa itu, SDM mungkin cenderung menggunakan metode tradisional yang kurang efisien di era digital. Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola informasi di era digital, diperlukan investasi yang serius dalam pendidikan dan pelatihan digital. Hal ini meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan SDM dalam keterampilan digital kunci, dan promosi kesadaran akan pentingnya keamanan digital, serta dengan didukung anggaran pendidikan dan pelatihan yang memadai. Dengan demikian, SDM lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam era digital untuk mendukung pembangunan nasional.

2) **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi**

Keterbatasan infrastruktur teknologi memiliki dampak signifikan pada kemampuan SDM untuk mengelola informasi dengan baik di era digital, yang pada gilirannya menghambat pembangunan nasional. Infrastruktur teknologi yang kurang memadai mengakibatkan akses terbatas atau lambat terhadap perangkat dan sambungan internet. Hal ini menghambat kemampuan SDM untuk mengakses informasi dan sumber daya *online* yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Keterbatasan infrastruktur juga memengaruhi ketersediaan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola informasi secara efektif di era digital. Kurangnya aksesibilitas terhadap kursus *online* atau program pelatihan yang berkualitas membatasi kemampuan SDM untuk meningkatkan keterampilan mereka. Keterbatasan infrastruktur teknologi menghambat peluang SDM untuk memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola informasi secara digital. Misalnya, kurangnya akses ke perangkat lunak terkini membuat sulit bagi mereka untuk mempraktikkan

keterampilan yang mereka pelajari. Infrastruktur teknologi yang lemah sering kali rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi. Kurangnya perlindungan ini membuat SDM enggan untuk terlibat dalam pengelolaan informasi digital dengan khawatir akan risiko keamanan dan privasi.

Di beberapa wilayah, infrastruktur teknologi mungkin tidak merata, dengan koneksi internet yang lambat atau tidak ada sama sekali di daerah pedesaan atau terpencil. Hal ini menyulitkan SDM di daerah tersebut untuk mengakses informasi dan sumber daya *online* yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Pembangunan infrastruktur seperti jaringan 5G menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia.⁷¹ Indonesia pun masih kekurangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Kurangnya SDM yang terampil dalam teknologi menghambat kemampuan negara untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital secara optimal.⁷² Pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi tuntutan era digital.⁷³ Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan kurangnya SDM yang terampil dalam teknologi informasi menghambat kemampuan Indonesia untuk bersaing di kancah global. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting untuk melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai serta menyediakan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola informasi di era digital. Ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur teknologi khususnya di sektor anggaran, program pelatihan

⁷¹ *Ibid*

⁷² Wibowo, Anshar Dwi. *Mempersiapkan SDM untuk Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital*. URL. <https://katadata.co.id/berita/nasional/614b2367de581/mempersiapkan-sdm-untuk-optimalisasi-potensi-ekonomi-digital>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 19.50 WIB.

⁷³ Tim Media Servis. *Pengembangan Kualitas SDM Kunci Capai Indonesia Maju 2045*. URL. <https://tirto.id/pengembangan-kualitas-sdm-kunci-capai-indonesia-maju-2045-gQmm>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 20.10 WIB.

dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas internet di seluruh wilayah.

3) **Minimnya Kesadaran akan Pentingnya Literasi Digital**

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti komputer, internet, dan perangkat *mobile* dengan efektif dan kritis. Ini mencakup kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, memanfaatkan, dan menghasilkan konten digital dengan cara yang berdaya guna dan aman. Kondisi literasi digital masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan terbaru pada tahun 2023, nilai total indeks literasi digital Indonesia mencapai 3,65 dari skala 1-5, yang termasuk dalam kategori tinggi. Ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat. Indeks literasi digital ini diukur melalui 4 (empat) pilar utama, yaitu *Digital Skills*, *Digital Safety*, *Digital Ethics*, dan *Digital Culture*.⁷⁴ Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), terus menggalakkan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Program ini menargetkan peningkatan kecakapan digital bagi 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024, dengan fokus pada berbagai segmen termasuk pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat umum.⁷⁵

Walaupun indeks literasi digital meningkat, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital masih rendah. Hal ini salah satunya terlihat dari masih banyaknya hoaks yang beredar di masyarakat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya literasi digital berdampak pada rendahnya kualitas SDM dalam mengelola informasi. Di era di mana informasi mudah diakses melalui internet, kemampuan

⁷⁴ Muhamad, Nabilah. *Indeks Literasi Digital Indonesia Terus Meningkat Sampai 2023*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/preview/2023%0B/12/14/indeks-literasi-digital-indonesia-terus-meningkat-sampai-2023>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 20.20 WIB.

⁷⁵ Agustini, Pratiwi. *Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali MEningkat Tahun 2022*. URL. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 20.30 WIB.

untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak sangatlah penting. Tanpa kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan tidak valid, orang cenderung mempercayai informasi palsu atau hoaks yang merugikan individu dan masyarakat. Seseorang yang kurang literasi digital mungkin tidak menyadari betapa pentingnya menjaga privasi *online* mereka, yang menyebabkan pelanggaran privasi dan bahaya lainnya. Kurangnya pemahaman tentang keamanan *online* meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan siber seperti *phising*, *malware*, atau pencurian identitas. Tanpa literasi digital yang memadai, SDM tidak dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk tujuan pembangunan nasional, seperti mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas pendidikan, atau meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor.

b. Masifnya Penyebaran Hoaks

Dalam era digital yang semakin berkembang, pengelolaan informasi menjadi semakin kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah penyebaran informasi palsu (hoaks) yang semakin masif. Hoaks dengan cepatnya menyebar melalui platform-platform digital, telah menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan terdapat 696 total hoaks dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2024, dengan 440 di antaranya merupakan hoaks tentang politik. Di mana penyebarannya melalui Youtube sebanyak 23%, TikTok 21%, Facebook 21%, Twitter/X 16%, Whatsapp 11%, Instagram 5%, dan platform lainnya sebanyak 2%.⁷⁶

Penyebaran hoaks menimbulkan dampak yang luas dan serius. Tidak hanya membingungkan dan memengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu atau peristiwa, tetapi juga menciptakan konflik, memicu ketidakstabilan politik, dan merusak reputasi individu, organisasi, bahkan negara. Di tengah laju informasi yang begitu cepat, kebenaran sering kali terbenam di antara

⁷⁶ Fajriansyah, Adrian. *Penyebaran Berita Hoaks Meningkat Selama Pemilu 2024*. URL. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/02/penyebaran-berita-hoaks-meningkat-selama-masa-pemilu-2024>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 20.50 WIB.

gelombang berita palsu yang sengaja disebarluaskan. Untuk membangun kepercayaan publik dan melindungi masyarakat dari bahaya hoaks, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga media, platform digital, dan masyarakat sipil. Dalam pengelolaan informasi di era digital, kepercayaan publik menjadi fondasi yang sangat penting. Dengan mengatasi penyebaran hoaks, kita akan membangun lingkungan informasi yang lebih sehat, di mana kebenaran dihargai dan disuarakan, dan di mana masyarakat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Mengatasi penyebaran hoaks adalah salah satu aspek penting dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital untuk membangun kepercayaan publik. Beberapa cara untuk mengatasi penyebaran hoaks di antaranya:

- 1) **Pendidikan Kritis Media di Sekolah.** Pencegahan sejak dini merupakan langkah awal untuk mengatasi penyebaran hoaks, hal ini dilakukan melalui pendidikan kritis media di sekolah. Pendidikan kritis media harus menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah-sekolah untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya menjadi kritis dalam mengonsumsi informasi *online* dan bagaimana cara mengidentifikasi hoaks.
- 2) **Peningkatan Literasi Digital.** Meningkatkan literasi digital masyarakat adalah kunci dalam mengatasi penyebaran hoaks. Edukasi mengenai cara memverifikasi keaslian informasi, mengenali tanda-tanda hoaks, dan pentingnya kritis dalam mengonsumsi informasi akan membantu masyarakat menjadi lebih waspada terhadap hoaks.
- 3) **Promosi Sumber Informasi Terpercaya.** Mendorong masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti media resmi, lembaga pemerintah, dan organisasi berita yang kredibel akan membantu mengurangi penyebaran hoaks. Ini perlu dilakukan melalui kampanye informasi dan pendidikan.

- 4) **Pengembangan Teknologi Deteksi Hoaks.** Saat ini Kemenkominfo telah memiliki mesin pelacak (*crawling*) hoaks atau konten-konten negatif di dunia maya. Dalam sekali bekerja selama 5-10 menit, mesin ini dapat menghasilkan jutaan URL atau tautan yang terdeteksi berisi hoaks atau konten negatif. Kominfo telah bekerja sama dengan sejumlah platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter/X, BBM, Line, Bigo, dan Google.⁷⁷
- 5) **Kerjasama Antara Platform Digital.** Platform-platform digital seperti medsos dan mesin pencari bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menghapus konten hoaks dari platform mereka. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pengembangan alat deteksi bersama, dan kebijakan tindakan terhadap konten hoaks.
- 6) **Penegakan Hukum.** Penegakan hukum terhadap penyebar hoaks menjadi sinyal kuat bahwa penyebaran informasi palsu tidak akan ditoleransi. Ini termasuk penerapan undang-undang terkait hoaks dan penegakan hukuman terhadap individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan hoaks.
- 7) **Transparansi dan Akuntabilitas.** Meningkatkan transparansi dalam sumber dan distribusi informasi akan membantu membangun kepercayaan publik. Organisasi dan individu harus secara jelas mengidentifikasi sumber informasi mereka dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keandalan informasi yang mereka sebar.

Melalui berbagai pendekatan yang holistik dan beragam seperti di atas, diharapkan penyebaran hoaks berhasil ditekan, dan kepercayaan publik terhadap informasi digital lebih meningkat.

⁷⁷ Dina, Steffani. *Kemenkominfo Aktifkan Mesin Pelacak Hoax dan Ujaran Kebencian*. URL. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12287/kemenkominfo-aktifkan-mesin-pelacak-hoax-dan-ujaran-kebencian/0/sorotan_media, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

c. Rentannya Keamanan Data dan Privasi

Pengelolaan informasi di era digital menawarkan berbagai manfaat yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan keamanan data. Tantangan ini muncul dari pertumbuhan volume data yang cepat, teknologi yang terus berkembang, serta ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Untuk membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan informasi di era digital, penting untuk memperhatikan dan mengatasi tantangan privasi dan keamanan data dengan serius. Privasi data menjadi perhatian utama dalam upaya membangun kepercayaan publik karena melibatkan hak individu untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka. Dalam konteks pengelolaan informasi di era digital, risiko privasi meliputi pengumpulan data yang tidak sah, penggunaan data tanpa izin, serta potensi pelanggaran data yang mengakibatkan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang kuat dalam melindungi privasi data, termasuk kebijakan privasi yang transparan, kontrol akses yang ketat, dan enkripsi data yang kuat. Sementara itu, keamanan data menjadi kunci dalam memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Ancaman keamanan data seperti serangan *malware*, peretasan, dan pencurian identitas menyebabkan kerugian finansial, reputasi bisnis yang rusak, serta gangguan layanan yang serius.

Ancaman privasi dan keamanan data dapat terjadi akibat rendahnya kualitas SDM dan massifnya penyebaran informasi palsu (hoaks). Rendahnya kualitas SDM di bidang digital memiliki keterkaitan erat dengan ancaman privasi data. Kualitas SDM yang rendah dalam hal literasi digital dan keterampilan teknis dapat meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan keamanan data. SDM yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pentingnya privasi data sering kali tidak sadar akan risiko-risiko keamanan yang ada. Mereka mungkin tidak memahami pentingnya praktik keamanan dasar seperti penggunaan enkripsi, password yang kuat, dan pengaturan akses yang ketat.⁷⁸ Untuk melindungi data dengan efektif, diperlukan

⁷⁸ DI, Boy. *Privasi Data: Tantangan dan Solusi dalam Konteks Keamanan Jaringan*. URL. <https://www.kmtech.id/post/privasi-data-tantangan-dan-solusi-dalam-konteks-keamanan-jaringan>, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.

keterampilan teknis tertentu, seperti pengelolaan sistem keamanan jaringan dan implementasi teknologi perlindungan data seperti enkripsi. Kualitas SDM yang rendah menghambat implementasi teknologi tersebut, sehingga membuat sistem lebih rentan terhadap serangan siber.⁷⁹ SDM yang tidak terlatih dengan baik cenderung melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan kebocoran data. Kesalahan ini dapat berupa klik tautan phishing, penggunaan perangkat lunak yang tidak aman, atau konfigurasi sistem yang salah.

Di samping itu, hoaks sering kali dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan dalam literasi digital dan privasi data individu. Banyak hoaks dirancang sebagai bagian dari skema *phishing*, di mana penipu menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi mereka, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Ketika data ini jatuh ke tangan yang salah, dapat digunakan untuk pencurian identitas atau penipuan finansial. Hoaks juga sering digunakan sebagai umpan untuk menarik perhatian pengguna dan mengarahkan mereka ke situs web berbahaya yang dapat menginfeksi perangkat dengan *malware*. *Malware* ini kemudian dapat mencuri data pribadi dari perangkat korban tanpa sepengetahuan mereka. Penyebaran hoaks dapat menyebabkan ketakutan atau kebingungan yang membuat orang lebih rentan terhadap manipulasi dan pencurian data. Ketika individu panik atau bingung, mereka lebih cenderung untuk mengklik tautan berbahaya atau memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Beberapa hoaks sengaja dirancang untuk mengumpulkan data dari korban secara massal. Misalnya, hoaks yang meminta orang untuk mengisi survei palsu atau berpartisipasi dalam kontes palsu sering kali memerlukan informasi pribadi yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan jahat.⁸⁰

⁷⁹ Admin Data Academy. *Peningkatan Kualitas SDM Indonesia dan Penguasaan Teknologi*. URL. <https://dataacademy.co.id/peningkatan-kualitas-sdm-indonesia-dan-penguasaan-teknologi/>, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 15.10 WIB.

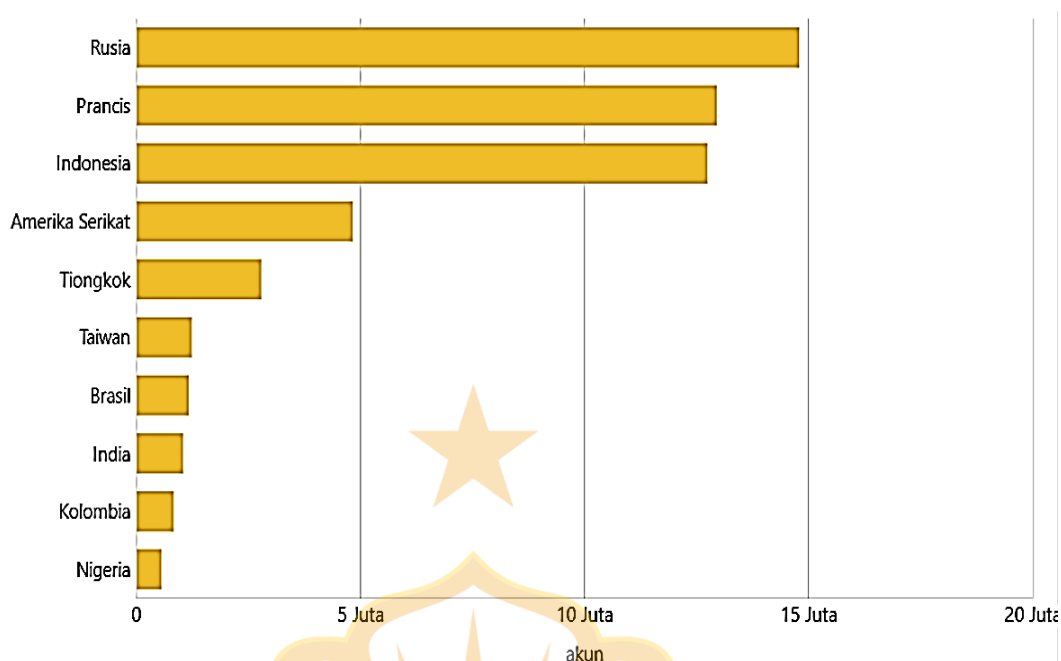
⁸⁰ Chusna, Farichatul. *Privasi Data: Ancaman, Cara Melindungi, dan Implikasinya*. URL. <https://www.linknet.id/article/privasi-data>, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 15.30 WIB.

Sepanjang tahun 2023, Indonesia mengalami sejumlah kasus kebocoran data yang signifikan. Salah satu yang paling menonjol adalah kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan *hacker* fenomenal Bjorka. Data yang disebar oleh Bjorka mencakup informasi pribadi seperti nama, email, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selain itu, kebocoran data di Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menjadi sorotan karena statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Data yang bocor mencapai 1,5 TB, termasuk 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal serta layanan yang digunakan oleh bank. Selanjutnya, hampir 35 juta data paspor dijual secara bebas di situs gelap seharga USD 10.000 atau sekitar Rp 150 juta. Terakhir, terjadi kebocoran data situs KPU oleh seorang anonim bernama Jimbo yang membagikan 500.000 data sampel di *BreachForums*. Data yang bocor meliputi data pribadi seperti NIK, nomor KK, nomor passport untuk pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode TPS.⁸¹ Mantan Gubernur Lemhannas RI Andi Widjanto menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara ketiga dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia.⁸² Dengan memperhatikan tantangan privasi dan keamanan data secara serius, organisasi akan membangun kepercayaan publik yang kuat dalam pengelolaan informasi di era digital. Ini tidak hanya penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk memastikan hubungan yang positif dengan masyarakat. Dengan demikian, menjaga privasi dan keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital.

⁸¹ Yudha, Tangguh. *Deretan Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sepanjang Tahun 2023*. URL. <https://tekno.sindonews.com/read/1279847/207/deretan-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sepanjang-tahun-2023-1702890746?showpage=all>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

⁸² Lemhannas RI. *Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Menjadi Negara Ketiga Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia*. URL. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2012-gubernur-lemhannas-ri-indonesia-menjadi-negara-ketiga-kasus-kebocoran-data-terbanyak-di-dunia>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 21.40 WIB.

Gambar 12. 10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak



Sumber: Databoks

Mengatasi kebocoran data atau informasi pribadi merupakan suatu tantangan serius dalam pengelolaan informasi di era digital. Dalam hal ini, Polri menerapkan keamanan digital (*digital security*) untuk mencegah kebocoran data antara lain:

1) **Pengamanan Jaringan Internet maupun Intranet atau *Virtual Private Network (VPN)***

Polri perlu meningkatkan pengamanan jaringan internet, intranet, serta VPN untuk melindungi aplikasi informasi digital mereka. Pengamanan ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta informasi yang dikelola oleh Polri. Pengamanan jaringan internet meliputi pemasangan *firewall* untuk mengontrol lalu lintas jaringan; memasang dan memperbarui secara rutin antivirus dan anti-*malware* untuk melindungi sistem dari perangkat lunak berbahaya; serta menerapkan enkripsi pada data yang dikirim melalui internet untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data. Pengamanan jaringan intranet meliputi pembagian jaringan intranet menjadi beberapa segmen yang lebih kecil dan terisolasi untuk

membatasi akses dan mengurangi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan; menerapkan kebijakan akses yang ketat, termasuk autentikasi dua faktor dan izin akses berbasis peran; monitoring dan audit secara rutin terhadap aktivitas jaringan; serta menjaga keamanan fisik server dan perangkat jaringan dengan kontrol akses yang ketat dan pemantauan melalui CCTV. Pengamanan VPN meliputi penggunaan protokol VPN yang menawarkan enkripsi dan autentikasi yang kuat; menambah lapisan keamanan ekstra dengan menerapkan autentikasi multifaktor selain kata sandi; melakukan pemantauan aktif terhadap koneksi VPN dan mengelola akses pengguna secara ketat; serta menggunakan enkripsi *end-to-end* untuk melindungi data yang dikirim melalui VPN dari penyadapan.⁸³

2) Pengamanan Infrastruktur meliputi Server dan Virtualisasi

Polri perlu menerapkan pengamanan yang ketat pada infrastruktur yang mencakup server dan lingkungan virtualisasi. Langkah-langkah pengamanan ini akan membantu melindungi data sensitif dan menjaga kelangsungan operasional dari berbagai ancaman siber. Pengamanan server melibatkan berbagai langkah untuk memastikan keandalan dan keamanan data yang disimpan, dengan menonaktifkan layanan dan *port* yang tidak diperlukan untuk mengurangi permukaan serangan; melakukan pembaruan keamanan secara rutin pada sistem operasi dan perangkat lunak server; menerapkan prinsip *least privilege*, memberikan akses hanya kepada pengguna yang membutuhkan dan menggunakan autentikasi multifaktor untuk meningkatkan keamanan akses; serta melakukan *backup* data secara rutin dan memastikan adanya prosedur pemulihan bencana yang dapat diandalkan.⁸⁴ Pengamanan virtualisasi meliputi penggunaan jaringan virtual tersegmentasi untuk membatasi akses antar virtual mesin; mengimplementasikan solusi monitoring dan *logging* untuk memberikan visibilitas terhadap aktivitas di lingkungan virtualisasi; serta mengelola identitas dan akses pengguna dengan ketat

⁸³ Scarfone, Karen. (2008). "Guide to General Server Security". National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-123. (July 2008).

⁸⁴ *Ibid.*

untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses sumber daya virtual dan mengelola virtual mesin.⁸⁵

3) **Pengamanan Aplikasi**

Pengamanan aplikasi menjadi aspek kritis untuk melindungi data dan informasi digital. Penerapan langkah-langkah pengamanan yang tepat dapat membantu mencegah akses tidak sah, melindungi integritas data, dan memastikan ketersediaan aplikasi yang digunakan. Strategi pengamanan aplikasi meliputi pengembangan aplikasi yang aman; pengamanan berkelanjutan untuk melindungi aplikasi yang sedang berjalan; serta pemantauan dan audit berkelanjutan untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan secara cepat.⁸⁶

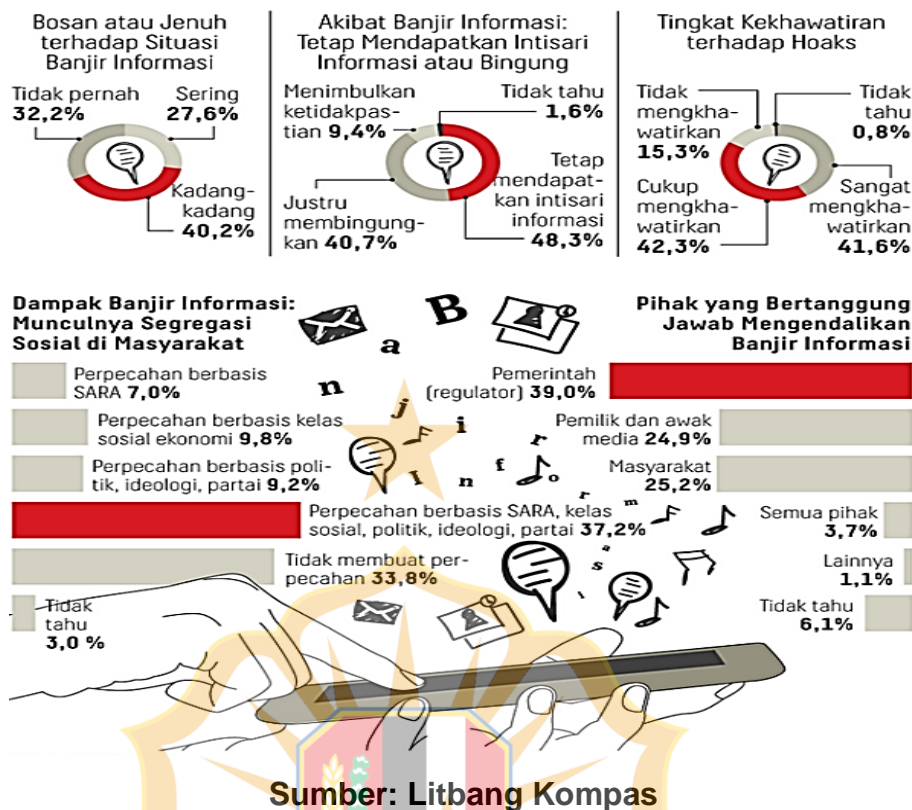
Dengan mengadopsi berbagai langkah di atas dan berkomitmen untuk memprioritaskan keamanan data, Polri membangun sistem yang kuat untuk mengelola informasi dengan aman dan memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar.

d. **Overload / Banjir Informasi**

Dalam era digital yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi, kita berada dalam kondisi di mana akses terhadap informasi lebih mudah dari sebelumnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada tantangan yang semakin mendesak yaitu *overload*/banjir informasi. Fenomena ini muncul ketika jumlah informasi yang tersedia jauh melebihi kapasitas individu untuk menyerapnya dengan tepat waktu dan secara efektif. Banjirnya informasi telah menjadi suatu ironi. Di satu sisi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat, murah, dan mudah, namun di sisi lain membawa dampak negatif dan memunculkan segregasi sosial.

⁸⁵ Scarfone, Karen. (2011). "Guide to Security for Full Virtualization Technologies". National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-125. (January 2011).

⁸⁶ Ogata, Michael. (2019). "Vetting the Security of Mobile Applications". National Institute of Standards and Technology Special Publication. (April 2019).

Gambar 13. Jajak Pendapat Banjir Informasi⁸⁷

Hasil jajak pendapat Kompas di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa jenuh dengan banjir informasi, menandakan kurangnya kesiapan literasi digital di tengah masifnya persebaran konten informasi. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah interaksi dan akses informasi, namun juga membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks yang merusak mental masyarakat. Sebesar 41,6% masyarakat merasa sangat khawatir terhadap hoaks, dengan mayoritas menganggap medsos dan situs daring sebagai penyumbang utama penyebaran hoaks. Bahkan, sebagian besar menyatakan bahwa konten hoaks tersebut sangat parah. Masyarakat khawatir bahwa banjir informasi ini akan menyebabkan segregasi sosial berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) serta berdasarkan kelas sosial ekonomi, politik, ideologi, dan partai.

⁸⁷ Yuniarto, Topan. *Ironi Banjir Informasi di Mata Publik*. URL. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/28/ironi-banjir-informasi-di-mata-publik>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 22.40 WIB.

Di tengah gelombang informasi yang melimpah saat ini, jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas juga mengungkapkan bahwa sebagian responden (48,3%) merasa masih mampu merangkum informasi yang diberikan oleh media, sementara sebagian lainnya (40,7%) mengakui bahwa kelebihan informasi justru membuat mereka merasa bingung, dengan sebagian kecil responden (9,4%) menyatakan bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian. Meskipun demikian, sebagian responden tetap menganggap media *mainstream* seperti surat kabar dan televisi lebih akurat dalam menyajikan informasi, karena proses produksi berita melalui media tersebut lebih panjang dan terstruktur dibandingkan medsos yang memungkinkan siapapun menghasilkan konten secara instan. Hal ini menyebabkan publik terjebak dalam kelebihan informasi, menyebabkan bias kognitif dan kesalahan sistematis dalam berpikir yang memengaruhi keputusan dan penilaian.

Pada dasarnya, *overload* informasi menjadi hambatan utama dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi untuk membangun kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kepercayaan publik menjadi fondasi yang vital bagi stabilitas dan keberlanjutan suatu masyarakat. Namun, ketika informasi berlimpah tanpa penyeleksian yang cermat, kepercayaan publik rentan terhadap distorsi, manipulasi, dan bahkan penyalahgunaan. Dalam pandangan yang lebih luas, *overload* informasi bukan hanya sekadar masalah kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi informasi. Tidak jarang, banjir informasi tersebut menyebabkan kebingungan, kehilangan fokus, dan bahkan menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap sumber informasi itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi memberikan nilai tambah yang signifikan dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik. Beberapa langkah konkret yang perlu diambil adalah: 1) **Penyaringan Informasi.** Gunakan alat dan strategi untuk menyaring informasi yang relevan dan terpercaya. Hal ini berupa algoritma mesin pencari yang disesuaikan atau layanan seleksi berita yang dipercaya; 2) **Pendidikan Publik.** Tingkatkan literasi digital dan media di masyarakat

melalui pelatihan tentang cara memverifikasi informasi, mengenali sumber yang dipercaya, dan mengelola banjir informasi akan membantu individu membuat keputusan yang lebih baik; 3) **Transparansi dan Akuntabilitas.** Jaga transparansi dalam mengelola informasi. Organisasi, baik pemerintah maupun swasta harus memberikan akses yang mudah terhadap informasi mereka dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan informasi yang mereka sampaikan; 4) **Kolaborasi Industri.** Kolaborasi antara platform medsos, perusahaan teknologi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil akan membantu mengembangkan standar dan praktik terbaik untuk mengelola informasi secara efektif; 5) **Penggunaan Teknologi.** Manfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk membantu menyaring dan mengelola informasi dengan lebih efisien. Hal ini termasuk penggunaan filter cerdas untuk mengurangi *noise* dan menyoroti konten yang paling relevan dan terpercaya; 6) **Keterlibatan Publik.** Libatkan masyarakat dalam proses pengelolaan informasi. Berikan platform untuk umpan balik dan partisipasi masyarakat dalam menyaring dan mengelola informasi yang mereka terima; dan 7) **Etika Digital.** Tingkatkan kesadaran tentang etika digital di antara individu dan organisasi. Ini termasuk tanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta menghormati privasi dan keamanan data. Dengan kombinasi berbagai strategi di atas, banjir informasi dapat diatasi dan kepercayaan publik terbangun dalam mengelola informasi di era digital.

e. Munculnya Polarisasi dan Konflik Informasi

Dalam era digital yang kian berkembang pesat, pengelolaan informasi menjadi semakin kompleks dan menantang. Salah satu tantangannya adalah adanya polarisasi dan konflik informasi, yang telah memengaruhi upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi untuk membangun kepercayaan publik. Polarisasi merujuk pada pembentukan kelompok-kelompok dengan pandangan dan keyakinan yang ekstrem dan sering kali saling bertentangan. Di sisi lain, konflik informasi terjadi ketika informasi yang berbeda atau bahkan bertentangan tersebar secara luas, membingungkan masyarakat dan merusak kepercayaan mereka. Dalam konteks pengelolaan informasi di era digital,

polarisasi dan konflik informasi menjadi hambatan serius. Masyarakat rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau tendensius, terutama di platform-platform medsos yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau tendensius tersebut akan menyebabkan polarisasi dalam masyarakat dan konflik informasi antara kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda.

Mengatasi polarisasi masyarakat dan konflik informasi serta membangun kepercayaan publik dalam era digital merupakan tantangan yang kompleks, namun ada beberapa pendekatan yang perlu diambil, di antaranya: 1) **Transparansi dan Akuntabilitas.** Penting untuk memastikan bahwa informasi disampaikan secara transparan dan dengan akuntabilitas yang jelas. Pemerintah, organisasi, dan media harus terbuka tentang sumber informasi, metode pengumpulan data, dan proses pengambilan keputusan; 2) **Pendidikan dan Literasi Media.** Memberikan pendidikan media yang kuat kepada masyarakat adalah kunci untuk memahami dan menilai informasi dengan lebih kritis. Pelatihan literasi media akan membantu individu mengenali sumber-sumber informasi yang terpercaya dan mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi dengan lebih baik; 3) **Kolaborasi Antar-Lembaga.** Kerjasama antara pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta membantu dalam menyediakan informasi yang lebih terpercaya dan beragam. Ini mencakup berbagi sumber daya, data, dan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi; 4) **Mengedepankan Keterbukaan dan Dialog.** Mendorong dialog terbuka antara kelompok-kelompok yang berbeda pendapat membantu mengurangi polarisasi dan meningkatkan pemahaman bersama. Forum-forum diskusi publik, debat terbuka, dan inisiatif dialog antarkelompok menjadi alat yang efektif untuk memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan; dan 5) **Promosi Budaya Berpikir Kritis.** Budayakan sikap skeptis dan kritis terhadap informasi yang diterima. Ini melibatkan mengajarkan orang untuk bertanya, memeriksa fakta, dan mencari perspektif yang berbeda sebelum membuat kesimpulan. Mengintegrasikan berbagai pendekatan di atas secara holistik

akan membantu membangun lingkungan informasi yang lebih sehat, mengurangi polarisasi, dan memperkuat kepercayaan publik dalam era digital.

Berbagai solusi/cara untuk mengatasi kelima tantangan di atas sesuai dengan Teori Manajemen Richard L. Daft, di mana terdapat 5 (lima) faktor utama yang menjadi susunan utama suatu organisasi atau perusahaan agar beroperasi secara maksimal, yaitu *Man* (manusia) yang berupa pelatihan SDM yang berkala dan relevan tentang praktik terbaik dalam mengelola informasi, termasuk keamanan informasi dan privasi data, serta pentingnya membangun budaya untuk bersikap skeptis dan kritis terhadap informasi yang diterima. *Machines* (mesin) berupa pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk membantu menyaring dan mengelola informasi dengan lebih efisien. *Money* (uang) berupa dukungan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan serta pembangunan infrastruktur teknologi. *Method* (metode) berupa berbagai kebijakan yang mendukung upaya mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital untuk membangun kepercayaan publik, seperti kebijakan dalam keamanan data, privasi, serta aksesibilitas informasi. Terakhir *Material* (bahan baku) berupa kualitas data yang valid dan terpercaya serta keamanan data yang terjamin. Dengan demikian, melalui penerapan Teori Manajemen dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul, diharapkan pengelolaan informasi di era digital akan lebih optimal, sehingga pada akhirnya kepercayaan publik akan terbangun.

14. Urgensi Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Optimalisasi Pengelolaan Informasi Guna Menyukseskan Pembangunan Nasional

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Medsos, platform daring, dan teknologi digital lainnya telah merubah cara kita berinteraksi, berbagi, dan mengonsumsi informasi. Hal ini telah membawa perubahan besar dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dalam hal persepsi terhadap institusi-institusi pemerintahan, termasuk Polri sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸⁸ Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap Polri

⁸⁸ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menjadi faktor kunci dalam mendukung kesuksesan pembangunan nasional. Namun, dalam era digital yang penuh dengan arus informasi yang cepat dan kompleks, tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik semakin meningkat.

Pengelolaan informasi yang efektif dan transparan menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini. Melalui optimalisasi pengelolaan informasi di era digital, Polri memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, terpercaya, dan diakses dengan mudah. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi dalam penyampaian informasi tentang kegiatan operasional, hingga perlindungan data pribadi dan privasi individu. Peran medsos dan teknologi digital dalam membentuk opini publik juga tidak boleh diabaikan. Seiring dengan keuntungan besar yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, juga terdapat risiko penyebaran informasi yang salah (hoaks) dan penyalahgunaan data yang dapat merusak reputasi institusi dan mengganggu stabilitas sosial.

Optimalisasi pengelolaan informasi di era digital sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dalam konteks pembangunan nasional, kepercayaan publik terhadap Polri tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Di era digital, informasi memiliki peran yang semakin vital. Keterbukaan dan transparansi dalam menyajikan informasi akan membantu menciptakan iklim di mana publik merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan fungsi institusi Polri. Oleh karena itu, urgensi optimalisasi pengelolaan informasi oleh Polri tidak hanya terkait dengan membangun kepercayaan publik, tetapi juga dengan mendukung kesuksesan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hanya dengan memastikan bahwa informasi disampaikan secara transparan, akurat, dan aman, Polri memberdayakan Divisi Humas Polri sebagai fungsi kehumasan dalam memenuhi harapan masyarakat dan menjadi mitra yang efektif dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Bahwa hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, di mana salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan nasional saat ini adalah optimalisasi pengelolaan informasi, terutama dalam era digital. Pengelolaan

informasi yang baik oleh Polri merupakan salah satu pilar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

a. **Keterbukaan dan Transparansi**

Keterbukaan dan transparansi memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan mendukung pembangunan nasional yang berhasil. Kepercayaan publik merupakan fondasi yang penting dalam pembangunan nasional. Dalam konteks tulisan ini, kepercayaan publik terhadap institusi Polri saat ini kembali diuji setelah kasus Vina Cirebon viral. Kasus ini kembali mengemuka setelah hadirnya film berjudul "Vina: Sebelum 7 Hari" yang mengadaptasi kisah nyata dari kasus tersebut. Kepercayaan publik terhadap Polri yang telah meningkat setelah merosot di tahun 2022 akibat kasus besar yang melibatkan petinggi Polri, kembali menjadi perhatian. Masyarakat kembali mempertanyakan kinerja Polri yang belum berhasil mengungkap kasus Vina yang terjadi 8 tahun silam, kepercayaan kepada Polri pun kembali diuji di kasus ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai turun tangan dengan meminta kepada Kapolri untuk mengusut kasus ini dengan transparan tanpa ada yang perlu ditutupi.⁸⁹

Dalam era digital, di mana informasi dengan mudah diakses dan tersebar luas, penting bagi institusi Polri untuk secara proaktif mengelola informasi mereka. **Pertama**, keterbukaan mengenai kegiatan dan keputusan Polri membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat tentang peran dan tanggung jawab Polri. Ketika publik memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang kebijakan, program, dan tindakan yang diambil oleh Polri, mereka akan membuat penilaian yang lebih baik tentang kinerja lembaga tersebut. **Kedua**, transparansi membantu mengurangi spekulasi dan skeptisisme yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. Dengan memberikan akses terbuka ke informasi, Polri telah memperkuat legitimasi mereka sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dan akuntabel.

⁸⁹ Nugraheny, Dian Erika dan Prabowo, Dani. *Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"*. URL. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/12471331/jokowi-minta-polri-transparan-usut-kasus-vina-cirebon>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 22.57 WIB.

Selain itu, keterbukaan akan membantu Polri mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau kekurangan dalam sistem mereka. Dengan menerima umpan balik dan masukan dari masyarakat, Polri telah meningkatkan kualitas layanan dan kinerja mereka. Secara keseluruhan, optimalisasi pengelolaan informasi di era digital bukan hanya tentang memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara Polri dan masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan dan transparansi merupakan pilar penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

b. Pemberitaan yang Akurat dan Objektif

Pemberitaan yang akurat dan objektif adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan mendukung pembangunan nasional yang sukses. Melalui pemberitaan yang akurat dan objektif, baik dari internal maupun eksternal, Polri memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik tidak terdistorsi dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan. Dalam era digital yang penuh dengan informasi yang beredar dengan cepat, penting bagi Polri untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak bias.

Pemberitaan yang akurat membantu masyarakat memahami dengan lebih baik peran dan kinerja Polri. Ketika informasi yang disampaikan melalui berbagai media adalah akurat, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk membuat penilaian tentang kinerja Polri dan kebijakan yang mereka terapkan. Pemberitaan yang objektif membantu mengurangi risiko distorsi atau manipulasi informasi yang akan merugikan reputasi Polri. Dengan memastikan bahwa berita yang disajikan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau bias tertentu, Polri membangun citra yang lebih positif di mata masyarakat.

Di samping itu, pemberitaan yang akurat dan objektif memungkinkan Polri untuk secara efektif berkomunikasi dengan masyarakat tentang isu-isu keamanan dan penegakan hukum yang penting. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan tepat waktu, Polri telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi ancaman dan cara-cara untuk melindungi diri

mereka sendiri. Pemberitaan yang akurat dan objektif juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi antara Polri dan masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa mereka menerima informasi yang terpercaya dari Polri, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam program-program keamanan atau inisiatif penegakan hukum yang didukung oleh Polri. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan informasi di era digital tidak hanya tentang menyediakan akses terbuka terhadap informasi, tetapi juga tentang memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan tidak bias. Dengan cara ini, Polri membangun kepercayaan publik yang kokoh dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

c. **Penggunaan Media Sosial dan Teknologi Digital**

Penggunaan medsos dan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, memperoleh informasi, dan memandang institusi-institusi, termasuk kepolisian. Di era digital, informasi dapat dengan cepat disebarkan secara luas, baik informasi yang benar maupun yang tidak benar (hoaks). Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan informasi sangat penting bagi Polri agar tetap transparan, terpercaya, dan relevan dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung ini. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan, mereka cenderung lebih percaya terhadap institusi Polri.

Medsos memungkinkan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dengan cepat. Polri harus secara aktif terlibat dalam memerangi penyebaran hoaks untuk mencegah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan memanfaatkan medsos dan teknologi digital, Polri berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ini memungkinkan institusi untuk mendengarkan masukan, menjelaskan kebijakan, dan memberikan informasi yang relevan secara *real-time*. Dengan memastikan bahwa informasi tentang proses hukum dan penegakan hukum disediakan secara jelas dan tepat waktu, Polri meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan sistem hukum.

Polri telah menggunakan medsos dan teknologi digital untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum, keamanan, dan

partisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan menganalisis tren dan kebutuhan masyarakat, Polri lebih responsif terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan memberikan informasi yang akurat, terbaru, dan relevan, Polri membangun citra positif di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan informasi di era digital bukan hanya penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, tetapi juga untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan.

d. **Perlindungan Data dan Privasi**

Perlindungan data dan privasi menjadi semakin penting di era digital karena jumlah dan jenis data yang dikumpulkan dan disimpan semakin besar. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan masyarakat, Polri memiliki akses terhadap informasi yang sensitif dan pribadi. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan informasi di era digital sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Polri mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam data, termasuk data pribadi individu. Memastikan keamanan data tersebut dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan adalah suatu keharusan. Dengan melakukan itu, Polri telah menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan privasi masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya undang-undang dan regulasi terkait privasi data seperti UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi, kepatuhan Polri terhadap regulasi tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap cara mereka mengelola informasi. Sebaliknya, jika Polri bertindak semena-mena yang melanggar hak privasi masyarakat maka kepercayaan publik kepada Polri akan hilang. Sebagai contoh, video viral tentang seorang anggota kepolisian Aipda Ambarita yang memeriksa dengan paksa HP seorang pemuda dengan alasan memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya mengakui jika terdapat kesalahan SOP atau prosedur, akibatnya Aipda Ambarita dimutasi dari Banit 51 Unitdalmas Satsabhara Polres Metro Jakarta Timur menjadi Bintara Bidhumas Polda Metro Jaya.⁹⁰ Kasus tersebut menggambarkan jika anggota Polri tidak boleh semena-mena memeriksa bahkan menyita barang pribadi masyarakat. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pun menyatakan jika polisi tidak boleh menggeledah dan memeriksa HP masyarakat karena selain merupakan ranah privasi juga melanggar Pasal 30 UU ITE.⁹¹ Hal ini diamini oleh Komisioner Kopolnas Poengky yang mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang privasi milik seseorang harus berlandaskan perintah dan izin pengadilan.⁹²

Di samping itu, Polri harus transparan tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang kebijakan mereka terkait penggunaan data, Polri membangun kepercayaan publik. Penggunaan data oleh Polri juga harus adil dan tidak diskriminatif. Polri harus memastikan bahwa data yang mereka gunakan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hak-hak individu atau kelompok tertentu. Pelanggaran privasi data dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dengan memastikan bahwa data disimpan dan diakses dengan benar, Polri menghindari risiko tersebut. Dalam konteks ini, Polri telah mengimplementasikan bank data berupa platform *big data*, di mana data melalui proses pengumpulan, untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk visualisasi dan analisa prediktif. Data yang telah diolah meliputi data personel, data kamtibmas wilayah, data informasi satuan wilayah, dan data sistem operasi terpadu.

Polri telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data dan langkah-langkah yang perlu

⁹⁰ CNN Indonesia. *Polda Metro Akui Aipda Ambarita Salah SOP Soal Periksa HP*. URL. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019142438-12-709694/polda-metro-akui-aipda-ambarita-salah-sop-soal-periksa-hp>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 19.57 WIB.

⁹¹ Safitri, Eva. *IPW Minta Aipda Ambarita yang Viral Periksa HP Warga Ditindak Tegas*. URL. <https://news.detik.com/berita/d-5774649/ipw-minta-aipda-ambarita-yang-viral-periksa-hp-warga-ditindak-tegas>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 19.57 WIB.

⁹² Darmawan, Rakha Ariyanto. *Viral Aipda Ambarita Periksa HP Warga Saat Patroli, Kopolnas: Keliru!* URL. <https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patroli-kopolnas-keliru>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 20.10 WIB.

diambil untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan melakukan itu, Polri telah membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat. Memprioritaskan perlindungan data dan privasi membuat Polri membangun kepercayaan publik yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi pertumbuhan dan kemajuan.

e. **Keterlibatan Publik**

Keterlibatan publik adalah faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dalam era digital, pengelolaan informasi yang optimal menjadi sangat penting dalam memfasilitasi keterlibatan publik yang efektif. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan tentang kegiatan dan kebijakan Polri, masyarakat dapat memahami lebih baik tentang peran dan tanggung jawab Polri. Ini membantu menciptakan rasa akuntabilitas dan memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja Polri secara lebih baik. Selain itu, dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau memberikan masukan melalui platform digital, Polri memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Informasi yang mudah diakses dan dipahami membantu dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mengetahui hak-hak mereka, prosedur hukum, dan cara berinteraksi dengan Polri, masyarakat dapat lebih aktif melindungi diri mereka sendiri dan berkontribusi pada upaya penegakan hukum. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, Polri lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam mengidentifikasi ancaman keamanan dan memberikan wawasan tentang masalah-masalah yang memengaruhi komunitas mereka.

Interaksi yang positif antara Polri dan masyarakat melalui platform digital akan membantu memperkuat hubungan antara keduanya. Hal ini akan menciptakan atmosfer saling percaya dan kerja sama yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan

memanfaatkan data dan umpan balik dari masyarakat yang diperoleh melalui platform digital, Polri menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Di samping itu, melalui komunikasi yang terbuka dan interaksi yang positif dengan masyarakat, Polri membangun citra yang positif di mata publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan terhadap Polri dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

f. **Penguatan Keamanan Siber**

Penguatan keamanan siber merupakan hal yang sangat penting dalam konteks pengelolaan informasi di era digital. Keberhasilan institusi Polri dalam memastikan keamanan data dan sistem informasi mereka tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap Polri sendiri, tetapi juga terhadap stabilitas dan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Polri mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis data pribadi yang sensitif. Memastikan keamanan data ini dari serangan siber dan pelanggaran data merupakan prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri. Dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi, Polri meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan mencegah serangan siber yang bertujuan merusak sistem informasi atau mencuri data penting.

Serangan siber terhadap institusi penegak hukum dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap keamanan dan keefektifan Polri. Dengan mengamankan sistem informasi, Polri telah menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi kepentingan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. Dengan mengantisipasi dan menanggapi ancaman keamanan siber secara proaktif, menunjukkan bahwa Polri siap menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam lingkungan digital. Ini mencakup investasi dalam teknologi keamanan canggih, pelatihan SDM, dan pengembangan kebijakan yang relevan. Polri perlu kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pertahanan siber secara keseluruhan.

Selain itu, dalam upaya melawan kejahatan siber, *cybercrime investigation* menjadi semakin penting. Polri perlu memiliki kapasitas dan

keterampilan yang diperlukan untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan siber. Pengelolaan informasi yang baik memungkinkan Polri untuk mengumpulkan bukti digital yang diperlukan dan berkolaborasi dengan otoritas yang relevan di tingkat nasional dan internasional. Dengan memprioritaskan penguatan keamanan siber dan mengoptimalkan pengelolaan informasi, Polri membangun fondasi yang kuat untuk mendukung kepercayaan publik dan membantu memastikan keberhasilan pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan di era digital.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital, Polri membangun dan memperkuat kepercayaan publik, serta membangun citra positif Polri di mata masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional dengan menciptakan iklim yang stabil, aman, dan berkembang. Di sinilah dibutuhkan kehadiran Humas Polri sebagai fungsi utama keenam Polri, untuk menjadi corong terdepan bagi institusi Polri dalam memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Selain itu, Humas Polri juga harus senantiasa bekerja sama dengan media, baik media konvensional maupun *mainstream* melalui kerja sama formal maupun informal.⁹³ Hal ini sesuai dengan Teori Humas oleh Cutlip, Center, dan Broom yang berpendapat jika humas merupakan fungsi pengelolaan yang menciptakan dan memelihara hubungan yang baik serta mempunyai manfaat antara organisasi dan masyarakat, sehingga memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Dalam konteks ini, keberhasilan atau kegagalan Humas Polri dalam membangun dan memperkuat kepercayaan publik, serta membangun citra positif Polri di mata masyarakat.

15. Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan Informasi di Era Digital Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Guna Mendukung Suksesnya Pembangunan Nasional

Di era digital yang semakin maju, informasi menjadi salah satu aset paling berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keamanan

⁹³ Jurnaliston, Reza dan Kriandi. *Kapolri Sebut Humas Jadi Fungsi Utama Polri*. URL. https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/11473081/kapolri-sebut-humas-jadi-fungsi-utama-polri?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 19.40 WIB.

dan ketertiban masyarakat. Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam mengelola informasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Pengelolaan informasi yang efektif dan efisien tidak hanya berfungsi untuk pencegahan dan penanganan kejahatan, tetapi juga untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Transformasi digital yang telah merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor keamanan, menuntut Polri untuk beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam operasional sehari-hari. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan informasi memungkinkan Polri untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Polri lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, mulai dari penanganan laporan masyarakat, penyelidikan, hingga penyampaian informasi publik.

Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu tujuan utama dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap Polri akan mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pembangunan nasional tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi, yang memerlukan dukungan dari lingkungan yang aman dan tertib. Oleh karena itu, Polri terus berupaya meningkatkan kemampuan dan infrastruktur teknologi informasinya. Hal ini meliputi pengembangan sistem manajemen informasi, pelatihan SDM, serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi teknologi dan masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan Polri menghadapi tantangan di era digital dengan lebih baik dan berkontribusi secara signifikan dalam mendukung suksesnya pembangunan nasional.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital dan meningkatkan kepercayaan publik, Polri telah melakukan berbagai upaya inovatif yang mendukung suksesnya pembangunan nasional. Beberapa langkah strategis yang diambil Polri meliputi:

a. **Digitalisasi Layanan Publik**

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, Polri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan layanan *SuperApps Presisi*. *SuperApps* merupakan rumah berbagai aplikasi yang dibangun oleh satker-satker lain dalam upaya pelayanan publik maupun

pelayanan internal Polri yang disatukan dalam API *Gateway*. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian dengan cepat, efisien, dan transparan, tanpa harus mengunjungi kantor polisi secara langsung. *SuperApps* dikembangkan sebagai tonggak utama dalam inovasi dan integrasi layanan kepolisian, yang bertujuan untuk memetakan inovasi yang diajukan dari satker ke *roadmap* transformasi digital Polri, memastikan pengajuan integrasi/pelayanan baru sudah sesuai standarisasi *framework SuperApps*, dan manajemen implementasi untuk memastikan keberjalanan integrasi/pelayanan baru sesuai dengan standar dan waktu yang disepakati. Aplikasi/layanan yang terintegrasi dengan *SuperApps* antara lain:

1) Layanan SIM, STNK, E-Tilang, dan ETLE oleh Korlantas Polri

Korlantas Polri telah meluncurkan berbagai layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Layanan-layanan ini mencakup digitalisasi Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sistem tilang elektronik (E-Tilang), dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Digitalisasi SIM memungkinkan pemegang SIM untuk mengakses data SIM mereka secara *online* melalui aplikasi yang disediakan oleh Korlantas Polri. Ini memudahkan pengguna dalam mengelola dan memperbarui informasi SIM tanpa harus mengunjungi kantor polisi secara langsung. Serupa dengan SIM Digital, layanan STNK Digital memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan untuk mengakses informasi STNK mereka secara *online*. Dengan demikian, proses perpanjangan dan pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Sistem E-Tilang merupakan inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Pelanggar lalu lintas dapat menerima tilang secara elektronik, yang kemudian dapat dibayarkan melalui berbagai metode pembayaran digital. Ini mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dan petugas, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyimpangan. ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang menggunakan kamera pengawas untuk mendeteksi pelanggaran lalu

lintas secara otomatis. Dengan sistem ini, pelanggar akan mendapatkan surat tilang yang dikirim langsung ke alamat yang terdaftar. Layanan-layanan digital ini tidak hanya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Dengan adanya layanan digital ini, diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang berbelit dan mempercepat proses pelayanan publik.

2) Layanan SKCK dan Izin Keramaian oleh Baintelkam Polri

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan publik, Baintelkam Polri telah memperkenalkan layanan digital untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Izin Keramaian. Digitalisasi layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian dengan lebih cepat dan transparan. Layanan digital SKCK memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan SKCK secara *online*, sehingga mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor polisi. Pengguna dapat mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan membayar biaya administrasi secara *online*. Setelah proses verifikasi selesai, SKCK dapat diunduh dan dicetak oleh pemohon.⁹⁴

Di samping itu, izin keramaian yang diperlukan untuk mengadakan acara publik atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, kini juga dapat diurus secara digital. Melalui layanan ini, pemohon dapat mengajukan permohonan izin, melengkapi persyaratan, dan memantau status permohonan secara *online*. Digitalisasi proses ini membantu mempercepat penerbitan izin dan memastikan transparansi dalam proses pengajuan dan persetujuan izin. Layanan digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi kepolisian. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan masyarakat dapat

⁹⁴ Polri. *SKCK Online*. URL. <https://skck.polri.go.id/>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 20.15 WIB.

lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan tanpa terhalang oleh birokrasi yang berbelit.⁹⁵

3) Layanan Dumas Presisi oleh Div Propam Polri

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kepolisian, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri telah meluncurkan layanan Dumas Presisi. Dumas Presisi yang merupakan singkatan dari Pengaduan Masyarakat yang Presisi adalah platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait kinerja dan pelayanan kepolisian dengan lebih mudah dan cepat. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi pengaduan dan laporan terkait pelanggaran etika profesi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan indisipliner oleh anggota Polri. Melalui layanan ini, pelapor dapat mengajukan laporan secara *online* dengan menyertakan bukti-bukti pendukung, yang kemudian akan diproses oleh Divisi Propam Polri. Dumas Presisi dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor polisi terdekat.⁹⁶

Selain itu, layanan Dumas Presisi juga memungkinkan adanya umpan balik dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tubuh Polri. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah menerima sebanyak 125 pengaduan masyarakat dengan 121 kasus telah ditindaklanjuti sementara 4 kasus masih dalam upaya penyelidikan.⁹⁷ Keberadaan Dumas Presisi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Polri dalam menerapkan prinsip-prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan). Dengan

⁹⁵ Polri. Izin Keramaian. URL. <https://polri.go.id/izin-keramaian/>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 20.25 WIB.

⁹⁶ Gafar. *Aplikasi Dumas Presisi, Pengaduan Layanan Polri Online*. URL. <https://rri.co.id/kendari/daerah/72658/aplikasi-dumas-presisi-pengaduan-layanan-polri-online/>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 20.45 WIB.

⁹⁷ Polda Jatim. *Aplikasi E- Dumas Presisi Pengaduan Kepolisian langsung Via On Line - Aplikasi Bisa Diunduh di Play Store*. URL. <https://humas.polri.go.id/2021/09/03/aplikasi-e-dumas-presisi-pengaduan-kepolisian-langsung-via-on-line-aplikasi-bisa-diunduh-di-play-store/>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 21.05 WIB.

demikian, diharapkan pelayanan kepolisian dapat terus ditingkatkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

4) Layanan SP2HP oleh Bareskrim Polri

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah meluncurkan layanan digital untuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus yang dilaporkan secara lebih mudah dan cepat. SP2HP adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyidik kepolisian untuk memberikan informasi kepada pelapor mengenai perkembangan penyidikan suatu kasus. Dengan adanya layanan digital SP2HP, pelapor tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk memperoleh informasi ini. Pelapor dapat mengakses layanan ini melalui portal resmi yang disediakan oleh Bareskrim Polri.

Melalui layanan digital SP2HP, masyarakat dapat memantau secara langsung tahap-tahap penyidikan kasus yang mereka laporkan, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan saksi dan barang bukti, hingga hasil penyidikan akhir. Layanan ini juga menyediakan fitur untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan umpan balik mengenai penanganan kasus. Digitalisasi layanan SP2HP bertujuan untuk mempercepat proses penyampaian informasi kepada pelapor, meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan merasa aman dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.⁹⁸

5) Layanan Museum Polri oleh Pusjarah Polri

Museum Polri merupakan salah satu upaya dari Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri untuk mengabadikan, melestarikan, dan

⁹⁸ Polri. *Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)*. URL. <https://polri.go.id/sp2hp>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 22.45 WIB.

menyebarkan sejarah serta nilai-nilai perjuangan Polri kepada masyarakat luas. Melalui Museum Polri, Pusjarah Polri menyediakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk belajar dan memahami perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Museum Polri menyediakan berbagai koleksi yang mencakup dokumen, foto, dan benda bersejarah lainnya yang menggambarkan evolusi dan kontribusi Polri dari masa ke masa. Pengunjung dapat menikmati berbagai pameran yang disusun secara kronologis, menampilkan peran Polri dalam berbagai peristiwa penting di Indonesia.

Museum Polri juga dilengkapi dengan fasilitas interaktif yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik dan edukatif bagi pengunjung. Melalui layanan ini, pengunjung dapat berpartisipasi dalam tur virtual, mengakses informasi digital tentang koleksi museum, dan mengikuti berbagai kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh museum. Layanan Museum Polri bertujuan untuk tidak hanya menjadi sumber informasi sejarah bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan profesionalisme Polri. Dengan adanya museum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah air.⁹⁹

Langkah-langkah digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepolisian tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas yang dihasilkan dari digitalisasi layanan publik mendukung terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan nasional.

b. **Inovasi Pelayanan Interaktif**

Di era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, Polri dihadapkan pada tantangan dan peluang baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu respons Polri terhadap dinamika ini adalah dengan mengimplementasikan inovasi dalam

⁹⁹ Pusjarah Polri. *Museum Polri*. URL. <https://museumpolri.org/>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 23.35 WIB.

pelayanan interaktif guna mengoptimalkan pengelolaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Inovasi pelayanan interaktif Polri ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menyampaikan informasi secara lebih efektif, transparan, dan responsif. Inovasi ini memfasilitasi transparansi dan responsivitas Polri terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰⁰

1) **MediaHub Humas Polri**

Media Hub merupakan situs resmi milik Divisi Humas Polri di mana di dalamnya berisi konten-konten yang dapat diakses secara gratis oleh internal Polri, jurnalis, masyarakat umum, dan Kantor Staf Presiden (KSP).¹⁰¹ MediaHub Humas Polri disediakan oleh Polri untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran media. MediaHub berperan sebagai jembatan komunikasi antara Polri dengan publik, menyampaikan berita terkini, informasi kegiatan, dan pesan-pesan penting dari institusi kepolisian. Melalui MediaHub Humas Polri, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkait kegiatan operasional polisi, program-program pencegahan kriminalitas, edukasi hukum, serta berita terkait keamanan dan ketertiban. MediaHub ini juga menjadi sumber informasi resmi ketika terjadi kejadian penting yang melibatkan kepolisian. Secara umum, tujuan dari MediaHub Humas Polri adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan institusi kepolisian kepada masyarakat melalui media massa dan platform daring.

2) **TV Radio Polri**

TV Radio Polri adalah saluran televisi dan radio yang dimiliki dan dioperasikan oleh Polri. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi terkini seputar kegiatan Polri, berita terkait keamanan, serta edukasi kepada masyarakat. TV Radio Polri adalah program penyiaran

¹⁰⁰ Rahmawaty, Laily. *Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. URL. <https://www.antaraneews.com/berita/3407010/kapolri-komitmen-terus-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 20.20 WIB.

¹⁰¹ MediaHub Humas Polri. *Frequently Asked Questions*. URL. <https://mediahub.polri.go.id/faq>, diakses pada 31 Mei 2024 pukul 20.15 WIB.

streaming yang diluncurkan oleh Divisi Humas Polri untuk memperkuat komunikasi publik. Program ini merupakan salah satu prioritas dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Melalui saluran ini, informasi mengenai prestasi kinerja dan sosialisasi edukasi Polri disampaikan kepada publik dengan cara yang informatif dan transparan. Inisiatif ini adalah bagian dari transformasi Polri menuju prinsip Presisi.¹⁰² Layanan TV Radio Polri juga digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih efektif.

3) **Tribrata News**

Tribrata News adalah platform berita resmi Polri yang aktif sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan informasi terkini, terpercaya, dan transparan terkait berbagai kegiatan, kebijakan, dan isu-isu keamanan yang menjadi tanggung jawab Polri. Melalui Tribrata News, Polri berusaha meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat. Tribrata News menyajikan berbagai jenis konten, termasuk berita harian, laporan kegiatan, pengumuman resmi, artikel opini, serta edukasi mengenai hukum dan keamanan. Dengan akses yang mudah melalui situs web dan medsos, layanan ini memungkinkan masyarakat untuk selalu *terupdate* dengan informasi yang akurat dan relevan tentang berbagai aktivitas Polri di seluruh Indonesia. Keberadaan Tribrata News juga merupakan salah satu upaya Polri dalam meningkatkan citra dan kepercayaan publik melalui transparansi informasi. Dalam era digital ini, kecepatan dan keakuratan informasi menjadi kunci, dan Tribrata News berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut bagi masyarakat.¹⁰³

4) **Podcast Presisi Polri**

Podcast Presisi Polri adalah program audio-visual yang diselenggarakan oleh Polri melalui platform Polri TV dan Radio. Podcast

¹⁰² PolriTV. *About*. URL. <https://tvradio.polri.go.id/about>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 19.55 WIB.

¹⁰³ TBNews. *Tentang Kami*. URL. <https://tribrataneews.polri.go.id/tentang-kami>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 19.05 WIB.

ini bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan wawasan kepada masyarakat mengenai berbagai inisiatif dan program Polri dalam rangka mewujudkan konsep Presisi. Beberapa topik yang dibahas meliputi teknologi mutakhir Polri, inovasi program di lapangan, hingga upaya Polri dalam meningkatkan pelayanan publik dan menjaga keamanan. Podcast diharapkan menjadi platform yang efektif untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus menjadi sumber informasi yang terpercaya. Melalui berbagai topik pembahasan dan perspektif yang terbuka, podcast ini bertujuan untuk menjangkau dan mendidik lebih banyak masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan dan tugas kepolisian.¹⁰⁴

5) **Program Talkshow**

Program Talkshow merupakan salah satu inisiatif dari Polri yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi antara kepolisian dengan masyarakat. Program ini menghadirkan berbagai topik yang relevan dengan keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik, serta menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk pejabat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pakar di bidang terkait. Melalui talkshow ini, Polri berupaya memberikan informasi yang akurat, mengklarifikasi isu-isu yang berkembang, serta menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat secara langsung. Dalam setiap episodenya, Program Talkshow mengangkat tema-tema aktual yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian, seperti penegakan hukum, pencegahan kejahatan, edukasi mengenai peraturan lalu lintas, serta inisiatif-inisiatif baru yang dijalankan oleh Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif demi kemajuan institusi kepolisian. Melalui pendekatan yang lebih interaktif dan terbuka ini, diharapkan terjalin hubungan yang lebih

¹⁰⁴ Polres Tapanuli Selatan. *Kapolda Sumut Luncurkan Podcast "Police Talk" untuk Dekatkan Polisi dengan Masyarakat*. URL. <https://humas.polri.go.id/2024/06/07/kapolda-sumut-luncurkan-podcast-police-talk-untuk-dekatkan-polisi-dengan-masyarakat/>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 16.30 WIB.

harmonis antara Polri dan masyarakat, serta tercipta kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi kepolisian.¹⁰⁵ Dengan demikian, diharapkan program ini tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menginspirasi dan mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan mendukung peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. **Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Polri telah mengadopsi berbagai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya Polri dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan nasional. Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Polri di antaranya:

1) **Penggunaan Sistem Informasi Manajemen**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Polri adalah sebuah platform teknologi yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan manajemen di Polri. SIM Polri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam berbagai aspek manajemen, mulai dari administrasi personel, penugasan tugas, pengelolaan logistik, hingga pelaporan kinerja dan evaluasi kegiatan operasional. Dengan adopsi teknologi informasi yang canggih, SIM Polri membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antar-unit, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi atas kinerja institusi secara keseluruhan. Sistem ini juga berperan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal melalui analisis data yang terintegrasi dan penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan di dalam Polri. Dengan demikian, SIM Polri merupakan salah satu alat penting dalam modernisasi dan profesionalisasi Polri untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

¹⁰⁵ Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. *Polisi Berikan Pesan_Pesan Kamtibmas Melalui Talk Show di Radio*. URL. <https://www.polresjogja.com/2022/11/polisi-berikan-pesan-pesan-kamtibmas.html>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 17.10 WIB.

2) Sosial Media

Di era digital, penggunaan sosial media oleh polisi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Platform seperti Facebook, Twitter/X, Instagram, dan lainnya menawarkan cara baru bagi penegak hukum untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan publik. Informasi dapat dibagikan dengan cepat dan luas melalui jejaring sosial. Dalam keadaan darurat, bencana alam, atau peristiwa penting, polisi memberikan informasi terkini kepada masyarakat secara *real-time*, termasuk kejadian aktual, tindakan publik yang diperlukan, dan arahan penting. Dengan menggunakan medsos, polisi memastikan informasi sampai ke masyarakat dengan cepat. Medsos juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan informasi preventif kepada masyarakat, seperti tips keselamatan, pencegahan kejahatan, dan nasihat darurat yang membantu masyarakat menjadi lebih sadar dan terlindungi. Di samping itu, penggunaan medsos oleh polisi mendorong transparansi dan akuntabilitas. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan pemahaman yang lebih baik terkait tugas dan tanggung jawab polisi. Beberapa akun resmi medsos Polri di antaranya Twitter/X: @divhumas_polri; Fanpage: Divisi Humas Polri; Youtube: Div Humas Polri; Tiktok: @divhumas_polri; Instagram: @divisihumaspolri.¹⁰⁶

3) Penggunaan Drone

Penggunaan teknologi drone di lingkungan Polri akan memberikan berbagai manfaat signifikan dalam berbagai aspek, seperti pemantauan keamanan dan pengawasan, investigasi kejahatan, dan operasi penegakan hukum. Drone digunakan untuk pemantauan keamanan di daerah-daerah rawan atau sulit dijangkau. Mereka memberikan pemantauan udara *real-time* yang membantu dalam mendeteksi aktivitas kriminal atau kegiatan yang mencurigakan. Drone juga digunakan untuk pencarian dan penyelamatan, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kecelakaan. Mereka membantu dalam mencari orang

¹⁰⁶ Divisi Humas Polri. *Akun Resmi Divisi Humas Polri*. URL. <https://www.instagram.com/divisihumaspolri/>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 18.52 WIB.

yang hilang atau terperangkap di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, drone juga digunakan sebagai alat pendukung dalam operasi-operasi kepolisian, seperti tilang elektronik di mana ETL drone lebih luas menjangkau pelanggaran yang ada di wilayah khususnya di lokasi yang padat arus lalu lintas.¹⁰⁷

4) Layanan Informasi Jaringan Videotron

Layanan informasi jaringan videotron oleh Polri bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan layanan kepolisian kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Videotron ini tergelar di seluruh wilayah Indonesia dan tersedia dalam dua bentuk utama, yaitu *mobile* dan statis. Layanan *mobile* melibatkan unit-unit bergerak yang dapat beroperasi di berbagai lokasi, terutama di daerah-daerah terpencil atau selama acara-acara besar. Unit-unit ini dilengkapi dengan teknologi videotron untuk menampilkan informasi penting, seperti peringatan keamanan, sosialisasi program Polri, dan informasi lalu lintas secara *real-time*.¹⁰⁸ Sementara itu, layanan statis melibatkan pemasangan videotron di lokasi tetap seperti pusat kota, terminal, dan stasiun. Contohnya videotron yang terpasang di persimpangan jalan wilayah Sidrap, yang menginformasikan tentang penerimaan anggota Polri.¹⁰⁹

Dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi ini, Polri akan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung kesuksesan pembangunan nasional.

¹⁰⁷ DetikOto. *Polisi Mulai Uji Coba Tilang Elektronik Pakai Drone*. URL. <https://oto.detik.com/berita/d-6516788/polisi-mulai-uji-coba-tilang-elektronik-pakai-drone>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 19.09 WIB.

¹⁰⁸ Polda Metro Jaya. *Kapolri Apresiasi Inovasi Divisi Humas Polri*. URL. <https://humas.polri.go.id/2023/03/03/kapolri-apresiasi-inovasi-divisi-humas-polri/>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 17.15 WIB.

¹⁰⁹ SebaranKataSulsel. *Kreatif! Polres Sidrap Sosialisasi Rekrutmen Polri Lewat Videotron di Persimpangan Jalan*. URL. <https://www.beritasatu.com/network/sebarankatasulsel/158654/kreatif-polres-sidrap-sosialisasi-rekrutmen-polri-lewat-videotron-di-persimpangan-jalan>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 17.30 WIB.

d. **Peningkatan Profesionalisme SDM**

Peningkatan profesionalisme SDM adalah aspek penting dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital, terutama bagi institusi seperti Polri yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Profesionalisme SDM dalam hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi, keahlian dalam analisis data, kepekaan terhadap isu-isu keamanan siber, serta integritas dalam mengelola dan menyebarkan informasi. Polri menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan riset di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme SDM. Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan profesionalisme SDM dalam hal pengelolaan informasi di era digital, melalui:

1) **Pelatihan dan Pengembangan**

Pelatihan Teknologi Informasi (TI) yang dijalankan oleh Polri merupakan langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme SDM Polri. Beberapa inisiatif pelatihan telah diimplementasikan untuk menguatkan kemampuan anggota Polri dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks. Salah satu upaya signifikan adalah kerja sama antara Polri dan PT Telkom Indonesia dengan mengadakan pelatihan *internetworking* bersertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang TIK. Pelatihan ini memperkuat kualitas pelayanan Polri dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.¹¹⁰ Divisi Humas Polri juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) dan MediaHub. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel Polri berhasil mengoptimalkan sistem digital yang ada dan memperoleh sertifikasi yang relevan, sehingga dapat berkompetisi di era digital saat ini.¹¹¹

¹¹⁰ Rezqiana, Alifia Nuralita dan Harususilo, Yohanes Enggar. Perkuat Kapasitas IT SDM Polri, Telkom Gelar Pelatihan "Internetworking" Bersertifikasi. URL. <https://kilasbumn.kompas.com/telkom/read/2021/10/16/100157626/perkuat-kapasitas-it-sdm-polri-telkom-gelar-pelatihan-internetworking>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 20.30 WIB.

¹¹¹ MediaHub Humas Polri. Menghadapi Tahun Politik, Divhumas Polri Gelar Pelatihan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) 2023. URL. <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/>

Di samping itu, beberapa jenis pelatihan dan pengembangan lain yang dibutuhkan untuk menunjang tugas-tugas Polri meliputi program pelatihan pendalaman komunikasi publik, peningkatan kualitas SDM melalui sertifikasi kualifikasi kehumasan, sertifikasi operator drone kamera, serta pelatihan operator admin Tribrata. Pelatihan dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi ini menunjukkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di era digital.

2) **Kerjasama dengan Institusi Pendidikan**

Polri telah aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Polri. Beberapa bentuk kerjasama ini mencakup pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kelembagaan. Polri menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan kelembagaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Polri.¹¹² Selain itu, Polri dan Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Maluku Utara menandatangani MoU yang difokuskan pada pengembangan SDM dalam bidang keamanan. Kerjasama ini mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹¹³

Polri juga bekerja sama dengan Eka Tjipta Foundation untuk menyediakan beasiswa pendidikan S1 hingga S3 bagi anggota Polri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi mereka.¹¹⁴

10984-menghadapi-tahun-politik-divhumas-polri-gelar-pelatihan-sistem-pengelolaan-informasi-terpadu-spit-2023#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fmediahub.polri.go.id%2Fimage%2Fdetail%2F10984,100, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 20.50 WIB

¹¹² Humas UGM. *UGM dan Polri Jalin Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM*. URL. <https://ugm.ac.id/id/berita/18795-ugm-dan-polri-jalin-kerjasama-peningkatan-kualitas-sdm/>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 20.50 WIB.

¹¹³ TribrataNews. *Polisi Tingkatkan Kerjasama Dengan Institusi Pendidikan di Maluku*. URL. <https://tribratane.ws.polri.go.id/blog/sosial-budaya-5/polisi-tingkatkan-kerjasama-dengan-institusi-pendidikan-di-malut-64862>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 21.10 WIB.

¹¹⁴ Humas Polri. *Polri Jalin Kerjasama Beasiswa S1 Hingga S3 Dengan Eka Tjipta Foundation*. URL. <https://humas.polri.go.id/2023/08/04/polri-jalin-kerjasama-beasiswa-s1-hingga-s3-dengan-eka-tjipta-foundation/>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

Penandatanganan MoU juga dilakukan Polri dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) untuk memperpanjang kerjasama yang sudah terjalin sejak 2015 dengan fokus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi anggota Polri, termasuk kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan.¹¹⁵

3) **Pembentukan Satuan Khusus Polri**

Menghadapi era digital dan meningkatkan pelayanan masyarakat, Polri telah melakukan perubahan struktur organisasi di bidang pelayanan dan penegakan hukum terkait teknologi informasi digital, yaitu Biro Multimedia (Romulmed) pada Divisi Humas Polri, Direktorat Keamanan Khusus (Ditkamsus) pada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) pada Badan Reserse dan Kriminal Polri, dan Bagian Aplikasi Rrotekinfo pada Divisi TIK Polri.¹¹⁶

4) **Sumber Daya Teknologi**

Polri perlu memastikan bahwa SDM memiliki akses ke sumber daya teknologi yang memadai untuk melakukan tugas mereka dengan efektif, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Akses SDM Polri ke sumber daya teknologi merupakan langkah penting dalam peningkatan profesionalisme mereka, terutama dalam era digital saat ini. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk semua aparat kepolisian. Ini mencakup penerapan program Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, serta mendorong pengembangan SDM yang unggul dan adaptif terhadap era teknologi digital.¹¹⁷

¹¹⁵ TribataNews. *Tingkatkan Kualitas SDM, Polri dan Unsrat Manado Teken MoU di Bidang Pendidikan*. URL. <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/tingkatkan-kualitas-sdm-polri-dan-unsrat-manado-teken-mou-di-bidang-pendidikan/>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

¹¹⁶ Polri. *Struktur Organisasi*. URL. <https://polri.go.id/struktur-organisasi>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 20.50 WIB.

¹¹⁷ TribataNews. *Rakernis SSDM Polri, Kapolri Tekankan Pemanfaatan Teknologi Menuju Era 4.0*. URL. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/rakernis-ssdm-polri-kapolri-tekanan-pemanfaatan-teknologi-menuju-era-4-0-30882>, diakses pada 19 Mei 2024 pukul 10.25 WIB.

Melalui langkah-langkah di atas, Polri tidak hanya berupaya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Polri dalam beradaptasi dengan era digital untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan. Dalam konteks upaya Polri untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital guna meningkatkan kepercayaan publik untuk mendukung pembangunan nasional, Teori *Hierarchy of Information* menjadi landasan penting yang menyatakan bahwa informasi dapat disusun dalam hierarki berdasarkan tingkatannya dalam memengaruhi individu atau masyarakat. Teori ini, yang sering kali mengacu pada hierarki data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan (DIKW), membantu memahami bagaimana informasi diolah dan dimanfaatkan secara efektif.

- a. **Data (Data).** Polri mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan polisi, CCTV, medsos, dan informasi dari masyarakat. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen data yang terintegrasi, penting untuk mengelola data yang besar dan beragam. Polri perlu mengimplementasikan sistem informasi dan teknologi mutakhir untuk mengumpulkan data yang akurat dan *real-time*, contohnya melalui penggunaan aplikasi “Dumas Presisi” untuk pengaduan masyarakat.
- b. **Information (Informasi).** Data yang dikumpulkan diolah menjadi informasi yang berguna melalui proses analisis dan interpretasi. Informasi ini harus relevan dan mudah dipahami oleh penerima. Polri menggunakan sistem analisis data dan intelijen untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan disebarakan kepada publik, contohnya melalui penerapan “*Command Center*” yang memonitor situasi keamanan secara *real-time* dan menyebarkan informasi terkini kepada masyarakat.
- c. **Knowledge (Pengetahuan).** Informasi yang telah diolah kemudian diinterpretasikan lebih lanjut dan dikontekstualisasikan untuk membentuk pengetahuan. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana informasi tersebut digunakan dalam konteks spesifik. Polri memberikan pelatihan

dan pengembangan kepada personel untuk memastikan mereka memahami dan memanfaatkan informasi dengan efektif. Polri juga menerapkan sistem pembelajaran berkelanjutan melalui platform *e-learning*.

- d. **Wisdom (Kebijaksanaan).** Pengetahuan diubah menjadi kebijaksanaan dengan menggunakan penilaian dan pengalaman untuk membuat keputusan yang bijaksana dan strategis. Kebijakan ini sangat penting dalam mengelola hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Polri mengembangkan kebijakan dan strategi berbasis bukti yang didukung oleh data dan pengetahuan yang solid. Contohnya Polri memanfaatkan drone dan CCTV untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti seperti tilang elektronik.

Dengan memperhatikan Teori *Hierarchy of Information* ini, Polri dalam hal ini Humas Polri melakukan pengelolaan data dan informasi dengan lebih efektif, serta menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik, yang merupakan fondasi utama untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat, Polri memperkuat posisinya dalam hierarki informasi dan menjadi mitra yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan nasional, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang dicapai melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Selain itu, untuk menganalisa solusi permasalahan dalam rangka optimalisasi pengelolaan informasi di tubuh Polri, digunakan analisis SWOT yang berguna untuk mengevaluasi situasi internal dan eksternal suatu organisasi. Analisis SWOT merupakan identifikasi dari faktor-faktor dengan sistematis guna menyusun strategi yang tepat.¹¹⁸ Berdasarkan identifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam upaya optimalisasi pengelolaan informasi di era digital guna menyukkseskan pembangunan

¹¹⁸ Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis – Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad ke-21*. Cetakan ke-13. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

nasional yang telah diuraikan sebelumnya, secara ringkas dapat dipetakan melalui tabel SWOT sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi Faktor Strategis

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Digitalisasi Layanan Publik	Lemahnya Integrasi Internal Antar Satker
Inovasi Pelayanan Interaktif	Ego Sektoral
Penggunaan TIK	Kesenjangan Digital
Peningkatan Kepercayaan Publik	Perubahan Budaya Kerja
Efisiensi Operasional	Rendahnya Kualitas SDM
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Peningkatan Efisiensi Operasional	Penyalahgunaan Data
Transparansi dan Akuntabilitas	Masifnya Penyebaran Hoaks
Penggunaan Data untuk Prediksi dan Analisis	Rentannya Keamanan Data dan Privasi
Akses Layanan yang Lebih Mudah	Overload / Banjir Informasi
Peningkatan Keterlibatan Publik	Munculnya Polarisasi dan Konflik Informasi

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan hasil identifikasi faktor strategis baik internal maupun eksternal di atas, selanjutnya dilakukan perhitungan *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) dengan hasil skor Total IFAS sebesar 3,34, meliputi Total Kekuatan (S) sebesar 2,23 dan Total Kelemahan (W) sebesar 1,11 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan IFAS

FAKTOR STRATEGIS INTERNAL (IFAS)	BOBOT	RATING	SKOR
KEKUATAN (STRENGTHS)			
1. Digitalisasi Layanan Publik	0,14	5	0,68
2. Inovasi Pelayanan Interaktif	0,09	4	0,36
3. Penggunaan TIK	0,09	4	0,36
4. Peningkatan Kepercayaan Publik	0,14	5	0,68
5. Efisiensi Operasional	0,05	3	0,14
Total Kekuatan (S)			2,23
KELEMAHAN (WEAKNESSES)			
1. Lemahnya Integrasi Internal Antar Satker	0,09	2	0,18
2. Ego Sektoral	0,14	2,5	0,34
3. Kesenjangan Digital	0,14	2,5	0,34
4. Perubahan Budaya Kerja	0,05	1,5	0,07
5. Rendahnya Kualitas SDM	0,09	2	0,18
Total Kelemahan (W)			1,11
TOTAL (S + W)	1,00		3,34

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Sementara itu, perhitungan *External Factors Analysis Strategy* (EFAS) menghasilkan skor Total EFAS sebesar 2,91, meliputi Total Peluang (O) sebesar 1,36 dan Total Ancaman (T) sebesar 1,55 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Perhitungan EFAS

FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL (EFAS)	BOBOT	RATING	SKOR
PELUANG (OPPORTUNITIES)			
1. Peningkatan Efisiensi Operasional	0,09	3	0,27
2. Transparansi dan Akuntabilitas	0,14	3	0,41
3. Penggunaan Data untuk Prediksi dan Analisis	0,09	3	0,27
4. Akses Layanan yang Lebih Mudah	0,09	3	0,27
5. Peningkatan Keterlibatan Publik	0,05	3	0,14
Total Peluang (O)			1,36
ANCAMAN (THREATS)			
1. Penyalahgunaan Data	0,14	2,9	0,40
2. Masifnya Penyebaran Hoaks	0,09	2,8	0,25
3. Rentannya Keamanan Data dan Privasi	0,14	2,9	0,40
4. Overload / Banjir Informasi	0,09	2,8	0,25
5. Munculnya Polarisasi dan Konflik Informasi	0,09	2,7	0,25
Total Ancaman (T)			1,55
TOTAL (O + T)	1,00		2,91

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Dari hasil perhitungan IFAS dan EFAS tersebut, disajikan posisi upaya optimalisasi pengelolaan informasi di era digital berdasarkan aspek *Strength*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* sebagaimana tabel di bawah ini:

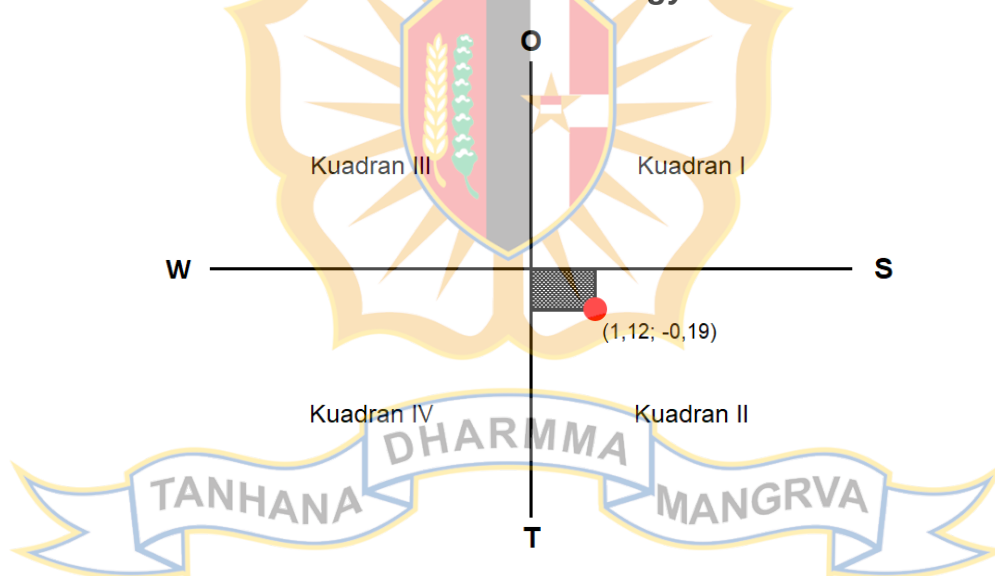
Tabel 4. Posisi Upaya Optimalisasi Pengelolaan Informasi di Era Digital

IFAS	3,34	EFAS	2,91
Skor Total Kekuatan (S)	2,23	Skor Total Peluang (O)	1,36
Skor Total Kelemahan (W)	1,11	Skor Total Ancaman (T)	1,55
Total S-W	1,12	Total O-T	-0,19

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, berikut adalah Matriks *Grand Strategy* yang menggambarkan pertemuan titik singgung IFAS dan EFAS.

Gambar 14. Grand Strategy Matrix



Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan posisi yang tergambar pada diagram di atas, pertemuan titik singgung IFAS (S-W) dan EFAS (O-T) berada pada Kuadran II. Hal ini menandakan bahwa dalam konteks upaya Polri dalam mengelola informasi di era digital sudah cukup baik, namun di sisi lain masih terdapat beberapa ancaman yang dapat menghambat sehingga perlu diantisipasi dengan mengoptimalkan kekuatan internal dan juga peluang yang ada.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

- a. Dalam era digital yang terus berkembang, pengelolaan informasi menjadi sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Revolusi digital telah mengubah cara kita mengakses dan menyebarkan informasi, namun juga memperkenalkan tantangan baru. Teknologi informasi dan komunikasi mempercepat penyebaran informasi, sering kali tanpa verifikasi yang memadai, sehingga hoaks dan disinformasi mudah tersebar, merusak integritas informasi. Tantangan utama termasuk keamanan data, privasi, dan rendahnya literasi digital. Banyak individu kesulitan membedakan informasi valid dari yang tidak, dan ada kesenjangan digital yang memperburuk polarisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan adaptif dalam pengelolaan informasi, melibatkan standar etika dan tanggung jawab yang jelas bagi individu, perusahaan, dan pemerintah.
- b. Mengatasi tantangan dalam pengelolaan informasi di era digital sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Pengelolaan informasi yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong inovasi dan produktivitas. Informasi yang akurat dan mudah diakses membantu pemerintah dan pemangku kepentingan merancang kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang baik juga lebih mampu berpartisipasi dalam pembangunan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur teknologi, keamanan data, literasi digital, dan regulasi yang mendukung harus menjadi prioritas untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

- c. Polri, sebagai penegak hukum telah mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional melalui pemanfaatan teknologi. Inovasi seperti digitalisasi layanan publik melalui SuperApps Presisi dan penggunaan berbagai platform media sosial telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas kepolisian. Polri juga berfokus pada transparansi dan akuntabilitas melalui layanan interaktif dan peningkatan profesionalisme SDM. Upaya-upaya ini tidak hanya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Sementara itu, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam upaya Polri mengoptimalkan pengelolaan informasi di era digital. Hasil dari perhitungan IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa posisi Polri dalam pengelolaan informasi berada di Kuadran II pada Matriks *Grand Strategy*. Ini mengindikasikan bahwa Polri telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memanfaatkan kekuatan internal dan peluang yang ada, namun masih menghadapi beberapa ancaman yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, strategi yang disarankan adalah untuk lebih mengoptimalkan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal guna menghadapi ancaman yang dapat menghambat pengelolaan informasi.

17. Rekomendasi

- a. Polri perlu menambah kuota penerimaan calon anggota untuk Div TIK, dengan menambah persyaratan di dalam rekrutmen, seperti harus memiliki kemampuan khusus di bidang IT atau pernah mengikuti kursus/*workshop* terkait IT. Selain itu, Polri perlu menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan penyedia pelatihan teknologi dalam meningkatkan proses rekrutmen untuk mendapatkan talenta terbaik di bidang IT dan siber.

- b. Polri bekerja sama dengan Kemenkominfo perlu mengembangkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses, pengolahan, dan distribusi data antarunit di Polri/instansi pemerintah lainnya, serta menggandeng media massa untuk meluncurkan kampanye edukasi digital dalam rangka meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk cara melaporkan kejahatan secara *online* dan mengenali informasi palsu (hoaks).
- c. Polri mengembangkan dan menyempurnakan berbagai layanan digital yang telah ada di dalam *SuperApps Presisi* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Serta menyosialisasikan berbagai layanan digital tersebut secara luas melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan tersebut dengan optimal.
- d. Polri perlu menyusun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang mengatur standarisasi data di semua unit kerja. Langkah ini meliputi pembuatan kamus data yang berisi definisi, format, dan standar kualitas data yang baku untuk digunakan di seluruh unit Polri.
- e. Polri perlu mengalokasikan sumber daya untuk peningkatan infrastruktur TIK guna mendukung integrasi sistem informasi. Investasi dalam pengembangan dan pengintegrasian aplikasi seperti SIGNAL dan *SuperApps Presisi* akan memungkinkan pertukaran data yang lebih lancar dan *real-time* antara berbagai unit dan satker Polri.
- f. Polri dapat memperkuat kolaborasi dengan BSSN, Kemenkominfo, serta perusahaan keamanan siber swasta untuk meningkatkan pertahanan terhadap ancaman siber. Selain itu, penting untuk membangun tim tanggap insiden siber internal yang mampu menangani serangan dengan cepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
- Cutlip, S., A. H. Center, *et.al.* (2009). *Effective Public Relation*. Ed. Ke-9. Jakarta: Kencana.
- Daft, Richard L. (2003). *Management*. Singapura: South Western of Thomson Learning.
- Firmansyah, Anang dan Mahardika, Budi. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Handyaningrat, Soewarno. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Hariyanto, B. (2004). *Sistem Manajemen Basis Data*. Bandung: Informatika.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides.
- Rangkuti, Freddy. (2006). *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis – Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad ke-21*. Cetakan ke-13. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sallis, Edwar. (2015). *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Suharsimi, Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal:

- Ahyar, Juni dan Safrida. (2020). *Optimalisasi Pelayanan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Asia-Pacific Journal of Public Policy - Vol. 06 No. 02 (2020).

- Baskarada, Sasa dan Koronios, Andy. (2013). "Data, Information, Knowledge, Wisdom (DIKW): A Semiotic Theoretical and Empirical Exploration of the Hierarchy and its Quality Dimension". *Australasian Journal of Information Systems*. Volume 18 Nomor 1.
- Molitor, Dominik, *et. al.* (2024). "Exploring the Characteristics of Data Breaches: A Descriptive Analytic Study". *Journal of Information Security*, 2024, 15.
- Ogata, Michael. (2019). "Vetting the Security of Mobile Applications". National Institute of Standards and Technology Special Publication. (April 2019).
- Perera, C. J., Zainuddin, Z., Piaw, C. Y., Cheah, K. S., & Asirvatham, D. (2020). The Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. *Education and Urban Society*, 52(9).
- Rahayu, Puji. (2019). *Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak*. Jurnal Al-Fathin Vol. 2 Edisi Januari-Juni 2019.
- Rizky, Farid Al dan Sudhana, Pranakusuma. (2022). *Implementasi Konsep DIKW Pada Penggunaan Microsoft Dynamics 365 CRM Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi kasus pada LKP LCS di Surabaya)*. JIS (Jurnal Ilmu Siber) Vol. 1, No. 4, November 2022.
- Scarfone, Karen. (2008). "Guide to General Server Security". National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-123. (July 2008).
- Scarfone, Karen. (2011). "Guide to Security for Full Virtualization Technologies". National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-125. (January 2011).
- Zins, Chaim. (2007). "Conceptual Approaches for Defining Data, Information, and Knowledge". *Journal of the American Society for Information Science and Technology*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain:

Adhiarna, I Nyoman. (2024). "Kepemimpinan Digital dan Percepatan Transformasi Digital di Indonesia". Materi Ceramah BS. Kepemimpinan PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI.

Bag Infopers Robinkar SSDM Polri dalam Riyanto, Trisno. (2023). *Optimalisasi Transformasi Digital pada Sumber Daya Manusia di Lingkungan Polri Guna Mendukung Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.

Indikator. "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik". Temuan Survei Nasional: 30 Desember 2023 – 6 Januari 2024.

Wathan, Ferry Preska. "Perkembangan Transformasi Digital di Bidang Sistem Pengelolaan Pemerintahan Dalam Rangka Mendukung Clean and Good Governance". Materi Paparan Ceramah BS. Iptek PPRA LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.

"Fishbone Diagram". URL. <https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>, diakses pada 9 April 2024 pukul 19.00 WIB.

"Modul Diagram Fishbone & 5-Why Analysis". URL. <https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/tmi/2014/jiunkpe-is-s1-2014-25410009-30972-kecacatan-appendices.pdf>, diakses pada 9 April 2024 pukul 19.24 WIB.

Achmad, Nirmala Maulana dan Setuningsih, Novianti. *Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024*. URL. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/15355831/kemenkominfo-take-down-1971-berita-hoaks-terkait-pemilu-2024>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 10.30 WIB.

Admin Data Academy. *Peningkatan Kualitas SDM Indonesia dan Penguasaan Teknologi*. URL. <https://dataacademy.co.id/peningkatan-kualitas-sdm-indonesia-dan-penguasaan-teknologi/>, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 15.10 WIB.

Agustini, Pratiwi. *Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali MEningkat Tahun 2022*. URL. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 20.30 WIB.

Annur, Cindy Mutia. *Ada 93,4 Juta Orang Indonesia Belum Terkoneksi Internet, Peringkat Berapa di Dunia?*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/ada-934-juta-orang-indonesia-belum-terkoneksi-internet-peringkat-berapa-di-dunia>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 20.30 WIB.

Annur, Cindy Mutia. *Penetrasi Internet Generasi Milenial Tertinggi Dibanding Kelompok Usia Lainnya di Indonesia*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/penetrasi-internet-generasi-milenial-tertinggi-dibanding-kelompok-usia-lainnya-di-indonesia>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 21.10 WIB.

- Binus University. *Fishbone Diagram*. URL. <https://sis.binus.ac.id/2017/05/15/fishbone-diagram/>, diakses pada 3 Februari 2024 pada pukul 14.40 WIB.
- Biro Humas Kementerian Kominfo. Jaga Ruang Digital, Menkominfo: Kami Tangani 203 Isu Hoaks Pemilu 2024. URL. https://m.kominfo.go.id/content/detail/53920/siaran-pers-no-03hmkominfo012024-tentang-jaga-ruang-digital-menkominfo-kami-tangani-203-isu-hoaks-pemilu-2024/0/siaran_pers, diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.14 WIB.
- Chusna, Farichatul. *Privasi Data: Ancaman, Cara Melindungi, dan Implikasinya*. URL. <https://www.linknet.id/article/privasi-data>, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 15.30 WIB.
- CNBC Indonesia. AS Rilis Kebijakan 'Industri Hijau', Apa Dampaknya ke RI?. URL. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230907163934-4-470458/as-rilis-kebijakan-industri-hijau-apa-dampaknya-ke-ri>, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 21.54 WIB.
- CNN Indonesia. *Polda Metro Akui Aipda Ambarita Salah SOP Soal Periksa HP*. URL. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019142438-12-709694/polda-metro-akui-aipda-ambarita-salah-sop-soal-periksa-hp>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 19.57 WIB.
- CNN Indonesia. *Ramai Kritik Kasus Polri: Sambo, Kanjuruhan hingga Teddy Terseret Sabu*. URL. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221015141915-12-860971/ramai-kritik-kasus-polri-sambo-kanjuruhan-hingga-teddy-terseret-sabu>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 22.41 WIB.
- Cordesman, Anthony H. *Stability in the Middle East: The Range of Short and Long-Term Causes*. URL. <https://www.csis.org/analysis/stability-middle-east-range-short-and-long-term-causes>, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 22.26 WIB.
- Darmawan, Rakha Ariyanto. *Viral Aipda Ambarita Periksa HP Warga Saat Patroli, Kopolnas: Keliru!* URL. <https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patroli-kopolnas-keliru>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 20.10 WIB.

- DetikOto. *Polisi Mulai Uji Coba Tilang Elektronik Pakai Drone*. URL. <https://oto.detik.com/berita/d-6516788/polisi-mulai-uji-coba-tilang-elektronik-pakai-drone>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 19.09 WIB.
- DI, Boy. *Privasi Data: Tantangan dan Solusi dalam Konteks Keamanan Jaringan*. URL. <https://www.kmtech.id/post/privasi-data-tantangan-dan-solusi-dalam-konteks-keamanan-jaringan>, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.
- Dina, Steffani. *Kemenkominfo Aktifkan Mesin Pelacak Hoax dan Ujaran Kebencian*. URL. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12287/kemenkominfo-aktifkan-mesin-pelacak-hoax-dan-ujaran-kebencian/0/sorotanmedia>, diakses pada 29 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.
- Divisi Humas Polri. *Akun Resmi Divisi Humas Polri*. URL. <https://www.instagram.com/divisihumaspolri/>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 18.52 WIB.
- Dutametro.com. *Membangun Keunggulan dengan Litbang dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Polri*. URL. <https://dutametro.com/30/04/2024/membangun-keunggulan-dengan-litbang-dalam-pengelolaan-sumber-daya-manusia-di-polri/tni-polri/>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 19.15 WIB.
- Fajarlie, Nadia Intan. *Anjlok karena Kasus Ferdy Sambo, Kepercayaan Publik ke Polri Melonjak pada Juni 2023*. URL. <https://www.kompas.tv/nasional/421882/anjlok-karena-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-ke-polri-melonjak-pada-juni-2023?page=all>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 23.11 WIB.
- Fajriansyah, Adrian. *Penyebaran Berita Hoaks Meningkat Selama Pemilu 2024*. URL. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/02/penyebaran-berita-hoaks-meningkat-selama-masa-pemilu-2024>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 20.50 WIB.
- Gafar. *Aplikasi Dumas Presisi, Pengaduan Layanan Polri Online*. URL. <https://rri.co.id/kendari/daerah/72658/aplikasi-dumas-presisi-pengaduan-layanan-polri-online>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 20.45 WIB.

Hidayahtulloh, Muhammad Ammar. *Mempersempit Kesenjangan Pengembangan TIK Untuk Mendorong Integrasi ASEAN*. URL. <https://pssat.ugm.ac.id/id/mempersempit-kesenjangan-pengembangan-tik-untuk-mendorong-integrasi-asean/>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 13.40 WIB.

<https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/tmi/2017/jiunkpe-is-s1-2017-25413060-40988-efektivitas-chapter2.pdf>, diakses pada 3 Februari 2024 pada pukul 13.25 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informasi>, diakses pada 30 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

Humas Polda Lampung. *Meningkatkan Kemampuan SDM Polri, Kadivhubinter Buka Pelatihan Digital Forensik Siber*. URL. <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/meningkatkan-kemampuan-sdm-polri-kadivhubinter-buka-pelatihan-digital-forensik-siber>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 11.20 WIB.

Humas Polri. *Polri Jalin Kerjasama Beasiswa S1 Hingga S3 Dengan Eka Tjipta Foundation*. URL. <https://humas.polri.go.id/2023/08/04/polri-jalin-kerjasama-beasiswa-s1-hingga-s3-dengan-eka-tjipta-foundation/>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

Humas Polri. *Polri Luncurkan Program Beyond Trust Presisi 2024*. URL. <https://humas.polri.go.id/2024/01/24/polri-luncurkan-program-beyond-trust-presisi-2024/>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 11.30 WIB.

Humas UGM. *UGM dan Polri Jalin Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM*. URL. <https://ugm.ac.id/id/berita/18795-ugm-dan-polri-jalin-kerjasama-peningkatan-kualitas-sdm/>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 20.50 WIB.

HumasRes Pagaram. *Antisipasi Tindak Kejahatan, Polri Memberikan Bantuan Polisi Kepada Masyarakat*. URL. <https://humas.polri.go.id/2023/11/07/antisipasi-tindak-kejahatan-polri-memberikan-bantuan-polisi-kepada-masyarakat/>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 23.22 WIB.

Institute for Security & Development Policy. *Buatan Tiongkok Tahun 2025*. URL. https://www-isdpeu.translate.google.com/publication/made-china-2025/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 21.48 WIB.

Jurnaliston, Reza dan Krisiandi. *Kapolri Sebut Humas Jadi Fungsi Utama Polri*. URL. https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/11473081/kapolri-sebut-humas-jadi-fungsi-utama-polri?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 19.40 WIB.

KBBI. -. "Kelola". URL. <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 9 April 2024 pukul 18.42 WIB.

Kemp, Simon. *Digital 2024 April Global Statshot Report*. URL. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-april-global-statshot>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 13.00 WIB.

Kemp, Simon. *Digital 2024: Indonesia*. URL. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 20.15 WIB.

Kemp, Simon. *Laporan Statistik Global Digital April 2024*. URL. https://datareportal.com.translate.google.com/reports/digital-2024-april-global-statshot?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 13.20 WIB.

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. *Polisi Berikan Pesan_Pesan Kamtibmas Melalui Talk Show di Radio*. URL. <https://www.polresjogja.com/2022/11/polisi-berikan-pesan-pesan-kamtibmas.html>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 17.10 WIB.

Komisi Pemilihan Umum. *Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024*. URL. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 22.05 WIB.

Kompas.com. *Citra Polri Setelah Rekayasa Sambo Terbongkar*. URL. <https://jeo.kompas.com/citra-polri-setelah-rekayasa-ferdy-sambo-terbongkar>, diakses pada 26 April 2024 pada pukul 10.50 WIB.

Lemhannas RI. *Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Menjadi Negara Ketiga Kasus Kebocoran Data Terbanyak di Dunia*. URL. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/2012-gubernur-lemhannas-ri-indonesia-menjadi-negara-ketiga-kasus-kebocoran-data-terbanyak-di-dunia>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 21.40 WIB.

Limanseto, Haryo. *Kualitas SDM Kelas Menengah dan Transformasi Digital Menjadi Kunci Indonesia Maju 2045*. URL. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3123/kualitas-sdm-kelas-menengah-dan-transformasi-digital-menjadi-kunci-indonesia-maju-2045>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 19.30 WIB.

Madrim, Sasmito. *APJII: 23% Warga Indonesia Belum Punya Akses ke Internet*. URL. <https://www.voaindonesia.com/a/apjii-23-warga-indonesia-belum-punya-akses-ke-internet/6610370.html>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 14.10 WIB.

Mawardi, Isal. *Perintah Jokowi Stop Bikin Aplikasi Baru di Pemerintahan*. URL. <https://news.detik.com/berita/d-7360553/perintah-jokowi-stop-bikin-aplikasi-baru-di-pemerintahan/1>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 21.10 WIB.

MediaHub Humas Polri. *Frequently Asked Questions*. URL. <https://mediahub.polri.go.id/faq>, diakses pada 31 Mei 2024 pukul 20.15 WIB.

MediaHub Humas Polri. *Menghadapi Tahun Politik, Divhumas Polri Gelar Pelatihan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) 2023*. URL. <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/10984-menghadapi-tahun-politik-divhumas-polri-gelar-pelatihan-sistem-pengelolaan-informasi-terpadu-spit-2023#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fmediahub.polri.go.id%2Fimage%2Fdetail%2F10984,100>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 20.50 WIB.

Melo, Enrique Duarte. *Membongkar Perang Dagang Teknologi AS-Tiongkok*. URL. <https://www-bcg-com.translate.goog/publications/2019/us-china-tech-trade-war? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 21.30 WIB.

- Muhamad, Nabilah. *Indeks Literasi Digital Indonesia Terus Meningkatkan sampai 2023*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/preview/2023/12/14/indeks-literasi-digital-indonesia-terus-meningkat-sampai-2023>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 21.30 WIB.
- Nugraheny, Dian Erika dan Prabowo, Dani. *Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"*. URL. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/12471331/jokowi-minta-polri-transparan-usut-kasus-vina-cirebon>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 22.57 WIB.
- Polda Jatim. *Aplikasi E- Dumas Presisi Pengaduan Kepolisian langsung Via On Line - Aplikasi Bisa Diunduh di Play Store*. URL. <https://humas.polri.go.id/2021/09/03/aplikasi-e-dumas-presisi-pengaduan-kepolisian-langsung-via-online-aplikasi-bisa-diunduh-di-play-store/>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 21.05 WIB.
- Polda Metro Jaya. *Kapolri Apresiasi Inovasi Divisi Humas Polri*. URL. <https://humas.polri.go.id/2023/03/03/kapolri-apresiasi-inovasi-divisi-humas-polri/>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 17.15 WIB.
- Polres Tapanuli Selatan. *Kapolda Sumut Luncurkan Podcast "Police Talk" untuk Dekatkan Polisi dengan Masyarakat*. URL. <https://humas.polri.go.id/2024/06/07/kapolda-sumut-luncurkan-podcast-police-talk-untuk-dekatkan-polisi-dengan-masyarakat/>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 16.30 WIB.
- Polri. *Izin Keramaian*. URL. <https://polri.go.id/izin-keramaian>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 20.25 WIB.
- Polri. *SKCK Online*. URL. <https://skck.polri.go.id/>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 20.15 WIB.
- Polri. *Struktur Organisasi*. URL. <https://polri.go.id/struktur-organisasi>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 20.50 WIB.
- Polri. *Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)*. URL. <https://polri.go.id/sp2hp>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 22.45 WIB.
- PolriTV. *About*. URL. <https://tvradio.polri.go.id/about>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 19.55 WIB.

- Prayudhia, Maria Cicilia Galuh. *BPS: Kunjungan Wisman Januari 2024 Tertinggi Dalam 4 Tahun*. <https://www.antaranews.com/berita/3990258/bps-kunjungan-wisman-januari-2024-tertinggi-dalam-4-tahun>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 20.30 WIB.
- Pusjarah Polri. *Museum Polri*. URL. <https://museumpolri.org/>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 23.35 WIB.
- Rahmawaty, Laily. *Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. URL. <https://www.antaranews.com/berita/3407010/kapolri-komitmen-terus-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik>, diakses pada 21 Mei 2024 pukul 20.20 WIB.
- Rezqiana, Alifia Nuralita dan Harususilo, Yohanes Enggar. *Perkuat Kapasitas IT SDM Polri, Telkom Gelar Pelatihan "Internetworking" Bersertifikasi*. URL. <https://kilasbumn.kompas.com/telkom/read/2021/10/16/100157626/perkuat-kapasitas-it-sdm-polri-telkom-gelar-pelatihan-internetworking>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 20.30 WIB.
- Rizaty, Monavia Ayu. *Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%*. URL. <https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>, diakses pada 29 April 2024 pada pukul 22.50 WIB.
- Safitri, Eva. *IPW Minta Aipda Ambarita yang Viral Periksa HP Warga Ditindak Tegas*. URL. <https://news.detik.com/berita/d-5774649/ipw-minta-aipda-ambarita-yang-viral-periksa-hp-warga-ditindak-tegas>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 19.57 WIB.
- Salam, Hidayat. *Hoaks Pemilu Diprediksi Meningkatkan Sesuai Pencoblosan*. URL. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/13/hoaks-pemilu-diprediksi-meningkat-usai-pencoblosan>, diakses pada 27 April 2024 pada pukul 15.30 WIB.
- Santika, Erlina F. *Peta Penetrasi dan Kontribusi Internet Indonesia 2024, Jawa Tertinggi*. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/12/peta-penetrasi-dan-kontribusi-internet-indonesia-2024-jawa-tertinggi>, diakses pada 25 April 2024 pada pukul 20.45 WIB.

SebaranKataSulsel. *Kreatif! Polres Sidrap Sosialisasi Rekrutmen Polri Lewat Videotron di Persimpangan Jalan*. URL. <https://www.beritasatu.com/network/sebarankatasulsel/158654/kreatif-polres-sidrap-sosialisasi-rekrutmen-polri-lewat-videotron-di-persimpangan-jalan>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 17.30 WIB.

Sendari, Anugerah Ayu. *Public Relation Adalah Humas, Kenali Fungsi Dan Kegiatannya*. URL. <https://www.liputan6.com/hot/read/4732342/public-relations-adalah-humas-kenali-fungsi-dan-kegiatannya>, diakses pada 3 Februari 2024 pukul 15.50 WIB.

TBNews. *Tentang Kami*. URL. <https://tribratanews.polri.go.id/tentang-kami>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 19.05 WIB.

Tim Media Servis. *Pengembangan Kualitas SDM Kunci Capai Indonesia Maju 2045*. URL. <https://tirto.id/pengembangan-kualitas-sdm-kunci-capai-indonesia-maju-2045-gQmm>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 20.10 WIB.

TribrataNews. *Polisi Tingkatkan Kerjasama Dengan Institusi Pendidikan di Malut*. URL. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/sosial-budaya-5/polisi-tingkatkan-kerjasama-dengan-institusi-pendidikan-di-malut-64862>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 21.10 WIB.

TribrataNews. *Rakernis SSDM Polri, Kapolri Tekankan Pemanfaatan Teknologi Menuju Era 4.0*. URL. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/rakernis-ssdm-polri-kapolri-tekankan-pemanfaatan-teknologi-menuju-era-4-0-30882>, diakses pada 19 Mei 2024 pukul 10.25 WIB.

TribrataNews. *Tingkatkan Kualitas SDM, Polri dan Unsrat Manado Teken MoU di Bidang Pendidikan*. URL. <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/tingkatkan-kualitas-sdm-polri-dan-unsrat-manado-teken-mou-di-bidang-pendidikan/>, diakses pada 18 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

VOA News. *Tensions Heighten in Middle East*. URL. <https://www.voanews.com/a/tensions-heighten-in-middle-east-/7729425.html>, diakses pada 15 Agustus 2024 pada pukul 22.14 WIB.

Wibowo, Anshar Dwi. *Mempersiapkan SDM untuk Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital*. URL. <https://katadata.co.id/berita/nasional/614b2367de581/mempersiapkan-sdm-untuk-optimalisasi-potensi-ekonomi-digital>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 19.50 WIB.

Yudha, Tangguh. *Deretan Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sepanjang Tahun 2023*. URL. <https://tekno.sindonews.com/read/1279847/207/deretan-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sepanjang-tahun-2023-1702890746?showpage=all>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

Yuniarto, Topan. *Ironi Banjir Informasi di Mata Publik*. URL. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/06/28/ironi-banjir-informasi-di-mata-publik>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 22.40 WIB.



ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PENGELOLAAN INFORMASI DI ERA DIGITAL GUNA MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : ADE YAYA SURYANA, S.I.K., M.H.
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 71070352
Jabatan/TMT : ANALIS KEBIJAKAN MADYA
BIDANG KEAMANAN NEGARA
BAINTELKAM POLRI (23-01-2024)
Lama Jabatan : 0 Tahun 7 Bulan 0 Hari
Tempat, Tanggal Lahir : KAB. MAJALENGKA, 21-07-1971
Agama : ISLAM
Suku : SUNDA
Status Personel : AKTIF
Email : adeysuryana@gmail.com
Nomor HP : 081218491993

I. Pendidikan Kepolisian

Tingkat	Tahun
SESPIMMEN	2007
PTIK	2004
AKABRI	1993

II. Pendidikan Umum

Tingkat	Nama Institusi	Tahun
S2	UNIVERSITAS MERDEKA MALANG	2016
SMA	SMU NEGERI MAJALENGKA	1990
SMP	SMP NEGERI KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA	1987
SD	SD NEGERI KERTAJAYA, KABUPATEN MAJALENGKA	1984

III. Riwayat Pangkat

Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-01-2017
AKBP	01-07-2006
KOMPOL	01-07-2004
AKP	01-10-1999
IPTU	01-10-1996
IPDA	02-08-1993

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG KAMNEG BAINTELKAM POLRI	23-01-2024
ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG PID DIVHUMAS POLRI	26-07-2021
KABIDHUMAS POLDA KALTIM (IIB3)	14-11-2016
WADIRINTELKAM POLDA KALTIM (IIIA1)	19-10-2011
KAPOLRES PASER POLDA KALTIM (IIIA2)	05-08-2010
KANIT C.3.3 DEN C.3 DIT C BAINTELKAM POLRI	28-12-2007
PAMEN BAINTELKAM POLRI	13-12-2007
PAMEN POLDA BABEL	24-07-2007
WAKAPOLRES PANGKAL PINANG POLDA BABEL (IIIB1)	06-07-2005
PS DIRSAMAPTA POLDA BABEL (IIB3)	22-03-2005
PLH. DIRSAMAPTA DITSABHARA POLDA BABEL	22-10-2004
ADC CAWAPRES/OPS MANTAP BRATA XII/2004 POLRI (ADC CAWAPRES Dr. (HC). Ir. SISWONO YUDO HUSODO)	22-05-2004
PAMA PTIK STIK LEMDIKLAT POLRI	11-09-2002
PAUR SUBBAG REN SETDIT IPP POLDA KALTIM	11-10-2001
KASATSABHARA POLRES BALIKPAPAN POLDA KALTIM (IVA)	10-04-2001
KAPOLSEK SAMARINDA ULU POLRESTA SAMARINDA POLDA KALTIM (IIIB2)	10-09-1998
KASAT IPP POLRES BONTANG POLDA KALTIM	03-09-1997
KANIT SAT IPP POLRESTA SAMARINDA POLDA KALTIM	04-05-1995
PAMA POLRESTA SAMARINDA POLDA KALTIM	20-08-1994

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

Dikbang	TMT
ASSESSMENT DIR INTEL	2017
KURSUS PERWIRA SENIOR INTELIJEN	2013
ASSESSMENT DIR INTEL	2012
SUSJAB KAPOLRES I	2010
OPERATIONAL ANALYSIS COURSE	2008
VITAL FACILITY SECURITY	2001
DIKBANGSPES PAMEN BAHASA INGGRIS (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE)	2000
PA UNIT OPSNAL INTELIJEN	1997
PA DASAR INTELIJEN	1996
PA SERSE	1994

VI. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan	TMT
BINTANG BHAYANGKARA NARARYA	2018
SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	2017
SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2008
SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2003
SATYALANCANA DWIDYA SISTHA	2002

VII. Kemampuan Bahasa

Bahasa	Status
INGGRIS	TIDAK AKTIF
SUNDA	TIDAK AKTIF
JAWA	TIDAK AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan	Lokasi
PELATIHAN PROGRAM ANTI TEROR TAHUN 2001	NEW MEXICO, USA

Jakarta,

Agustus 2024

ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG KAMNEG
BAINTELKAM POLRI

